



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



USAID CEGAH Empowering Indonesia's Community of Accountability

MODUL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Tim Penyusun:

Widati Wulandari

Sigid Suseno

Wanodyo Sulistyani

Erika Magdalena Chandra

Nella Sumika Putri

Budi Arta Atmaja

**PUSAT STUDI KEBIJAKAN KRIMINAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

MODUL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pengarang:

Widati Wulandari
Sigid Suseno
Wanodyo Sulistyani
Erika Magdalena Chandra
Nella Sumika Putri
Budi Arta Atmaja

Penerbit: Unpad Press

Tahun: 2018

Seri: -

ISBN: 978-602-439-459-2

Link: -

Website: <http://press.unpad.ac.id/>

Email: press@unpad.ac.id

I. PENDAHULUAN

A. KONSEP KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF

Korupsi adalah konsep yang luas yang melingkupi berbagai perilaku koruptif. Korupsi secara etimologis memiliki makna yang cukup luas dan beragam, namun pada dasarnya semua merujuk pada pengertian perilaku yang licik karena bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang tertentu yang sekaligus merugikan orang banyak, masyarakat atau negara. Korupsi yang berasal dari kata *corruptio* (Latin) atau *corrupt* (Inggris), merujuk pada pengertian perilaku yang merusak, busuk, dan menyebabkan kemerosotan, yang merupakan antonim dari keutuhan atau integritas.

Dalam kamus Bahasa Indonesia,¹ korupsi dijelaskan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Sedangkan dalam kamus hukum Black’s Law² kata *corruption* diterjemahkan, sebagai: “perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk memberi keuntungan yang bertentangan dengan tugas resminya atau bertentangan dengan hak-hak orang lain” atau “perbuatan pejabat atau orang yang dipercaya yang menyalahgunakan posisinya atau karakter jabatannya, yang bertentangan dengan tugasnya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan hak-hak orang lain”.

Upaya menjelaskan konsep korupsi telah banyak dilakukan oleh para ahli, filsuf maupun peneliti di bidang korupsi. Definisi korupsi dikategorikan antara lain menjadi:³

1. Definisi fisik: Kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikan dan busuk.
2. Definisi moral: Penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik atau semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan moral; kejahatan.
3. Situasi penjungkirbalikan: Penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi kemurnian di awal, misalnya penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya dari kemurnian asali.

Dalam hukum Indonesia,⁴ korupsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis perbuatan: pertama, perbuatan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

² Black’s Law Dictionary 7th ed, West Group, St Paul MN, 1999.

³ B. Herry Priyono, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 22-24.

orang lain yang merugikan keuangan negara baik dilakukan oleh pejabat dengan menyalahgunakan kewenangannya/jabatannya ataupun oleh masyarakat pada umumnya; kedua, perbuatan memberi dan menerima suap; serta ketiga, gratifikasi. Disamping itu, peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga mengatur sejumlah perbuatan lainnya yang berkaitan dengan korupsi. Perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum Indonesia, diancam dengan hukuman pidana yang berat karena dianggap sebagai kejahatan yang serius yang memiliki dampak luas.

Disamping perbuatan korupsi sebagaimana dirumuskan dalam hukum, sejumlah perilaku sehari-hari juga dikualifikasikan sebagai perilaku yang koruptif ketika mengarah pada perbuatan korupsi. Perilaku yang dikualifikasikan sebagai perilaku koruptif meliputi antara lain: ketidakjujuran dalam berbagai bentuknya di kehidupan sehari-hari; ketidakpedulian pada nasib orang lain akibat dari perilakunya; berbagai bentuk ketidakdisiplinan; mengabaikan tanggungjawab/kewajiban, termasuk ketidakadilan atau perlakuan berbeda.

B. DAMPAK KORUPSI

Korupsi maupun perilaku koruptif telah terbukti menimbulkan dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat luas. Kemiskinan dan kondisi perekonomian yang buruk, kelaparan dan kondisi kesehatan masyarakat yang buruk, kerusakan lingkungan, infrastruktur yang tidak memadai, kualitas pendidikan yang tidak memenuhi standar, kondisi politik dan demokrasi yang tidak sehat, buruknya birokrasi di pemerintahan serta penegakan hukum yang tidak adil, antara lain disebabkan oleh korupsi di berbagai bidang maupun perilaku-perilaku koruptif di dalam masyarakat.

⁴ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dampak Masif terhadap Korupsi Ekonomi



PENURUNAN PRODUKTIVITAS

Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi, membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik, terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik.



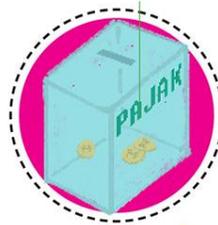
LESUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.



RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA UNTUK PUBLIK

Jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk, adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.



MENURUNNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK

APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.



MENINGKATNYA HUTANG NEGARA

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun.



Transparansi Internasional Indonesia (TI) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupannya. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup.

Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>

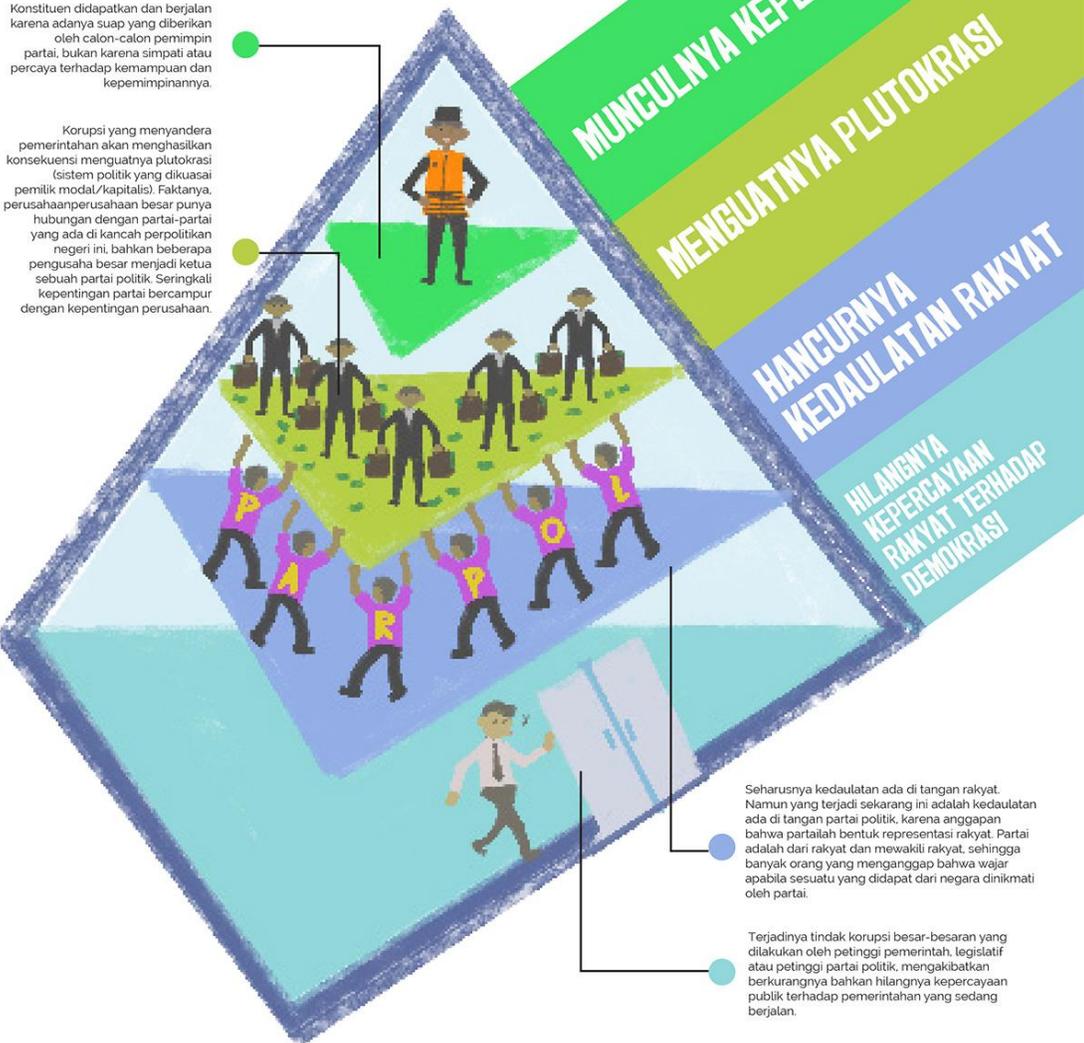
Dampak Masif terhadap Birokrasi Korupsi Pemerintahan



Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-birokrasi-pemerintahan>



Dampak Masif terhadap Korupsi Politik dan Demokrasi



Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-politik-dan-demokrasi>

Dampak Masif terhadap Korupsi Penegakan Hukum

FUNGSI PEMERINTAHAN MANDUL

Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A

Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi



B

Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset



C

Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik



HILANGNYA KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP LEMBAGA NEGARA

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang.



lembaga Negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:



Legislatif
(Dewan Perwakilan Rakyat)



Partai Politik



Kepolisian RI



Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan-hukum>



Dampak Masif terhadap **Korupsi** : **Pertahanan dan Keamanan**

LEMAHNYA ALUTSISTA DAN SDM

Anggaran hankam menguap sia-sia karena korupsi. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Padahal Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia.

LEMAHNYA GARIS BATAS NEGARA

Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing (www.tempointeraktif.com/ hg/bisnis, 12 April 2011).



MENGUATNYA SISI KEKERASAN DALAM MASYARAKAT

Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan.



Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-pertahanan-dan-keamanan>



Dampak Masif Korupsi terhadap Kerusakan Lingkungan

MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN

Akibat yang dihasilkan oleh kerusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

MENURUNNYA KUALITAS HIDUP

Kerusakan hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia.

Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan>

Transparansi Internasional Indonesia mencatat bahwa sekitar 30-40% dana APBN dan APBD hilang karena korupsi, dan 70% korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah. Korupsi dana APBD dan APBN serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah memiliki dampak yang sangat besar bagi negara. Pusat Edukasi Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi bahwa korupsi di atas berdampak antara lain pada: lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi; penurunan produktivitas;

penurunan pendapatan sektor pajak; rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik; bahkan dapat meningkatkan utang negara.

Korupsi juga menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebani pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini mengakibatkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat sekaligus menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dikeluarkan akibat korupsi, misalnya korupsi di sektor izin usaha dan lain-lain. Demikian pula dalam bidang penegakan hukum, aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dengan jujur dan adil, seringkali melupakan integritasnya dengan menerima suap, janji-janji, gratifikasi dalam berbagai bentuk. Ini kemudian berdampak pada adanya perilaku tidak adil dan keberpihakan kepada pihak memberi keuntungan baginya.

Di bidang politik dan demokrasi, banyak diketahui bahwa konstituen didapatkan karena adanya suap atau janji-janji yang diberikan oleh para calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau kepercayaan pada kemampuan dan kepemimpinannya. Sebaliknya, para calon pejabat maupun calon legislatif yang berkampanye tidak segan menerima bantuan dana yang besar sebagai modal kampanye dari para pengusaha, dengan janji-janji apabila berhasil menduduki suatu jabatan, akan memberikan berbagai kemudahan kepada para pengusaha yang telah membantunya.

Korupsi juga dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan atau menurunnya kualitas lingkungan. Pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur yang dipengaruhi oleh berakibat pada perusakan alam. Hal ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Tercatat dari kasus ilegal logging dugaan kerugian negara yang mencapai 30-42 Triliun Rupiah per tahun.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya ketimpangan pendapatan dan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

C. MELAWAN KORUPSI DENGAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dan perilaku koruptif lainnya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dapat dibagi ke dalam faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi ke dalam faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*).⁵ Faktor pendorong terjadinya korupsi yang berasal dari luar diri pelaku misalnya adalah kemiskinan atau kebutuhan yang tinggi. Faktor penarik misalnya

⁵ Katherine S. Williams, *Textbook on Criminology*, Oxford, University Press, Oxford, U.K., 2000, hlm. 368.

adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, lemahnya kontrol sosial atau lemahnya penegakan aturan, serta berbagai tarikan atau faktor yang menggoda orang untuk melakukan korupsi seperti gambaran tentang kehidupan yang mewah dan berbagai kemudahan lainnya.

Faktor internal ialah faktor pendorong dari dalam diri sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi atau berperilaku koruptif adalah lemahnya kontrol diri akibat dari ketiadaan atau pengabaian/kurangnya internalisasi nilai-nilai positif yang mampu mencegah orang berperilaku menyimpang. Lemahnya kontrol diri ini disebabkan pula oleh lemahnya ikatan sosial diri dengan orang-orang atau institusi lainnya di luar dirinya. Seseorang dapat terhindar dari perilaku menyimpang apabila memiliki ikatan-ikatan sosial berikut: *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *belief*.⁶ *Attachment* adalah ikatan seseorang misalnya dengan orang tua, anak, dan keluarga lainnya, bahkan dengan teman-temannya. *Commitment* adalah aspirasi dan harapan-harapan seseorang atas berbagai jerih payah yang telah dilakukannya melalui pekerjaannya serta hubungan baiknya dengan institusi-institusi lainnya. *Involvement* adalah keterlibatan seseorang dalam berbagai aktivitas yang memiliki makna di lingkungannya. *Belief* adalah keyakinan/kepercayaan pada sistem nilai di masyarakat.

Faktor internal adalah faktor penting dalam terjadinya korupsi dan perilaku koruptif lainnya. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai anti korupsi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan perilaku koruptif. Nilai-nilai anti korupsi tersebut meliputi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan.

II. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Salah satu bentuk nyata dari pentingnya meng-internalisasikan dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi sebagaimana disebutkan di atas adalah terkait dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). 17 tujuan telah ditetapkan di dalam SDGs dengan target-target yang hendak dicapai guna mewujudkan masing-masing tujuan tersebut. Di bawah ini adalah 17 tujuan dalam SDGs serta kaitannya dengan nilai-nilai anti korupsi.

⁶ *Ibid.*, hlm. 374.



Sumber: <http://sdgs.bappenas.go.id/>

1 TANPA KEMISKINAN



**“MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM
SEGALA BENTUK DIMANAPUN”**

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT TANPA KEMISKINAN

A. GAMBARAN UMUM TUJUAN MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Kemisikinan adalah fenomena yang kompleks. Kemiskinan umumnya dikaitkan dengan pendapatan, dan kerap kali diukur berdasarkan pendapatan perkapita. Ukuran yang biasanya digunakan untuk menentukan kemiskinan adalah pendapatan dibawah 1 dolar Amerika per hari, dan ini dikaitkan dengan daya beli individu. Namun demikian, banyak kritik yang diajukan terhadap ukuran-ukuran untuk menentukan kemiskinan di atas. Pandangan yang lebih luas memasukkan bukan hanya rendahnya pendapatan, namun juga rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, kerentanan (terhadap: menurunnya kesehatan dan pendapatan, bencana alam, kejahatan dan kekerasan dan pembatasan pendidikan), serta ketidakberdayaan (mengalami diskriminasi, ketiadaan peluang memperoleh penghasilan, perlakuan buruk dari institusi pemerintah, ketidakjelasan status hukum/minimnya akses terhadap keadilan).⁷

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB ikut dalam kesepakatan global pembangunan baru yaitu *Sustainable Development Goals 2015-2030*. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Pembangunan baru ini adalah pembangunan yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan

⁷ Eric Chetwynd dkk, *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*, Management Systems International, Washington, 2003, hlm. 4-5.

lingkungan hidup. Penerapan SDGs di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di banyak negara di dunia. Oleh karena itu, upaya penghapusan kemiskinan menjadi tujuan utama agenda pembangunan berkelanjutan. Masalah kemiskinan harus dilihat dalam kerangka multidimensi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dikaitkan juga dengan persoalan lain, yakni: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan; (iii) ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.⁸

Untuk memastikan tercapainya tujuan menghapuskan kemiskinan ini ditentukan sejumlah target. Target yang hendak dicapai dalam tujuan menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun meliputi, antara lain:⁹ pengentasan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang berpendapatan kurang dari 1.25 USD per hari; penerapan secara nasional sistem dan upaya jaminan sosial yang tepat dan jaminan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan kepemilikan lain, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro; ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim, guncangan ekonomi, sosial, lingkungan; jaminan mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber; serta pembentukan kebijakan dan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin.

B. POTRET KEMISKINAN DI INDONESIA

Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam agenda SDGs di Indonesia adalah menghapus segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Target yang hendak dicapai pada 2030 adalah setiap warga Negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta tersedianya jaminan sosial bagi masyarakat yang sangat miskin.

Berikut adalah lembar fakta tentang potret kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan oleh PBB:

⁸ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanpa Kemiskinan <<http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/>>

⁹ <http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/>



GOAL 1 NO POVERTY

End poverty in all its forms
everywhere.



Sumber: <http://www.un.or.id/what-we-do/sustainable-development-goals-sdgs/19-sdg/90-goal-1-no-poverty>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah penduduk miskin (pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2018 telah berkurang menjadi 25,95 juta jiwa (9,82%). Jumlah ini lebih rendah dibanding data pada September 2017, yakni sebanyak 26,58 juta (10,12%), juga lebih rendah dari data pada Maret 2017 yang mencapai 27,77 juta jiwa (10,64%), dari tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan pulau di Indonesia dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah: Maluku dan Papua (29.25% di pedesaan dan 5.03% di perkotaan), diikuti Bali dan Nusa Tenggara (17.77% di pedesaan dan 9.18% di perkotaan), Sulawesi (13.68% di pedesaan dan 5.83% di perkotaan), Jawa (12.81 di pedesaan dan 6.82 di perkotaan), Sumatera (11.66% di pedesaan dan 8.65% di perkotaan), Kalimantan (7.60% di pedesaan dan 4.33% di perkotaan) sebagaimana tergambar dalam infografis berikut:

PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA MARET 2018

Berita Resmi Statistik No. 57/07/Th. XXI, 16 Juli 2018



Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau



BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Infografis, <<https://www.bps.go.id/galeri.html>>

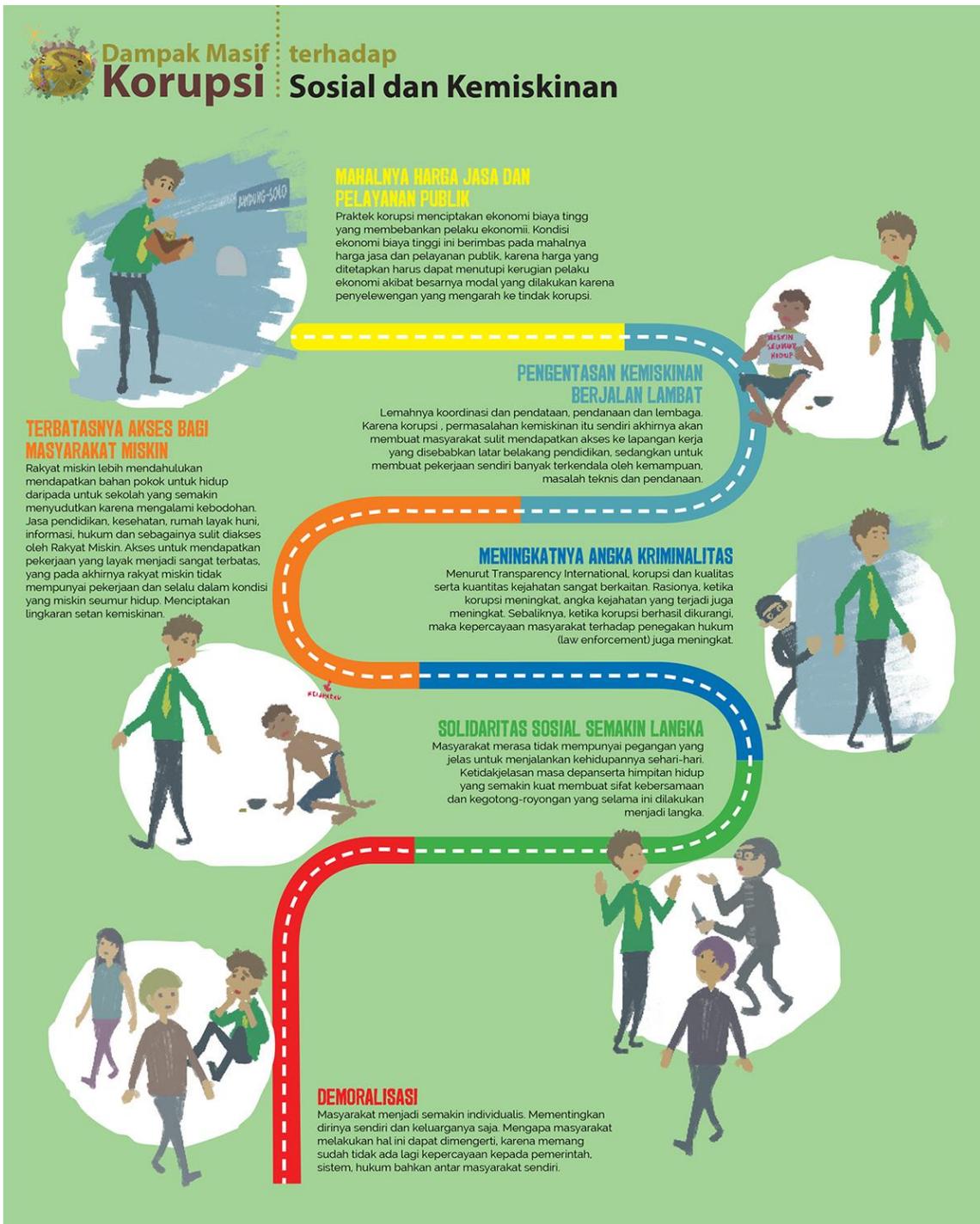
Meskipun sejak 1990 angka kemiskinan telah menurun lebih dari setengahnya, namun PBB mencatat bahwa satu dari lima orang yang hidup di negara berkembang masih hidup dengan uang kurang dari 1.25 dollar Amerika per hari, dan jutaan orang lainnya masih berpendapatan sedikit di atas itu, sehingga rentan tergelincir kembali ke jurang kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, masih menjadi tujuan utama pembangunan berkelanjutan.

C. KORUPSI DAN KEMISKINAN

Telah banyak studi yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kemiskinan dan korupsi. Meskipun korupsi bukan satu-satunya faktor penyebab kemiskinan, namun korupsi di sektor publik, seperti penyalahgunaan fasilitas publik/anggaran untuk

kepentingan pribadi, diyakini memperburuk kondisi kemiskinan. Korupsi mempengaruhi kondisi perekonomian karena korupsi, misalnya budaya suap-gratifikasi terhadap pejabat publik, akan menurunkan angka investasi, menurunkan produktivitas sektor publik, menyebabkan inefisiensi dengan meningkatkan biaya produksi (barang-jasa) dan karenanya menghambat pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, korupsi dalam bentuk penyalahgunaan uang/anggaran negara untuk kepentingan pribadi akan menurunkan kualitas infrastruktur publik, menurunkan kualitas layanan publik, meningkatkan kesenjangan pendapatan (*income inequality*) yang pada gilirannya juga berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan.¹⁰

¹⁰ Eric Chetwynd dkk, *ibid*, hlm. 7.



Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>

Disamping korupsi seperti suap-gratifikasi dan penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi sebagaimana di uraikan di atas, banyak perilaku koruptif lainnya yang dapat berpengaruh pada kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan menghapus kemiskinan seluruh masyarakat termasuk pemerintah harus memiliki nilai-nilai: kejujuran,

kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

D. LATIHAN

1. Carilah contoh kasus korupsi dana desa, korupsi di sektor pendidikan, atau di sektor kesehatan di Indonesia, diskusikan dalam kelompok adakah dampaknya terhadap kemiskinan di Indonesia, lalu presentasikan di depan kelas.
2. Diskusi dalam kelompok, apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing disiplin ilmu di Universitas Padjadjaran dalam mewujudkan SDGs#1 tanpa kemiskinan, lalu presentasikan di depan kelas.
3. Urutkan nilai-nilai anti korupsi berikut berdasarkan prioritas untuk mencapai tujuan SDGs# 1 Tanpa Kemiskinan, dan jelaskan alasannya:
 - KEJUJURAN
 - KEPEDULIAN
 - KEMANDIRIAN
 - KEDISIPLINAN
 - TANGGUNG JAWAB
 - KERJA KERAS
 - KESEDERHANAAN
 - KEBERANIAN
 - KEADILAN

E. SUMBER

B. Herry Priyono, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Eric Chetwynd dkk, *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*, Management Systems International, Washington, 2003.

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi terhadap Ekonomi, <<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>>

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintahan, <<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-birokrasi-pemerintahan>>

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi terhadap Politik dan Demokrasi, <<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-politik-dan-demokrasi>>

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum, <<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan-hukum>>

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi terhadap Pertahanan dan Keamanan, <<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-pertahanan-dan-keamanan>>

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi terhadap Kerusakan Lingkungan, <<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-kerusakan-lingkungan>>

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan, <<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>>

Bappenas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanpa Kemiskinan <<http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/>> dan

UN, Sustainable Development Goals, <<http://www.un.or.id/what-we-do/sustainable-development-goals-sdgs/19-sdg/90-goal-1-no-poverty>>

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Blacks's Law Dictionary 7th ed, West Group, St Paul MN, 1999.

2 TANPA KELAPARAN



**“MENGHILANGKAN KELAPARAN,
MENCAPAI KETAHANAN PANGAN
DAN GIZI YANG BAIK, SERTA
MENINGKATKAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN”**

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT TANPA KELAPARAN

A. GAMBARAN UMUM TUJUAN TANPA KELAPARAN¹¹

Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia. Sebagian penduduk dunia sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Jutaan anak-anak berusia di bawah lima tahun (balita) menderita kekurangan gizi kronis atau akut pada saat musim kekurangan pangan, musim kelaparan dan kerusakan sosial, angka ini terus meningkat.

Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan riil dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan.

Untuk mewujudkan tanpa kelaparan tujuan yang perlu dicapai adalah menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen

¹¹ Lihat Tanpa Kelaparan, <http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kelaparan/>, Lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html>.

makanan skala kecil; Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan; Meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata; Meningkatkan investasi, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian dan mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim

B. POTRET INDONESIA DALAM MENGATASI KELAPARAN

Permasalahan kelaparan erat dengan ketahanan pangan. Pengalihfungsian sumber pangan pokok (jagung, tebu, gandum) berdampak pada krisis pangan dunia. Akibat yang ditimbulkan adalah peningkatan harga pangan dan arus ekspor impor pangan dalam jumlah besar.¹²



Sumber: Ketahanan Pangan Nasional, <http://hmjiespundip.blogspot.com/2016/08/ketahanan-pangan-nasional.html>

¹² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjVrarGstfeAhUKL48KHbAAYIQFjAGegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjdih.ristekdikti.go.id%2Fv0%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Frencana-kebijakan%2F127884053403.pdf&usg=AOvVaw2ISGrbZl6kml658Dqji9uz>, [10/11/2018].

Ketersediaan pangan sangat erat hubungannya dengan kinerja nyata pemerintah dalam memproduksi berbagai komoditas pangan utama, yaitu melalui Program Upsus Pajale. Sepanjang tahun 2015 pemerintah mampu menaikkan produksi tiga pangan utama tersebut. Dilansir dari data BPS ASEM 2015 produksi Padi naik 6,37 %, produksi jagung naik 3,17% dan produksi kedelai naik 0,85%.¹³



Sumber : kemtan.go.id

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA KETAHANAN PANGAN

Berbagai perilaku koruptif dapat menimbulkan terhambatnya ketahanan pangan. Potensi korupsi sektor ketahanan pangan antara lain terkait kredit usaha rakyat (KUR), subsidi benih, pupuk bersubsidi, asuransi pertanian dan pengadaan komoditas pangan strategis.¹⁴

¹³ Kerja Nyata Menuju Swasembada, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8241/kerja-nyata-menuju-swasembada/0/kerja_nyata, [10/11/2018].

¹⁴ Abraham Samad Cegah Korupsi di Sektor Ketahanan Pangan, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/31/p6g97y280-abraham-samad-cegah-korupsi-di-sektor-ketahanan-pangan>, [10/11/2018].



Sumber: actual.com



sumber: tirtoid



Sumber: kitabisa.com

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa perilaku koruptif sangat rawan terjadi di sektor pangan yang berdampak pada tidak tersedianya pangan yang cukup bagi masyarakat. Tidak tersedianya ketahanan pangan menimbulkan kelaparan, gizi buruk serta harga pangan yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi untuk dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan.

Nilai-nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan Indonesia tanpa kelaparan antara lain:

1. Kejujuran, tidak menggunakan bahan-bahan pertanian bersubsidi yang ditujukan kepada petani yang kekurangan.
2. Kepedulian, misalnya dengan berbagi makanan dengan yang membutuhkan
3. Kemandirian, misalnya bercocok tanam di pekarangan rumah
4. Kedisiplinan, misalnya membeli bahan pangan secukupnya tidak berlebihan.
5. Tanggungjawab, misalnya tidak membuang-buang makanan.
6. Kesederhanaan, misalnya mengurangi pembelian makanan-makanan impor

D. LATIHAN

1. Di dalam kelompok, mahasiswa mendiskusikan aksi/gerakan mewujudkan SDG #2 dengan melihat pada perspektif masing-masing bidang ilmu dari masing-masing anggota kelompok.
2. Kelompok merancang *project* berupa gerakan/aksi dengan tema “menghilangkan kelaparan”.
3. *Project* yang disusun dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut:
 - KEJUJURAN

- KEPEDULIAN
 - KEMANDIRIAN
 - KEDISIPLINAN
 - TANGGUNG JAWAB
 - KESEDERHANAAN
4. Kelompok menuangkan *project* nya dapat dalam bentuk drama/*role play*, lagu, *jingle*, *mixed media* dll yang akan dipresentasikan di depan kelas.

E. SUMBER

Tanpa Kelaparan, <http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kelaparan/>,

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html>.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjVrarGstfeAhUKL48KHbAAYIQFjAGegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjih.ristekdikti.go.id%2Fv0%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Frencana-kebijakan%2F127884053403.pdf&usg=AOvVaw2ISGrbZl6kml658Dqjl9uz>, [10/11/2018].

Kerja Nyata Menuju Swasembada, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8241/kerja-nyata-menuju-swasembada/0/kerja_nyata, [10/11/2018].

Abraham Samad Cegah Korupsi di Sektor Ketahanan Pangan, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/31/p6g97y280-abraham-samad-cegah-korupsi-di-sektor-ketahanan-pangan>, [10/11/2018].

Ketahanan Pangan Nasional, <http://hmjiespundip.blogspot.com/2016/08/ketahanan-pangan-nasional.html>.

actual.com.

kemtan.go.id.

kitabisa.com.

tirto.id.

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



“MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

A. GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA¹⁵

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan hal utama bagi seluruh orang di dunia ini. Salah satu capaian secara universal adalah menyediakan akses untuk mendapatkan obat-obatan, vaksin yang aman dan terjangkau untuk seluruh kalangan. Pengembangan melalui penelitian vaksin dan obat-obatan menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang capaian tersebut.

Berdasarkan fakta yang tercatat sampai dengan saat ini bahwa sejak tahun 2000 sebanyak 15,6 juta penduduk terselamatkan dari adanya vaksin campak. Lebih dari 6,2 juta kematian akibat malaria dapat dihindari sejak tahun 2000-2015, terutama bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun di Sahara Afrika. Angka kematian ibu telah menurun hampir 50 persen sejak tahun 1990 di Asia Timur, Afrika Utara dan Asia Selatan. Sekitar 2,1 juta orang terinfeksi HIV pada tahun 2013, turun sebanyak 38 persen dari tahun 2001.¹⁶

Meskipun sudah mencapai kemajuan yang sangat luar biasa, setiap tahun di seluruh dunia ada lebih dari 6 juta anak meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dalam kondisi lahir di dalam keluarga miskin atau sekitar 16.000 anak meninggal setiap hari karena penyakit yang dapat dicegah seperti campak dan tuberkulosis. Setiap hari ratusan wanita meninggal selama kehamilan atau dari komplikasi terkait kelahiran anak. Hanya sekitar 56 persen di daerah pedesaan yang di hadiri oleh bidan atau dokter untuk membantu proses melahirkan.

Dalam pelaksanaan tujuan dari SDG #3 ini terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya: menurunkan rasio angka kematian ibu dan juga kematian bayi baru lahir;

¹⁵ <http://sdgs.bappenas.go.id/kehidupan-sehat-dan-sejahtera/>, (17/11/2018)

¹⁶ <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html>, (17/11/2018)

menurunkan penyakit seperti: AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya; meningkatkan pencegahan kematian akibat penyakit tidak menular dengan melalui pencegahan secara diri; meningkatkan jaminan atas pelayanan kesehatan terhadap berbagai masalah kesehatan secara universal dan juga jaminan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman dan juga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. KEADAAN KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA DI INDONESIA

Permasalahan di sektor kesehatan dan kesejahteraan yang belum tuntas ditangani antara lain mengenai: 1) upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), 2) pengendalian penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis, Malaria serta 3) peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB). Selain itu terdapat juga hal-hal baru yang menjadi perhatian penting lainnya diantaranya: 1) Kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), 2) Penyalahgunaan narkotika dan alkohol, 3) Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, 4) Universal Health Coverage, 5) Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah, serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan. Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).¹⁷ Secara ekonomi, Indonesia memang masuk dalam 16 terbesar di dunia karena Indonesia memang kaya dan memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia. Namun dilihat dari pendapatan per kapita yang setiap tahun tumbuh 5,6 persen tetapi tidak seluruh orang Indonesia menikmati hal tersebut karena masih saja ada kemiskinan, kelaparan dan masalah sosial lainnya. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat ini bukan karena masih tingginya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tapi juga kurangnya keberanian dalam melakukan inovasi dan juga uji coba.¹⁸

¹⁷ BPS, Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> (17/11/2018)

¹⁸ Bawono Yadika, Rizal Ramli: Pendapatan per Kapita RI Jauh Tertinggal dari Negara Lain,

STATUS GIZI DI INDONESIA



40+ 30-39 20-29 <20

STUNTING (PENDEK) :
Terjadi pada hampir seluruh wilayah



Permasalahan kekurangan gizi, terutama **pendek (*stunting*)**, terjadi secara luas tetapi dengan **disparitas yang tinggi**

WASTING (KURUS)

Sebanyak **12,1%** Balita tergolong Kurus



Riskesdas 2013

BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)

Disparitas	Prevalensi
Tertinggi	Sulteng : 16,9%
Terendah	Sumut : 7,2%
Nasional	10,2%

ANEMIA PADA IBU HAMIL

Sebanyak **37,1%**

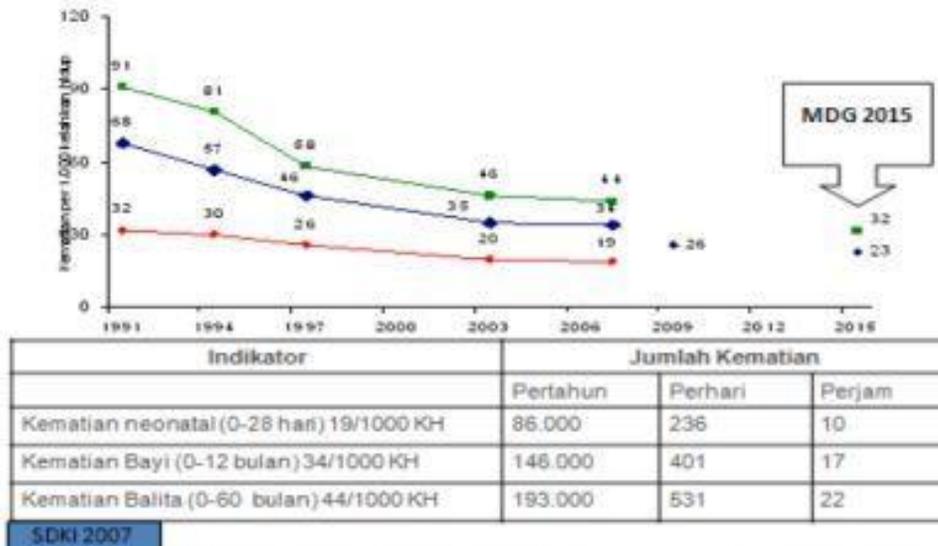
Ibu hamil di Indonesia mengalami **anemia**



18

Sumber: www.bappenas.go.id

ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI dan BALITA



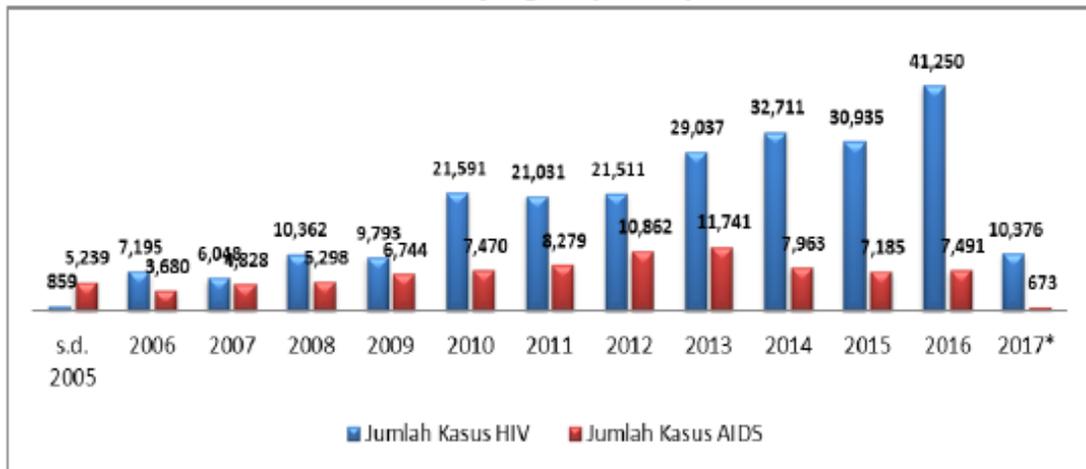
SDKI 2007
 Grafik Kondisi, AKN, AKB dan AKBAL sejak 1991 s/d 2007 dan harapan pencapaian pada tahun 2014.
 Keterangan: Garis merah=AKN, garis biru=AKB, garis hijau=AKBAL

Sumber: www.id.theasianparent.com



Sumber: www.metrotvnews.com

Grafik1. Jumlah HIV dan AIDS yang Dilaporkan per Tahun sd Maret 2017



*Jumlah AIDS yang dilaporkan mengalami perubahan karena adanya validasi data bersama Dinkes Provinsi pada Juli 2016

Sumber: www.kemkes.go.id

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGHAMBAT JAMINAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Lebih baik mencegah (promotif dan preventif) daripada mengobati (kuratif dan rehabilitatif). Perlu diinvestigasi lebih dalam, apakah masalah ini -anggaran kuratif lebih besar dibanding promotif dan preventif- sengaja dibiarkan terjadi sehingga anggaran kesehatan selalu diprioritaskan untuk kuratif dibanding promotif dan preventif sehingga rawan dikorupsi. 122 kasus korupsi kesehatan, sebagian besar (93 persen) di antaranya merupakan kasus yang melibatkan pengelolaan dana program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan (alkes), obat, pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas, jaminan kesehatan, pembangunan laboratorium dan lain sebagainya. Kasus korupsi kesehatan yang ditindak penegak hukum, sebagian besar di antaranya merupakan dilakukan dengan modus "*mark up*" (penggelembungan harga barang dan jasa). Hal ini bisa dimaklumi karena kasus yang ditindak umumnya adalah kasus korupsi pengadaan alkes, obat dan pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas.¹⁹ Kecurangan dalam layanan kesehatan terjadi karena: (1) tenaga medis bergaji rendah, (2) adanya ketidakseimbangan antara sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan, (3) penyedia layanan tidak memberi insentif yang memadai, (4) kekurangan pasokan peralatan medis, (5) inefisiensi dalam sistem, (6) kurangnya transparansi dalam fasilitas kesehatan, dan (7) faktor budaya.²⁰

¹⁹Korupsi di Sektor Kesehatan Mencapai Rp 594 Miliar, <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/170-korupsi-di-sektor-kesehatan-mencapai-rp-594-miliar>, (17/11/2018)

²⁰Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi Dan Sistem Pengendalian Fraud, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/korupsi-dalam-pelayanan-kesehatan-di-era-jaminan-kesehatan-nasional-kajian-besarnya-potensi-dan-sistem-pengendalian-fraud>, (17/11/2018)

Dengan melihat situasi diatas diharapkan mahasiswa dapat merubah perilakunya melalui nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki dalam mewujudkan dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat diantaranya dengan nilai:

1. Tanggungjawab, bentuk dari nilai tanggungjawab ini dengan ikut menjaga lingkungan yang sehat karena kesehatan dan kesejahteraan erat kaitannya dengan lingkungan yang sehat.
2. Kepedulian, bentuk dari nilai kepedulian ini dengan mendukung gerakan pemerintah dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan nasional seperti vaksinasi secara gratis dan program pemerintah lainnya.

D. LATIHAN

1. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok untuk menggagas gerakan yang dapat dilakukan untuk membantu terwujudnya kehidupan sehat dan sejahtera di lingkungan mereka.
2. Tema yang akan gerakan yang akan digagas oleh mahasiswa adalah *"THING GLOBALLY ACT LOCALLY"*.
3. Gagasan gerakan tersebut dituangkan dalam bentuk poster.
4. Setelah selesai membentuk poster tersebut sesuai dengan tema mahasiswa mempresentasikannya di depan kelas di depan kelompok lainnya.

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/kehidupan-sehat-dan-sejahtera/>, (17/11/2018)

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html>, (17/11/2018)

BPS, Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> (17/11/2018)

Bawono Yadika, Rizal Ramli: Pendapatan per Kapita RI Jauh Tertinggal dari Negara Lain, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3311340/rizal-ramli-pendapatan-per-kapita-ri-jauh-tertinggal-dari-negara-lain>, (17/11/2018)

Korupsi di Sektor Kesehatan Mencapai Rp 594 Miliar, <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/170-korupsi-di-sektor-kesehatan-mencapai-rp-594-miliar>, (17/11/2018)

Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi Dan Sistem Pengendalian Fraud, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/korupsi-dalam-pelayanan-kesehatan-di-era-jaminan-kesehatan-nasional-kajian-besarnya-potensi-dan-sistem-pengendalian-fraud>, (17/11/2018)

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



“MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

A. GAMBARAN UMUM TUJUAN PENDIDIKAN BERKUALITAS²¹

Pendidikan merupakan hak mendasar dalam kehidupan manusia dimana pada dasarnya manusia tidak terlepas dari pendidikan dalam melaksanakan kehidupannya. Oleh karenanya dalam suatu pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan salah satu hal yang penting guna menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sejak tahun 2000, telah ada perkembangan yang besar dalam mencapai target pendidikan dasar secara universal yakni sebesar 91% untuk didaerah berkembang pada tahun 2015 dan terjadi pula penurunan jumlah anak putus sekolah menjadi hampir setengahnya. Selain itu telah terjadi peningkatan dramatis pada tingkat literasi dan makin banyaknya anak perempuan yang dapat bersekolah dibandingkan sebelumnya.

Selanjutnya, walaupun dikatakan saat ini telah terjadi peningkatan literasi, akan tetapi masih terdapat 103 juta kaum muda, dimana lebih dari 60% merupakan wanita, yang tidak mempunyai kemampuan dasar dari literasi. Selain itu di negara berkembang, 1 dari 4 anak perempuan tidak dapat bersekolah dan secara umum terdapat 6 dari 10 anak dan remaja yang tidak memiliki kemampuan membaca dan matematika.

Dalam SDG #4 ini, tujuan yang hendak dicapai adalah menegaskan kembali bahwa pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua merupakan salah satu alat yang paling kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, tujuan lainnya adalah pentingnya bagi semua anak perempuan dan anak laki-laki untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya tanpa biaya pada tahun 2030, menyediakan akses yang sama bagi pendidikan

²¹ Lihat [http://sdgs.bappenas.go.id/pendidikan-berkualitas/\[14/11/2018\]](http://sdgs.bappenas.go.id/pendidikan-berkualitas/[14/11/2018]). Lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html>, [14/11/2018].

kejuruan yang terjangkau, menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender dan kekayaan serta mencapai tujuan akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas secara universal.

B. KONDISI PENDIDIKAN INDONESIA SAAT INI

Saat ini berdasarkan laporan tahunan UNESCO *Education for All Global Monitoring Report 2012*, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua (Education for All Development Index, EDI), pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara.²²

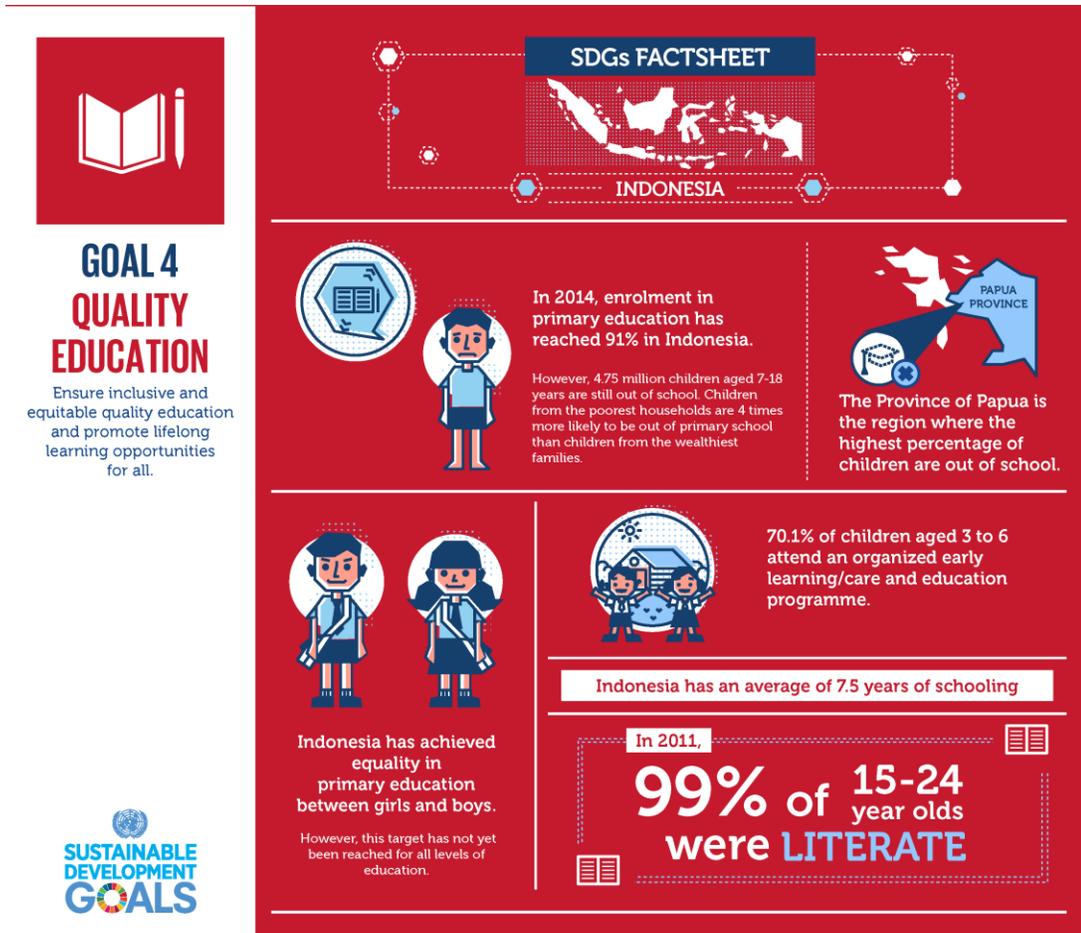
Lebih lanjut berdasarkan laporan program pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,684.²³ Nilai ini menempatkan Indonesia di peringkat 113 dari 188 negara dengan kategori pembangunan manusia tingkat menengah.²⁴

Terkait gambaran mengenai kondisi pendidikan di Indonesia, lebih lanjut akan dijelaskan dalam gambar *SDGs Factsheet Indonesia Goal 4 Quality Education* dibawah ini.

²² <http://sdgs.bappenas.go.id/pendidikan-berkualitas/> [14/11/2018]

²³ <http://sdgs.bappenas.go.id/pendidikan-berkualitas/> [14/11/2018]

²⁴ Laporan Pembangunan Manusia/Human Development Report 2016-Ringkasan Indonesia, <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-HDR2016%20indonesia%20summary-final.pdf> [20/11/2018]

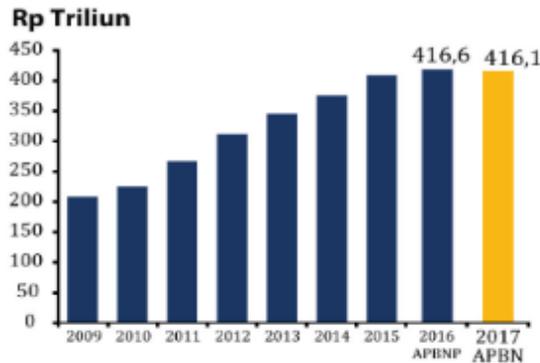


Sumber : <http://www.un.or.id/component/content/article/19-sdg/94-goal-4-quality-education?Itemid=437>

Terkait kualitas pendidikan di Indonesia, *World Bank* menyatakan bahwa walaupun akses pendidikan untuk masyarakat telah meningkat, akan tetapi kualitas pendidikan masih rendah.²⁵ Hal ini diakui Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa kualitas pendidikan masih menjadi tantangan walaupun anggaran untuk pendidikan telah mencapai 20% dari total APBN 2018.²⁶ Bahkan 20% untuk anggaran pendidikan ini tetap diberikan oleh pemerintah dari tahun 2015 sebagaimana yang digambarkan dalam grafik berikut dibawah ini.

²⁵ Yuli Yanna Fauzie, Bank Dunia : Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180607113429-284-304214/bank-dunia-kualitas-pendidikan-indonesia-masih-rendah> [20/11/2018]

²⁶ Ibid.



Anggaran Pendidikan 2017 tetap dijaga **20%** dari APBN, dengan fokus **meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.**

www.kemenkeu.go.id/APBN2017 #APBN2017

Anggaran Pendidikan 2009 hingga 2017,
Sumber : Kemenkeu

C. RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN YANG DISEBABKAN OLEH PERILAKU KORUPTIF

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembangunan, dan hal ini disadari oleh pemerintah Indonesia. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selain itu, dari tahun anggaran 2015, anggaran terhadap pendidikan selalu diberikan sebesar 20% dari APBN.

Akan tetapi kualitas pendidikan Indonesia masih dikatakan rendah. Hal ini dapat tercermin dari peringkat Indonesia yang masih berada diperingkat lebih tinggi dari negara-negara tetangga, contohnya untuk kasus buta huruf dimana di Indonesia masih ada 55% anak usia 15 tahun secara fungsional buta huruf sedangkan di Vietnam hanya kurang dari 10%.²⁷

Terkait rendahnya kualitas pendidikan Indonesia ini dapat disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Kurangnya sumber daya pendidik yang profesional;
2. Kurang ataupun tidak layaknya sarana dan prasarana untuk pendidikan seperti gedung sekolah dll;

²⁷ Ibid.

3. Korupsi dan perilaku koruptif di bidang pendidikan.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab bersama pemangku kepentingan terkait seperti peserta didik, pendidik, tim manajemen sekolah dan masyarakat. Maka guna mencapai pendidikan berkualitas di Indonesia, semua pihak harus menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi sebagai berikut :

1. Kejujuran. Bentuk nilai ini misalnya adalah dalam menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ataupun dalam pengadaan infrastruktur sekolah, pihak sekolah tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat temuan KPK yang menyatakan bahwa bidang pendidikan menjadi bidang yang paling banyak ditemukan tindak pidana korupsi.²⁸ Demikian pula hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch* mengatakan bahwa korupsi dari tahun 2006 sampai dengan 2015 telah mencapai Rp 1,3 triliun dimana modus yang paling sering ditemukan adalah penggelapan.²⁹
2. Kepedulian. Misalnya bentuk dari nilai ini adalah kepedulian para pemangku kebijakan terkait dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia baik dari level pembuat kebijakan hingga praktisi dibidang pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, juga peserta didik dan orang tuanya, pemerhati pendidikan dan masyarakat luas.
3. Kemandirian. Bentuk kemandirian dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia antara lain adalah dengan memikirkan ide kreatif terkait peningkatan kualitas pendidikan, misalnya dengan membuat teknik dan cara pembelajaran yang baru yang dapat dimengerti oleh peserta didik.
4. Kedisiplinan. Bentuk dari nilai kedisiplinan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, antara lain adalah kedisiplinan para pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, contohnya pendidik yang dengan disiplin mengajar dan mengembangkan keilmuannya.
5. Tanggung jawab. Bentuk dari nilai tanggung jawab ini misalnya adalah bagi pendidik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam pengembangan keilmuannya agar dapat diterapkan dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
6. Kerja keras. Bentuk dari nilai tanggung jawab ini harus dimiliki oleh semua pemangku kepentingan terkait agar dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

²⁸ Marlinda Oktavia Erwanti, KPK Temukan Korupsi Paling Banyak di Sektor Pendidikan, <https://news.detik.com/berita/d-3923898/kpk-temukan-korupsi-paling-banyak-di-sektor-pendidikan>, [20/11/2018]

²⁹ Widyanita, Tidak Ada Dana Pendidikan yang Lolos dari Tindak Korupsi, <https://katadata.co.id/infografik/2016/05/23/korupsi-sektor-pendidikan-rugikan-negara-rp-13-triliun>, [20/11/2018]

7. Kesederhanaan. Dengan menerapkan gaya hidup sederhana, anggaran pendidikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
8. Keberanian. Bentuk nilai keberanian ini contohnya adalah berani dalam melaksanakan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
9. Keadilan. Bentuk nilai ini misalnya adalah memberikan akses terhadap pendidikan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan, contohnya adalah dengan adanya KIP (Kartu Indonesia Pintar), setiap siswa mendapatkan akses untuk menikmati jenjang pendidikan bukan hanya siswa yang berasal dari keluarga mampu saja.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa anggaran pendidikan dari tahun 2015 hingga 2018 telah ditetapkan 20% dari APBN, akan tetapi anggaran yang besar tersebut yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, oleh sebagian oknum malah disalahgunakan. Dibawah ini terdapat beberapa gambar mengenai kasus bangunan sekolah yang roboh akibat korupsi dibidang pengadaan dan pembangunan sekolah serta tidak layakny sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada.



Korupsi Proyek Pembangunan Sekolah

Sumber: news.detik.com



Sekolah TK di Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi roboh.
Sumber : beritajatim.com



Kekurangan fasilitas dan infrastruktur sekolah di Papua, satu meja dipakai buat berlima.

Sumber : wowtribunnews.com

D. LATIHAN

1. Mahasiswa dibagi dalam kelompok peran sebagai berikut:
 - Pemerintah
 - Pemuka Agama
 - Pimpinan Perguruan Tinggi
 - Dosen
 - Mahasiswa
 - Orang Tua
 - Aktivis
2. Diskusikan dalam kelompok mengenai strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia termasuk pula kemungkinan hambatan-hambatannya serta cara mengatasinya.
3. Strategi yang dibuat oleh kelompok peran tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi, yaitu KEJUJURAN, KEPEDULIAN, KEMANDIRIAN, KEDISIPLINAN, TANGGUNG JAWAB, KERJA KERAS, KESEDERHANAAN, KEBERANIAN DAN KEADILAN.
4. Setelah diskusi dalam kelompok, masing-masing anggota kelompok membentuk kelompok baru yang di dalamnya terdiri dari perwakilan peran.

5. Di dalam kelompok baru, masing-masing perwakilan peran mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

E. SUMBER

Goal 4 : Quality education, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html>, [14/11/2018].

Fact and Figures, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html>, , [14/11/2018].

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>.

<http://sdgs.bappenas.go.id/pendidikan-berkualitas/>[14/11/2018].

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html> [14/11/2018].

<http://www.un.or.id/component/content/article/19-sdg/94-goal-4-quality-education?Itemid=437>.

Laporan Pembangunan Manusia/Human Development Report 2016-Ringkasan Indonesia, <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-HDR2016%20indonesia%20summary-final.pdf> [20/11/2018].

Marlinda Oktavia Erwanti, *KPK Temukan Korupsi Paling Banyak di Sektor Pendidikan*, <https://news.detik.com/berita/d-3923898/kpk-temukan-korupsi-paling-banyak-di-sektor-pendidikan>, [20/11/2018].

Muhajir Arifin, *Kejari Tahan Kasek SMP 11 dan Dua Rekanan Proyek Pembangunan Gedung Ambruk*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3259559/kejari-tahan-kasek-smp-11-dan-dua-rekanan-proyek-pembangunan-gedung-ambruk>, [14/11/2018].

Pramita Kusumaningrum, *Gedung Sekolah Roboh, Polisi Temukan Kesalahan Pembangunan*, <http://www.beritajatim.com/peristiwa/289092/gedung-sekolah-roboh-polisi-temukan-kesalahan-pembangunan.html>, [14/11/2018].

Saking Mirisnya Potret Pendidikan di Tanah Papua, Netizen Sampai Mention Jokowi dan Kemendikbud RI, <http://wow.tribunnews.com/2017/03/16/satu-meja-buat-berlima-miris-beginilah-potret-pendidikan-di-tanah-papua>, [14/11/2018].

Widyanita, *Tidak Ada Dana Pendidikan yang Lolos dari Tindak Korupsi*, <https://katadata.co.id/infografik/2016/05/23/korupsi-sektor-pendidikan-rugikan-negara-rp-13-triliun>, [20/11/2018].

Yuli Yanna Fauzie, *Bank Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180607113429-284-304214/bank-dunia-kualitas-pendidikan-indonesia-masih-rendah> [20/11/2018].

5 KESETARAAN GENDER



**“MENCAPAI KESETARAAN
GENDER DAN
MEMBERDAYAKAN KAUM
PEREMPUAN”**

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER

A. GAMBARAN UMUM KESETARAAN GENDER³⁰

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kata gender itu sendiri dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam melalui proses sosialisasi yang berhubungan dengan kelamin perempuan dan laki-laki. Pengertian gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan anak perempuan bukan hanya merupakan hak asasi manusia tetapi juga merupakan hal yang penting dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah terbukti selama ini bahwa pemberdayaan wanita dan anak perempuan selain mempunyai berbagai efek/dampak juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Di Asia Tenggara, pada tahun 1990, hanya 74 anak perempuan dari 100 anak laki-laki yang mendapatkan pendidikan dasar. Akan tetapi pada tahun 2012, rasio nya menjadi setara antara anak perempuan dengan anak laki-laki dan hal ini terjadi di 2/3 negara berkembang lainnya. Akan tetapi, di daerah bagian Gurun Sahara Afrika, Oceania dan Asia Barat, anak perempuan masih mendapat kesulitan untuk masuk ke sekolah dasar ataupun sekolah menengah.

Lebih lanjut, terkait pekerjaan, wanita di Afrika Utara mendapatkan kurang dari satu pekerjaan yang dibayar pada sektor non agrikultural. Adapun bila berbicara proporsi wanita

³⁰ Lihat <http://sdgs.bappenas.go.id/kesetaraan-gender/>, [14/11/2018]. Lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html>, [14/11/2018].

yang dibayar untuk bekerja diluar sektor agrikultural, terjadi peningkatan dari sebelumnya hanya 35% pada tahun 1990 menjadi 41 % pada tahun 2015.

SDG #5 mengenai Kesetaraan Gender memiliki tujuan untuk mencapai dan memastikan diakhirinya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun. Hal yang penting dalam mencapai tujuan ini antara lain adalah dengan memastikan wanita memiliki hak yang sama dalam sumber daya ekonomi seperti tanah ataupun properti. Selain itu, hal penting lainnya adalah dengan menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut.

B. IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Gambaran kesetaraan gender di Indonesia, dapat terlihat dalam *SDGs Factsheet Indonesia Goal 5 Gender Equality* dibawah ini.



GOAL 5 GENDER EQUALITY

Achieve gender equality
and empower all women
and girls.



Sumber : <http://www.un.or.id/component/content/article/19-sdg/95-goal-5-gender-equality?Itemid=437>

Berdasarkan *SDGs Factsheet Goal 5 Gender Equality* diatas, di Indonesia, dapat dilihat gambaran implementasi dari kesetaraan gender di Indonesia, dimana, 1 dari 6 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun sehingga mereka mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi yang buruk dalam hidup mereka. Dalam perencanaan dalam keluarga, hanya 2,7% dari laki-laki yang berpartisipasi dalam merencanakan keluarga sehingga hal ini menyebabkan wanita diberi beban lebih dalam perencanaan keluarga yang menyebabkan makin terpuruknya kesehatan dan kemampuannya.

Lebih lanjut pada tahun 2015, terdapat 365 produk hukum yang mendiskriminasi wanita. Selain itu, di tahun 2015 juga terdapat 321.752 laporan terkait kekerasan terhadap wanita. Dalam pekerjaan dibidang agrikultural, di Indonesia hanya 35% wanita yang dibayar pada saat melaksanakan pekerjaan dibidang agrikultural dikarenakan mereka dianggap memang sudah seharusnya mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga tidak perlu dibayar.

Memperhatikan fakta tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia masih memerlukan perhatian khusus dalam upaya kesetaraan gender ini. Hal ini perlu diperhatikan dan dilaksanakan dikarenakan kesetaraan gender ini akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif sehingga dengan mempromosikan kesetaraan gender merupakan bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat baik perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.³¹ Sehingga kesetaraan gender ini juga telah masuk kedalam agenda yang harus dilaksanakan dalam RPJM 2015-2019 dan RPJN 2005-2025.

C. PERILAKU KORUPTIF DAN KESETARAAN GENDER

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam SDG #4, nilai IPM Indonesia untuk 2015 adalah 0,684. Hal ini meningkat bila sebelumnya pada tahun 1990, IPM Indonesia sebesar 0,528 sehingga dapat diartikan bahwa nilai IPM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 30,5%. Akan tetapi, bila faktor kesenjangan diperhitungkan, nilai tersebut menurun ke angka 0,563 atau turun 18,2%.³²

Dalam Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*), terdapat kesenjangan pembangunan gender dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan (diukur dari perbandingan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan), pendidikan (diukur dari perbandingan harapan lama bersekolah dan rata-rata lama bersekolah antara laki-laki dan perempuan) dan perbandingan sumber daya ekonomi laki-laki dan perempuan (diukur dari Pendapatan Nasional Bruto).³³

Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kesetaraan gender merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari dimasukkannya kesetaraan gender dalam salah satu visi pembangunan nasional yang ingin dicapai untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur pada RPJM 2015-2019. Akan tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Gender yang menyatakan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan gender, maka dapat dinilai kesetaraan gender masih belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena :

1. Budaya Patriarki. Pemahaman mengenai budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama masih tertanam dikalangan masyarakat Indonesia sehingga diperlukan keberanian serta kerja keras dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

³¹ <http://sdgs.bappenas.go.id/kesetaraan-gender/> [13/11/2018]

³² Laporan Pembangunan Manusia/Human Development Report 2016-Ringkasan Indonesia.

³³ Ibid

2. Pola Pikir Tradisional yang masih menganggap bahwa wanita harus mengasuh dan mengurus keluarga sehingga hal ini berdampak pada pola asuh terhadap anak perempuan di keluarga.
3. Kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan yang dilakukan bukan hanya oleh orang lain yang tidak dikenal tetapi juga oleh orang yang dikenal baik seperti pacar ataupun keluarga sendiri.
4. Diskriminasi dalam bidang tertentu seperti misalnya bidang pekerjaan tertentu yang lebih mengutamakan menerima laki-laki daripada perempuan.
5. Ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap kesetaraan gender.

Mengingat pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan, maka perlu dilakukan upaya-upaya guna memastikan tercapainya kesetaraan gender disemua bidang dalam pembangunan. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara menginternalisasi dan melaksanakan nilai-nilai anti koruptif, yaitu :

1. Nilai Keberanian.

Dalam kesetaraan gender, diperlukan keberanian dari pihak-pihak terkait dalam upaya kesetaraan gender tersebut.

2. Nilai Kemandirian.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kesetaraan gender masuk kedalam RPJM 2015-2019. Mandiri dalam RPJM 2015-2019 tersebut diartikan Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dengan demikian, nilai kemandirian dalam kesetaraan gender adalah kemampuan dalam menciptakan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam hal ini, bentuk kemandirian yang dapat dilakukan adalah berfikir inovatif dalam menciptakan kesetaraan gender.

3. Nilai Kepedulian

Bentuk nilai kepedulian dalam kesetaraan gender merupakan salah satu yang seharusnya dimiliki oleh semua pihak dalam upaya mencapai kesetaraan gender tersebut. Salah satu bentuk kepedulian dalam kesetaraan gender adalah tersedianya fasilitas ruang laktasi di perusahaan sehingga pegawai perempuan yang sedang menyusui anaknya dapat menyusui ataupun pemerah susu di ruang laktasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif³⁴.

³⁴ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif berisi:
(1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif. (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

4. Nilai Kerja Keras

Dalam mewujudkan kesetaraan gender perlu adanya kerja keras dari semua pihak dalam upaya mewujudkannya. Salah satu contoh yang dapat diambil dari nilai kerja keras dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah perempuan dalam bekerja harus bekerja secara optimal agar dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki di lingkungan pekerjaannya. Linda Agum Gumelar, Mantan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, mengatakan saat ini masih banyak perempuan di Indonesia yang hanya bekerja di sektor domestik padahal mereka sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih besar.³⁵

5. Nilai Keadilan

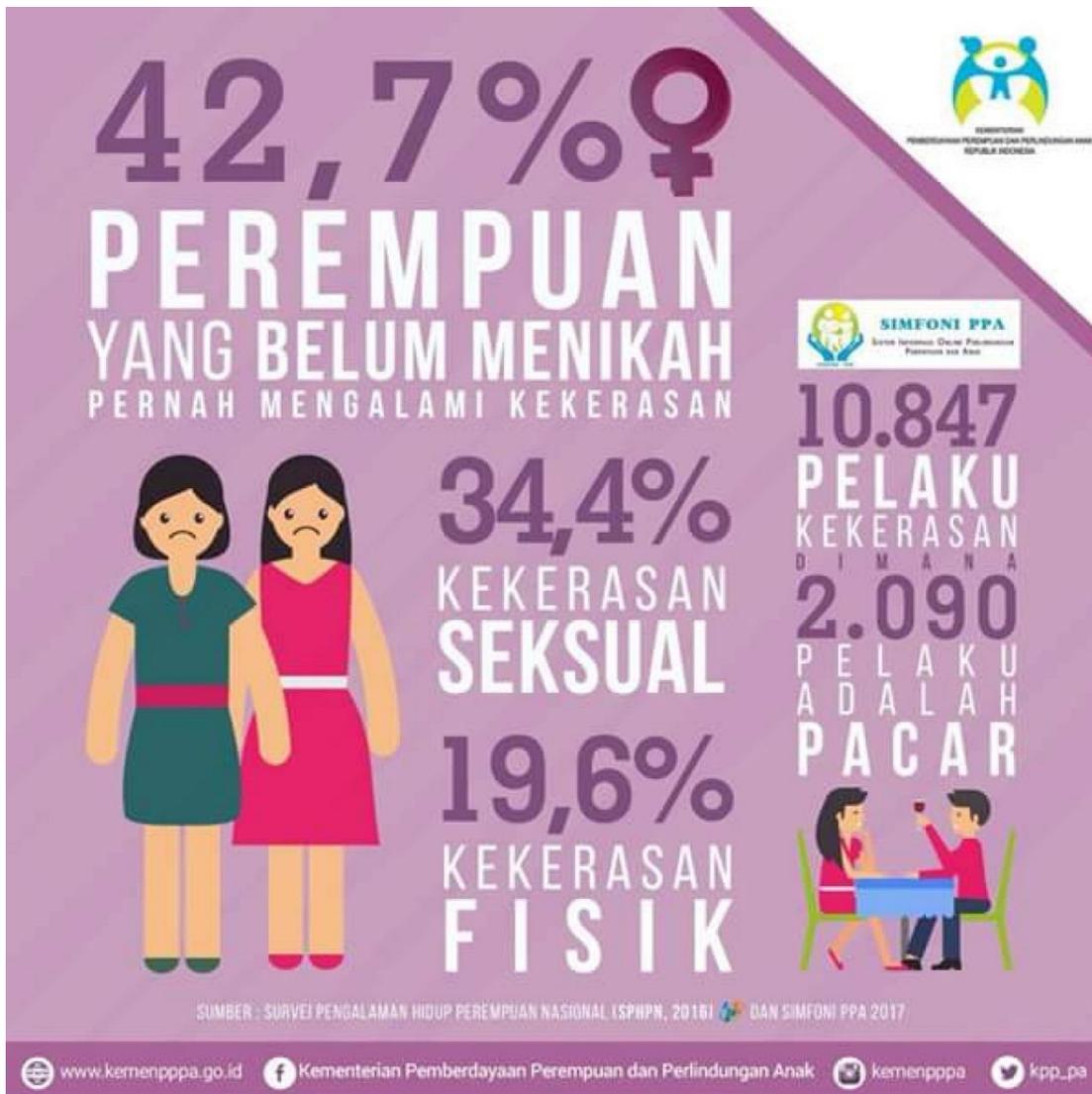
Adil dalam visi pembangunan nasional Indonesia diartikan sebagai tidak adanya pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender ataupun wilayah.

Dibawah ini terdapat beberapa gambaran mengenai permasalahan yang timbul dalam kesetaraan gender serta pernyataan komitmen pemerintah terhadap kesetaraan gender, yaitu :

(3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

³⁵ Ilham Safutra, Hari Perempuan Internasional-Dengan Kerja Keras Wanita Bisa Capai Kesetaraan, <https://www.jawapos.com/kesehatan/womens/08/03/2017/dengan-kerja-keras-wanita-bisa-capai-kesetaraan>, [23/11/2018]



*Waspada Bahaya Kekerasan Dalam Pacaran,
 sumber : kemenpppa*



Tuntutan pemenuhan 50% bagi perempuan di parlemen dan instansi publik.

Sumber : papua.antaranews.com



Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Menjunjung Kesetaraan Gender Serta Mencegah Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja.

Sumber : tribunnews.com



Akses Ekonomi bagi Perempuan yang Minim
Sumber : mediaindonesia.com

D. LATIHAN

1. Dalam 4 kelompok besar, diskusikan kaitan antara nilai anti korupsi berikut dengan upaya mencapai kesetaraan gender:
 - a. Nilai **KEBERANIAN** dalam mewujudkan kesetaraan gender (Kelompok 1).
 - b. Nilai **KERJA KERAS** dalam mewujudkan kesetaraan gender (Kelompok 2).
 - c. Nilai **KEMANDIRIAN** dalam mewujudkan kesetaraan gender (Kelompok 3).
 - d. Nilai **KEPEDULIAN** dalam mewujudkan kesetaraan gender (Kelompok 4).
2. Di dalam kelompok, hal-hal yang harus di diskusikan adalah:
 - a. Bagaimana perwujudan nilai anti korupsi tersebut dalam mencapai kesetaraan gender?
 - b. Hambatan apa yang akan dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut?
 - c. Upaya apa yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender?
 - d. Apakah bentuk nyata yang anda/kelompok anda dapat wujudkan untuk menerapkan nilai anti korupsi tersebut dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender?
3. Setelah diskusi kelompok selesai, masing-masing anggota kelompok membentuk kelompok baru yang terdiri dari 4 orang dan merupakan perwakilan dari masing-masing kelompok nilai-nilai anti korupsi.

4. Di dalam kelompok kecil, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
5. Hasil diskusi kelompok kecil dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang akan di presentasikan di depan kelas.

E. SUMBER

Goal 5: Gender Equality, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html>, [14/11/2018].

Administrator, Akses Ekonomi bagi Perempuan Minim, <http://mediaindonesia.com/read/detail/82906-akses-ekonomi-bagi-perempuan-minim>, [23/11/2018].

<http://sdgs.bappenas.go.id/kesetaraan-gender/>, [14/11/2018].

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality/targets.html> [13/11/2018].

<http://www.un.or.id/component/content/article/19-sdg/95-goal-5-gender-equality?Itemid=437>.

Ilham Safutra, Hari Perempuan Internasional-Dengan Kerja Keras Wanita Bisa Capai Kesetaraan, <https://www.jawapos.com/kesehatan/womens/08/03/2017/dengan-kerja-keras-wanita-bisa-capai-kesetaraan>, [23/11/2018].

Indonesia Tegaskan Komitmen Kesetaraan Gender dan Penghapusan Pelecehan di Tempat Kerja, <http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2018/06/10/indonesia-tegaskan-komitmen-kesetaraan-gender-dan-penghapusan-pelecehan-di-tempat-kerja>, [23/11/2018].

Laporan Pembangunan Manusia/Human Development Report 2016-Ringkasan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.

Tessa Qurrata Aini, *Pemkot Jakarta Pusat Sosialisasikan Pengarusutamaan Gender*, https://papua.antaranews.com/nasional/berita/740787/pemkot-jakarta-pusat-sosialisasikan-pengarusutamaan-gender?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews.
www.kemenpppa.go.id.

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



“MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN SANITASI DAN AIR BERSIH

A. GAMBARAN SANITASI DAN AIR BERSIH³⁶

Kekurangan air yang merupakan salah satu pertanda naiknya suhu udara yang diakibatkan oleh perubahan iklim akan memberi dampak kepada lebih dari 40% manusia di seluruh dunia. Sejak tahun 1990, sebanyak 2,1 milyar orang mendapatkan akses untuk memperbaiki air dan sanitasi dimana yang menjadi masalah utama di hampir semua benua adalah kekurangan pasokan untuk air minum.

Pada tahun 2011 terdapat 41 negara yang kekurangan air dimana terdapat 10 negara yang hampir kehilangan sumber air bersih dan harus mencari alternatif lain guna mendapatkannya. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeringan dan berubahnya tanah menjadi gurun. Diperkirakan pada tahun 2050 setidaknya 1 dari 4 orang akan mengalami kekurangan air.

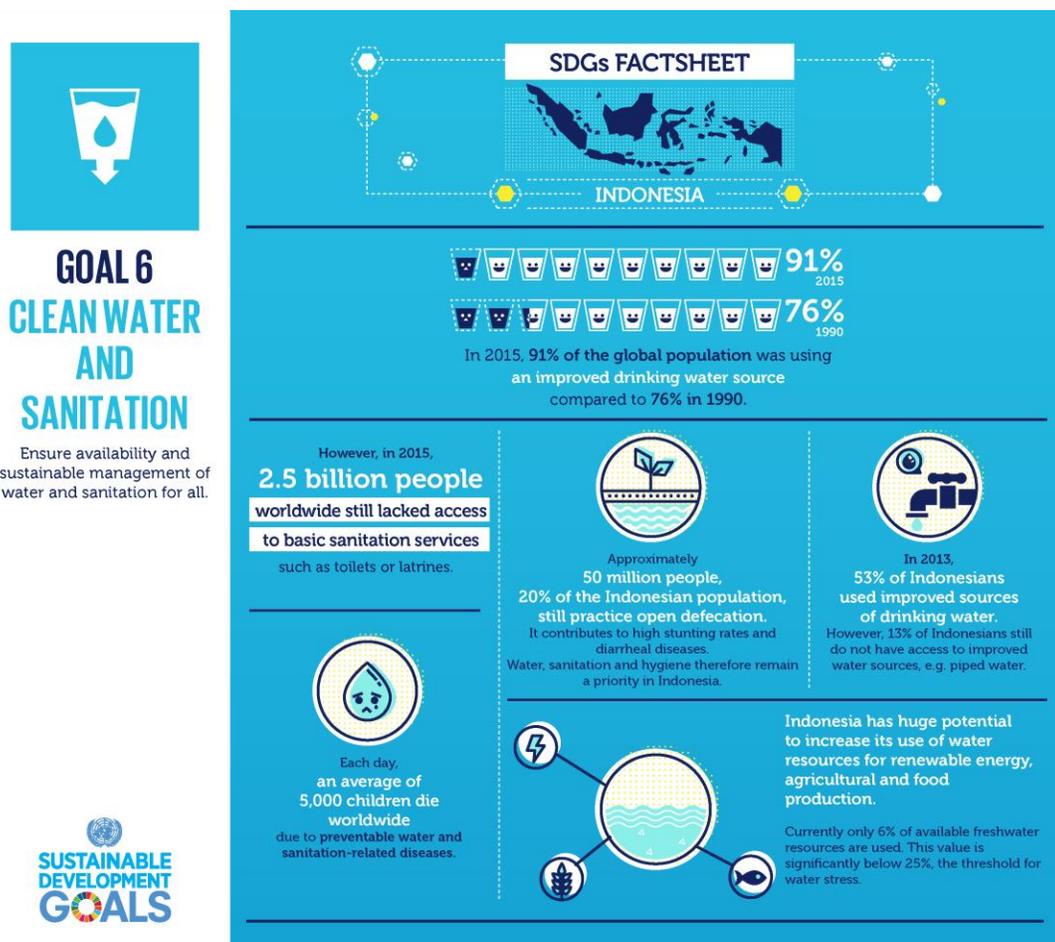
Terkait sanitasi, terdapat 2,4 milyar orang diseluruh dunia yang tidak mendapatkan pelayanan sanitasi yang layak seperti toilet ataupun jamban. Kondisi ini menyebabkan hampir 1000 anak-anak meninggal akibat penyakit yang disebabkan kekurangan air dan sanitasi buruk. Demi mengurangi kondisi-kondisi tersebut, maka dalam SDGs #6 mengenai Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tujuan untuk memastikan secara universal, setiap orang mendapatkan akses terhadap air bersih dan aman pada tahun 2030 dimana dalam mencapainya diperlukan investasi yang cukup terhadap infrastruktur, menyediakan fasilitas sanitasi serta mendorong budaya hidup bersih di masyarakat. Selain itu, perlindungan dan restorasi air terkait ekosistem seperti hutan, gunung, lahan basah dan sungai merupakan hal yang penting. Dalam mendorong efisiensi penggunaan air serta

³⁶ Lihat <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html> [14/11/2018].

dukungan teknologi pada negara berkembang diperlukan juga adanya kerja sama internasional.

B. KONDISI SANITASI DAN AIR BERSIH DI INDONESIA

Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya ketersediaan air bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.³⁷ Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sanitasi dan air bersih di Indonesia dapat dilihat pada gambar *SDGs Factsheet Indonesia Goal Clean Water and Sanitation* dibawah ini.



Sumber : <http://www.un.or.id/component/content/article/19-sdg/96-goal-6-clean-water-and-sanitation?Itemid=437/>

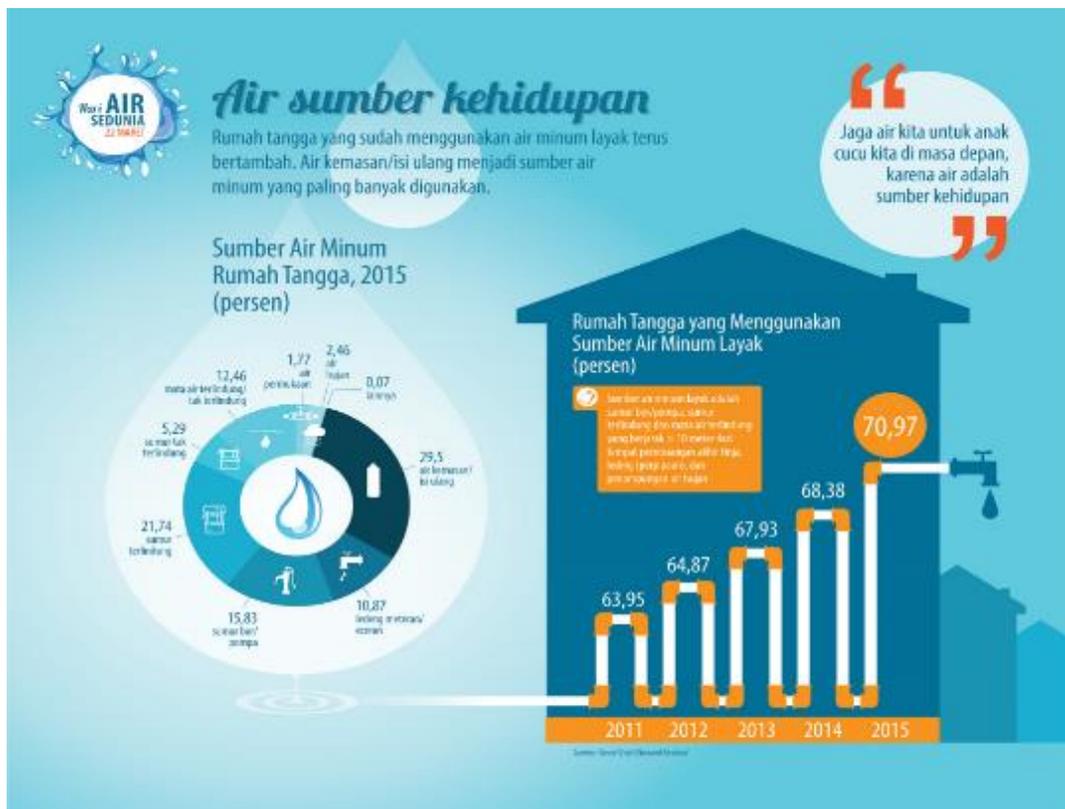
Berdasarkan *SDGs Factsheet Goal Clean Water and Sanitation*, pada tahun 2015, di Indonesia terdapat peningkatan dalam penggunaan sumber air bersih untuk minum,

³⁷ <http://sdgs.bappenas.go.id/air-bersih-dan-sanitasi-layak/> [13/11/2018]

dimana sebelumnya pada tahun 1990 hanya sekitar 76%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 91%. Akan tetapi diperkirakan masih terdapat 2,5 milyar penduduk dunia yang tidak memiliki akses terhadap penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak sehingga setiap hari diperkirakan terdapat kematian 5000 anak diseluruh dunia disebabkan penyakit yang dikarenakan kurangnya air bersih dan sanitasi yang layak.

Terkait penggunaan sanitasi yang layak, di Indonesia masih terdapat sekitar 50 juta orang atau sekitar 20% yang masih buang air besar bukan di toilet ataupun jamban sehingga menyebabkan tingginya angka penularan diare. Oleh karenanya air bersih, sanitasi yang layak dan kebersihan masih merupakan permasalahan utama di Indonesia.

Pada tahun 2013, sekitar 53% penduduk Indonesia telah menggunakan sumber air bersih untuk minum. Akan tetapi masih terdapat 13% penduduk yang tidak dapat menggunakan sumber air bersih untuk minum seperti dari pipa ledeng (PAM). Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini mengenai sumber air bersih untuk minum di Indonesia pada tahun 2015



Disebabkan Indonesia mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup besar, sebenarnya air bekas penggunaan tersebut dapat digunakan kembali sebagai sumber energi terbarukan, pertanian dan produksi makanan. Saat ini Indonesia baru menggunakan 6% dari sumber air

yang dapat digunakan dan hal ini dapat menyebabkan *water stress* dimana tingginya permintaan terhadap air bersih tidak dapat terpenuhi dikarenakan sedikitnya sumber air bersih.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya penyediaan sarana sanitasi dan air minum bersih dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Kementerian Pekerjaan Umum (PU, Djoko Mursito, tantangan dalam penyediaan air minum antara lain seperti tingkat penambahan cakupan pelayanan air minum melalui sistem perpipaan yang belum dapat tercapai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk.³⁸

Selanjutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2016, capaian akses air minum telah mencapai 71,14% dan akses sanitasi 76,37%. Namun belum seluruhnya memberikan akses sanitasi yang layak. Hanya sekitar 67,2% akses sanitasi layak yang tersedia sedangkan 9,17% hanya memberikan akses sanitasi dasar, sedangkan pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan prioritas pembanguana nasional. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemenuhan hak dasar bagi seluruh masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi peningkatan produktivitas bangsa.³⁹

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGHAMBAT KETERSEDIAAN SANITASI DAN AIR BERSIH YANG BERKELANJUTAN

Walaupun telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, ketersediaan sanitasi layak dan air bersih belumlah merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tergambar dalam beberapa gambar dibawah ini.

³⁸ Ayu Rachmaningtyas, Pemerintah Masih Temui Banyak Masalah Sanitasi dan Air Minum, <https://nasional.sindonews.com/read/795917/15/pemerintah-masih-temui-banyak-masalah-sanitasi-dan-air-minum-1382112393>, [23/11/2018]

³⁹ Nirmala Aninda, KSAN 2017 Targetkan Akses Universal Air Minum dan Sanitasi di 2019, <http://industri.bisnis.com/read/20171107/45/706867/ksan-2017-targetkan-akses-universal-air-minum-dan-sanitasi-di-2019>, [23/11/2018]



Kurangnya pasokan air bersih di Indonesia Timur menyebabkan anak-anak harus mengambil air bersih dengan jarak yang cukup jauh.

Sumber : sindonews.com



Kurangnya akses sanitasi layak di Indonesia

Sumber: bisnis.com



Aktivitas warga di pemukiman kumuh kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
sumber : metrotvnews.com



75% Sungai di Indonesia Tercemar
Sumber : intisari.grid.id

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat dapat memiliki akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Terkait hal ini, Bank Dunia pada tahun 2014 telah mengingatkan bahwa terdapat 780 juta orang yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan terdapat lebih dari 2 milyar orang yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sehingga mengakibatkan ribuan nyawa melayang setiap harinya dikarenakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih dan sanitasi yang layak.⁴⁰

Kondisi Indonesia sebagaimana telah tergambarkan diatas tentunya bukanlah kondisi ideal yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi-kondisi tersebut diatas dapat terjadi antara lain disebabkan karena:

1. Kurangnya kesadaran untuk hidup bersih dikalangan masyarakat tertentu.
Tidak bisa dihindari bahwa masalah sanitasi bukanlah masalah pembangunan infrastruktur semata namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan praktek buang air besar (BAB) disembarang tempat.⁴¹
2. Kurangnya kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
Berdasarkan data sistem sanitasi dari BPS per 17 November 2017, disebutkan baru 67% penduduk Indonesia yang mampu mengakses sanitasi sehat.⁴²
3. Kurangnya kepedulian dalam memelihara fasilitas penampungan air bersih dan sanitasi bersih. Di beberapa tempat, masyarakatnya tidak peduli dan tidak mau memelihara fasilitas penampungan air bersih dan sanitasi bersih sehingga dampaknya kerusakan tersebut bukan hanya menimpa masyarakat sekitar tersebut tetapi juga dapat berdampak ke wilayah lain.
4. Tidak melakukan penghematan dalam penggunaan air bersih. Apabila kita mendapatkan akses untuk menggunakan air bersih, hendaknya air bersih tersebut dipakai dan dipergunakan seperlunya agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Akan tetapi masih ada masyarakat tertentu yang tidak melakukan penghematan dikarenakan melimpahnya sumber air bersih yang didapat.
5. Membuang sampah, limbah dan kotoran tidak pada tempatnya.

⁴⁰ <http://sdgs.bappenas.go.id/air-bersih-dan-sanitasi-layak/> [13/11/2018]

⁴¹ Andhika Anggoro Wening, Akses Sanitasi Layak Masih Susah, Ternyata ini Masalahnya, <http://industri.bisnis.com/read/20170526/45/656913/akses-sanitasi-layak-masih-susah-ternyata-ini-masalahnya>

⁴² 24 Juta Keluarga Indonesia tak Punya Sistem Sanitasi Layak, <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/RkjZXLWk-24-juta-keluarga-indonesia-tak-punya-sistem-sanitasi-layak>, [23/11/2018]

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan 75% air sungai di Indonesia sudah tercemar berat khususnya limbah domestik sehingga hal ini harus ditanggapi dan diatasi serius.⁴³

6. Korupsi dibidang pengadaan air bersih dan sanitasi yang layak. Terkait Korupsi di sektor air bersih, Transparansi Internasional Indonesia menyoroiti masalah korupsi di banyak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akibat minimnya kualitas manajemen dan besarnya utang.⁴⁴

Dalam mengurangi ataupun mengantisipasi hal ini, diperlukan internalisasi dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, diantaranya yaitu :

1. Kepedulian. Bentuk kepedulian dalam mewujudkan Sanitasi dan Air Bersih di lingkungan kita antara lain dengan ikut berperan serta dalam menjaga kualitas air bersih dan sanitasi bersih dilingkungan kita.
2. Sikap sederhana, dengan melakukan penghematan dalam penggunaan air bersih, kita bukan saja dapat menggunakan air tersebut secara berkelanjutan, tetapi dapat pula membantu daerah lain yang mungkin mengalami kesulitan air bersih.
3. Tanggung jawab. Bentuk sikap tanggung jawab dalam penggunaan air seperti bertanggungjawab dalam penggunaan air bersih dan selalu membersihkan kembali fasilitas sanitasi setelah digunakan juga dapat mewujudkan sanitasi dan air bersih di lingkungan kita.
4. Disiplin dalam penggunaan air seperti selalu mematikan keran air apabila telah selesai menggunakannya sehingga air bersih dapat dimanfaatkan bersama.

D. LATIHAN

1. Di dalam kelompok yang terdiri dari masing-masing 5 orang, diskusikanlah:
 - a. Bagaimanakah bentuk KEPEDULIAN dalam menanggulangi masalah kualitas air dan sanitasi buruk dilingkungannya?
 - b. Bagaimanakah contoh perilaku SEDERHANA sebagai salah satu upaya melawan sanitasi buruk?
 - c. Bagaimanakah bentuk TANGGUNGJAWAB dalam upaya menanggulangi sanitasi buruk?
 - d. Apakah dengan berperilaku DISIPLIN dapat mewujudkan kualitas air dan sanitasi bersih?

⁴³ Yudha Manggala P Putra, KLHK : 75% Air Sungai Indonesia Tercemar Berat, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-sungai-indonesia-tercemar-berat> [23/11/2018]

⁴⁴ Kunto Wibisono, Korupsi di Sektor Air Bersih Ancam Miliaran Penduduk, Lingkungan, <https://www.antaranews.com/berita/107055/korupsi-di-sektor-air-bersih-ancam-miliaran-penduduk-lingkungan>, [23/11/2018]

2. Sebelum berdiskusi, tunjukkan ketua kelompok serta buatlah aturan main dalam berdiskusi.
 - ✓ Agar semua peserta dapat mengeluarkan pendapatnya, masing-masing anggota kelompok menuliskan nama masing-masing dalam selembar kertas, dan kemudian kertas tersebut digulung dan diserahkan kepada ketua kelompok.
 - ✓ Secara acak, ketua kelompok akan memilih salah satu gulungan.
 - ✓ Ketua kelompok membacakan nama yang ada dalam gulungan yang telah dipilih secara acak.
 - ✓ Anggota kelompok yang namanya disebutkan mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada no. 1.
3. Ketua kelompok merumuskan hasil diskusi yang akan dipresentasikan di depan kelas.

E. SUMBER

Andhika Anggoro Wening, *Akses Sanitasi Layak Masih Susah*, Ternyata ini Masalahnya, <http://industri.bisnis.com/read/20170526/45/656913/akses-sanitasi-layak-masih-susah-ternyata-ini-masalahnya>.

Ayu Rachmaningtyas, *Pemerintah Masih Temui Banyak Masalah Sanitasi dan Air Minum*, <https://nasional.sindonews.com/read/795917/15/pemerintah-masih-temui-banyak-masalah-sanitasi-dan-air-minum-1382112393>, [23/11/2018].

Badan Pusat Statistik Indonesia.

Goal 6: Clean Water and Sanitation, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html>, [23/11/2-18].

<http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html> [14/11/2018].

<http://sdgs.bappenas.go.id/air-bersih-dan-sanitasi-layak/> [13/11/2018].

Indonesia Butuh Air Bersih, <https://nasional.sindonews.com/read/862939/18/indonesia-butuh-air-bersih-1399907826>[14/11/2018].

Kunto Wibisono, *Korupsi di Sektor Air Bersih Ancam Miliaran Penduduk, Lingkungan*, <https://www.antaraneews.com/berita/107055/korupsi-di-sektor-air-bersih-ancam-miliaran-penduduk-lingkungan>, [23/11/2018].

Muhammad Fauzan Aziz, *75% Sungai di Indonesia Tercemar Berat*, <http://intisari.grid.id/read/0332386/75-sungai-di-indonesia-tercemar-berat?page=all>, [23/11/2018].

Nirmala Aninda, *KSAN 2017 Targetkan Akses Universal Air Minum dan Sanitasi di 2019*, <http://industri.bisnis.com/read/20171107/45/706867/ksan-2017-targetkan-akses-universal-air-minum-dan-sanitasi-di-2019>, [23/11/2018].

Yudha Manggala P Putra, *KLH : 75% Air Sungai Indonesia Tercemar Berat*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-sungai-indonesia-tercemar-berat> [23/11/2018].

24 Juta Keluarga Indonesia tak Punya Sistem Sanitasi Layak, <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/RkjZXLWk-24-juta-keluarga-indonesia-tak-punya-sistem-sanitasi-layak>, [23/11/2018].

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



“MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

A. GAMBARAN UMUM ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU⁴⁵

Antara tahun 1990 dan 2010, terdapat peningkatan jumlah orang yang dapat mengakses dan mempergunakan listrik, yakni sebanyak 1,7 milyar. Selanjutnya terjadi perkembangan dimana meningkatnya kebutuhan atas energi murah. Hal ini terjadi dikarenakan secara global, kita masih tergantung pada minyak yang berasal dari fosil. Selain itu, terjadi peningkatan gas emisi rumah kaca yang menyebabkan perubahan drastis pada iklim yang mempengaruhi segala aspek.

Upaya untuk menggalakkan penggunaan energi bersih telah berhasil menghasilkan sekitar 20% energi global yang berasal dari energi yang terbarukan pada tahun 2011. Akan tetapi, masih terdapat 1 dari 7 orang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses menggunakan listrik.

Selanjutnya, sebanyak 60% penggunaan energi diketahui merupakan salah satu penyebab perubahan iklim. Dengan mengadopsi standar efisiensi yang kuat, maka hal ini dapat mengurangi penggunaan listrik secara global oleh bangunan perkantoran dan industri.

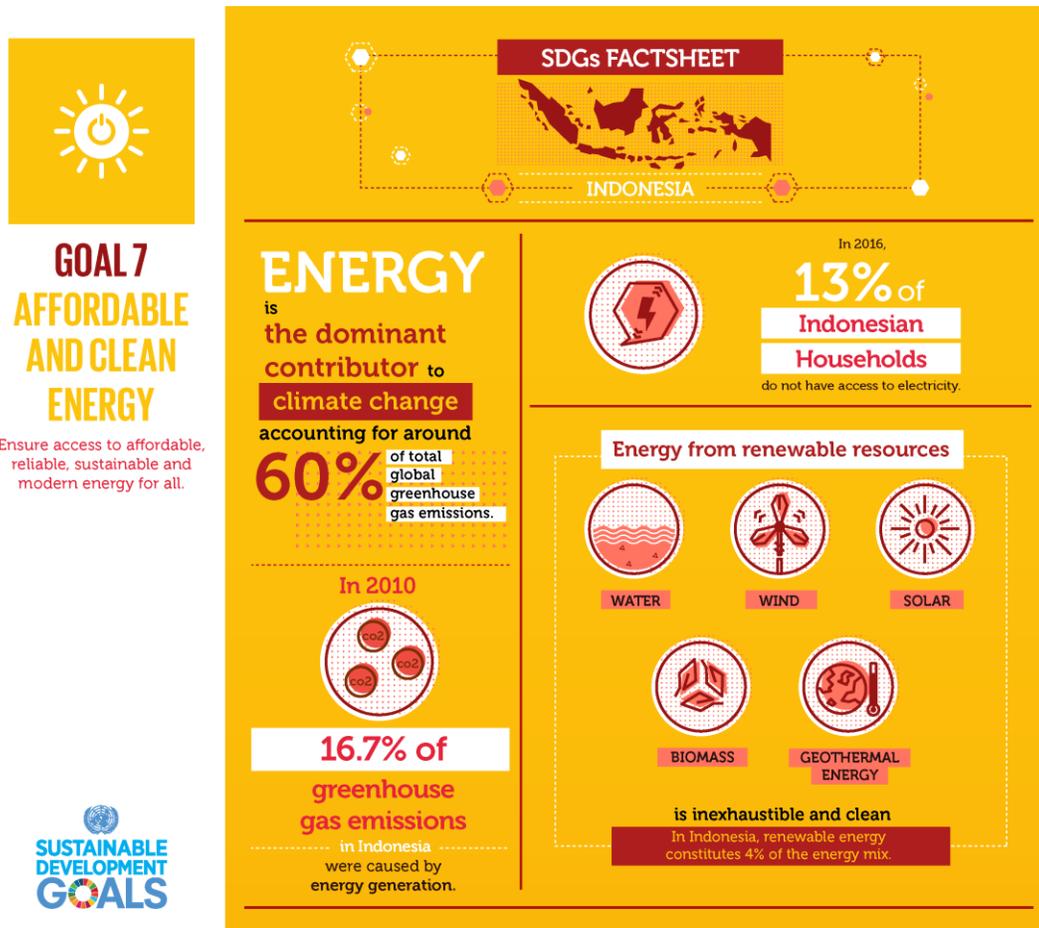
Tujuan dalam SDGs # 7: Energi Bersih dan Terjangkau ini adalah tercapainya akses secara universal terhadap kelistrikan yang terjangkau pada tahun 2030. Hal ini berarti pentingnya beralih pada energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin dan energi panas bumi. Selain itu, dalam SDG #7 ini tujuan lain yang hendak dicapai adalah pengurangan penggunaan tenaga kelistrikan secara global di bangunan perkantoran atau

⁴⁵ Lihat <http://sdgs.bappenas.go.id/energi-bersih-dan-terjangkau/> [13/11/2018]. Lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html>[13/11/2018]

bangunan perumahan dan industri. Tersedianya energi bersih di seluruh negara berkembang juga merupakan tujuan utama dalam SDG #7 ini.

B. KONDISI ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU DI INDONESIA

Kondisi energi bersih dan terjangkau di Indonesia dapat terlihat dari gambaran *SDGs Factsheet Indonesia Goal 7 Affordable and Clean Energy* dibawah ini.



Sumber : <http://www.un.or.id/component/content/article/19-sdg/97-goal-7-affordable-and-clean-energy?Itemid=437>

Energi merupakan kontributor utama yang menyebabkan perubahan iklim dimana 60% perubahan iklim tersebut berasal dari emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 16,7% gas emisi rumah kaca yang disebabkan oleh penggunaan energi tidak terbarukan sehingga tentunya hal ini memperburuk kondisi perubahan iklim bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

Berdasarkan *SDGs Factsheet Indonesia Goal 7* diatas, diketahui bahwa di Indonesia pada tahun 2016 terdapat 13% rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik. Maka

guna mengantisipasi hal ini, pemerintah Indonesia mengupayakan penggunaan energi terbarukan yang terdiri dari Energi Air, Energi Angin, Energi Matahari, Energi Biomass dan Energi Panas Bumi. Pelaksanaan penggantian energi terbarukan tersebut di Indonesia baru berhasil dilaksanakan sekitar 4%.

Saat ini menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Indonesia memasukkan penyediaan energi yang bersih dan terjangkau dalam pilar ekonomi walaupun sebenarnya isu tentang energi bersih masuk kedalam isu lingkungan, tetapi “keterjangkauan harga” berkaitan dengan faktor daya beli dan ekonomi masyarakat.⁴⁶ Akan tetapi terlepas dari hal tersebut, penyediaan energi yang bersih dan terjangkau merupakan salah satu yang hendak dicapai dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Buku I RPJMN 2015-2019, terkait perubahan iklim, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif. Namun, Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmennya dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) sebesar 26% pada tahun 2019 melalui Perpres No. 61 tahun 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RAD GRK).⁴⁷ Komitmen pemerintah tersebut lebih lanjut dipertegas pada saat Konferensi Perubahan Iklim (Climate Change Conference) di Marrakech pada tahun 2016 lalu.⁴⁸

Dibawah ini terdapat infografis mengenai Program Indonesia Terang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia agar seluruh wilayah Indonesia dapat terjangkau penerangan bukan hanya melalui energi listrik tetapi juga melalui energi terbarukan bagi daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

⁴⁶ Menteri PPN/Bappenas : Energi Tidak Hanya Terjangkau, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-ppnbappenas-energi-tidak-hanya-bersih-tapi-juga-harus-terjangkau/>, [23/11/2018]

⁴⁷ Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hlm. 3-16

⁴⁸ Komitmen Indonesia untuk Menurunkan Emisi Dunia Dipertegas di Marrakech Climate Change Conference, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2779-komitmen-indonesia-untuk-menurunkan-emisi-dunia-dipertegas-di-marrakech-climate-change-conference.html>, [23/11/2018]



Program Indonesia Terang.

Sumber : kominfo.go.id

Selanjutnya, pada infografis dibawah ini dapat dilihat program pemerintah terkait mengupayakan energi bersih dan terjangkau bagi semua masyarakatnya melalui Program Indonesia Terang yang fokus pada potensi Energi Baru Terbarukan.



Gerak Cepat Energi Terbarukan

Sumber : kominfo.go.id

C. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU DI INDONESIA DAN PERILAKU KORUPTIF PERILAKU KORUPTIF YANG MENGHAMBAT KETERSEDIAAN ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu tujuan dari SDGs # 7 ini adalah pada tahun 2030 terdapat akses penggunaan listrik yang terjangkau, andal dan modern. Hal ini berarti yang akan diutamakan adalah penggunaan energi bersih seperti matahari, angin dan panas bumi.⁴⁹

Selain itu dengan adanya upaya untuk mengurangi penggunaan listrik secara global oleh bangunan dan industri sebesar 14% berarti harus ada 1,300 tanaman berukuran sedang. Memperbanyak infrastruktur dan meningkatkan teknologi dalam upaya menyediakan

⁴⁹ <http://sdgs.bappenas.go.id/energi-bersih-dan-terjangkau/> [13/11/2018]

energi bersih di seluruh negara berkembang merupakan tujuan yang paling krusial yang dapat mengembangkan dan membantu lingkungan.⁵⁰

Upaya pemerintah dalam memberikan akses terhadap energi yang bersih dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih dalam proses. Akan tetapi sayangnya terdapat beberapa perilaku koruptif yang menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan energi bersih dan terjangkau tersebut, diantaranya adalah:

1. Kurangnya kepedulian dari beberapa kalangan terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan energi bersih dan terjangkau tersebut, antara lain dikarenakan tidak merasakan kesulitan masyarakat di pedalaman yang belum tersentuh penerangan sehingga tidak merasakan kesulitan yang dialami masyarakat pedalaman tersebut
2. Kurangnya tanggung jawab dari oknum pemerintah dalam mendukung program tersebut. Selain itu, masyarakat yang telah menikmati penerangan tersebut sering kali berperilaku seenaknya dalam pemakaian energi tersebut.
3. Disebabkan Indonesia harus mengubah pola konsumsi energi yang tadinya merupakan energi berbahan fosil yang tidak dapat terbarukan menjadi energi terbarukan, tentunya diperlukan proses panjang dalam mengubah pola konsumsi tersebut. Selain itu diperlukan pula dukungan anggaran yang tinggi dalam membangun infrastruktur terkait yang dapat menghasilkan energi terbarukan tersebut.
4. Mulai menurunnya cadangan minyak bumi Indonesia. Saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 3,6 miliar barel cadangan minyak bumi. Angka ini menurun tajam dari produksi beberapa tahun lalu yang mencapai 26 miliar barel.⁵¹
5. Banyaknya korupsi di bidang energi. KPK dalam kajiannya menemukan adanya potensi pendapatan yang hilang hingga mencapai Rp 24 triliun lebih pada sektor pertambangan mineral dan batu bara.⁵² Senada dengan kajian KPK tersebut, terkait banyaknya korupsi di bidang energi ini, menurut Nur Hidayati Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, korupsi di bidang energi khususnya pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil harus menjadi prioritas pemerintah guna memberikan efek jera bagi pelaku korupsi yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.⁵³

Guna mencegah perilaku-perilaku koruptif yang menghambat tersedianya energi bersih dan terjangkau, maka berbagai kalangan perlu menginternalisasi dan melaksanakan nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut :

⁵⁰ Loc.Cit.

⁵¹ Korupsi ESDM dan Krisis Energi, <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/09/04/nbd1w729-korupsi-esdm-dan-krisis-energi>, [23/11/2018]

⁵² Loc.Cit.

⁵³ Mohar Syarif, Walhi : Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas, <http://www.neraca.co.id/article/107673/walhi-korupsi-bidang-energi-harus-dijadikan-prioritas>, [23/11/2018]

1. Nilai Kepedulian. Bentuk nilai kepedulian terhadap program pemerintah dalam penyediaan energi bersih dan terjangkau antara lain adalah ikut serta dalam berbagai gerakan yang peduli penggunaan energi bersih serta gerakan peduli dalam penghematan energi yang tidak terbarukan.
2. Nilai Tanggung Jawab. Nilai tanggung jawab bukan hanya harus dimiliki oleh pemerintah beserta aparatnya, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, tetapi juga tanggung jawab yang diemban oleh warga negara Indonesia tersebut sebagai bagian dari masyarakat dunia.
3. Nilai Kemandirian. Bentuk nilai kemandirian disini antara lain adalah dapat menemukan pemikiran yang inovatif dalam menciptakan ide sehingga dapat menghasilkan energi terbarukan tanpa harus tergantung pada upaya yang dilakukan pemerintah saja.

D. LATIHAN

1. Dalam kelompok, pelajari dan lakukan riset untuk menemukan solusi atas permasalahan berikut:
 - a. Bagaimana menjaga pasokan energi di Indonesia?
 - b. Bagaiman bentuk produksi energi yang bertanggungjawab?
 - c. Bagaimakah distribusi energi yang adil untuk seluruh wilayah di Indonesia?
 - d. Bagaimanakan bentuk konsumsi energi yang bertanggungjawab?
 - e. Bagaimanakah upaya untuk menciptakan/menciptakan energi alternatif di Indonesia?
2. Hasil riset dituangkan di atas kertas plano/karton dalam bentuk *roadmap* yang menunjukkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada no. 1. Roadmap yang telah di buat ditempelkan di dinding, *whiteboard*, atau *flip chart*.
3. Tunjuklah salah satu anggota kelompok untuk tinggal di dalam kelompok dan melakukan presentasi *roadmap* yang merupakan hasil diskusi kelompok. Sedangkan anggota kelompok lainnya berkeliling ke kelompok lainnya untuk mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan memberikan masukan atas hasil diskusi kelompok lain (yang dituangkan dalam bentuk *roadmap*) dan membuat catatan.
4. Setelah selesai berkeliling, masing-masing anggota kelompok kembali ke kelompoknya dan menyampaikan hasil catatannya. Sedangkan salah seorang anggota kelompok yang sebelumnya bertugas presentasi menyampaikan masukan dari para pengunjung.

E. SUMBER

Bekerja Bersama Untuk Indonesia Terang Demi Ketahanan Energi, https://www.kominfo.go.id/content/detail/7546/bekerja-bersama-untuk-indonesia-terang-demi-ketahanan-energi/0/artikel_gpr.

Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.

Gerak Cepat Energi Terbarukan, <https://kominfo.go.id/content/detail/7543/gerak-cepat-energi-terbarukan/0/infografis> [23/11/2018].

<http://sdgs.bappenas.go.id/energi-bersih-dan-terjangkau/> [13/11/2018].

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html>[13/11/2018].

Komitmen Indonesia untuk Menurunkan Emisi Dunia Dipertegas di Marrakech Climate Change Conference, <http://ditiempki.menlhk.go.id/berita-ppi/2779-komitmen-indonesia-untuk-menurunkan-emisi-dunia-dipertegas-di-marrakech-climate-change-conference.html>, [23/11/2018].

Korupsi ESDM dan Krisis Energi, <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/09/04/nbd1w729-korupsi-esdm-dan-krisis-energi>, [23/11/2018].

Menteri PPN/Bappenas: Energi Tidak Hanya Terjangkau, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-ppnbappenas-energi-tidak-hanya-bersih-tapi-juga-harus-terjangkau/>, [23/11/2018].

Mohar Syarif, Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas, <http://www.neraca.co.id/article/107673/walhi-korupsi-bidang-energi-harus-dijadikan-prioritas>, [23/11/2018].

Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



**“MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA
YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH,
SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK
UNTUK SEMUA”**

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

A. GAMBARAN UMUM TUJUAN PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI⁵⁴

Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama. Oleh karena itu target yang ingin dicapai untuk mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan SDGs adalah:⁵⁵

Untuk mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional; Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi; Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan; Meningkatkan secara progresif efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi; Tercapainya pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya; Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan; Memberantas kerja paksa, mengakhiri

⁵⁴ Lihat Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, <http://sdgs.bappenas.go.id/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi/>, lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html>.

⁵⁵ Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, <http://sdgs.bappenas.go.id/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi/>, [8/11/2018].

perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak dan menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

B. POTRET PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Untuk mewujudkan target dari SDG #8 pemerintah telah membuat suatu perencanaan yang mencoba mengakomodir target pembangunan yang dapat mewujudkan pembangunan manusia dalam hal tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui RJPMN 2015-2019.⁵⁶ Target yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan SDG #8 antara lain dengan menciptakan pertumbuhan inklusif dan memperbesar investasi padat pekerja.⁵⁷ Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada RJPMN diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2018 mencapai Rp3 835,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2 684,2 triliun.⁵⁸ Ekonomi Indonesia triwulan III-2018 terhadap triwulan III-2017 tumbuh 5,17 persen (*y-on-y*).⁵⁹

Di bawah ini adalah gambaran perekonomian Indonesia didasarkan pada APBN dan RAPBN:

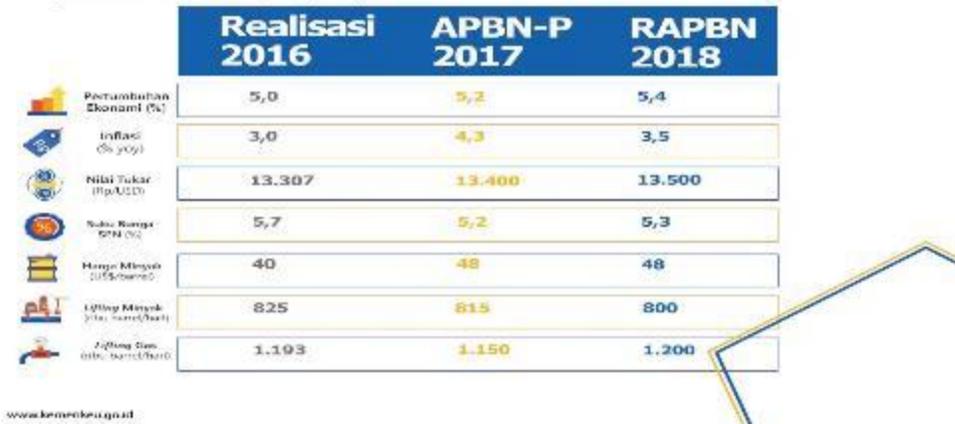
⁵⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjVrarGstfeAhUKL48KHbAAYIQFjAGegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjdih.ristekdikti.go.id%2Fv0%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Frencana-kebijakan%2F127884053403.pdf&usg=AOvVaw2ISGrbZl6kml658Dqjl9uz>.

⁵⁷ Prinsip Kerja Program Padat Karya, <http://www.berdesa.com/11-prinsip-kerja-program-padat-karya/>, [10/11/2018].

⁵⁸ Ekonomi Indonesia Triwulan III 2018 Tumbuh 5,17 Persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html>, [10/11/2018].

⁵⁹ *Ibid.*

Fokus pada kualitas kebijakan fiskal -> kemiskinan, ketenagakerjaan, & kesempatan kerja
Reformasi perimbangan negara -> Pajak & PPNP
Laga momentum ekonomi dan keberagamaan rakyat



Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 128,06 juta orang. Jumlah tersebut naik 2,9% yaitu 2,62 juta dibanding Agustus 2016 yang sebanyak 125,44 juta orang.⁶⁰ Sebagian angkatan kerja Indonesia merupakan penduduk usia produktif, potensi mereka saat ini belum dimanfaatkan secara tepat.⁶¹ Salah satu program pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja adalah mendorong pendidikan vokasional. Pemerintah mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu melalui pendidikan vokasional. Sasarannya menciptakan 1,1 juta tenaga kerja sesuai permintaan industri. Langkah ini bersifat strategis, lantaran investor membutuhkan tenaga terampil yang siap kerja untuk menjalankan industrinya. Gambaran di bawah ini menunjukkan hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja.

⁶⁰ Tenaga Kerja Asing dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, <https://news.detik.com/kolom/4010317/tenaga-kerja-asing-dan-pertumbuhan-ekonomi-nasional>, [11/11/2018].

⁶¹ ILO Kerja Layak dan Agenda Pembangunan 2030, http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/ILO_Kerja-Layak-dan-Agenda-Pembangunan-2030.pdf, [11/11/2018].

**INVESTASI MEMBUKA
LAPANGAN KERJA**

SELAMA JANUARI-MARET
(TRIWULAN-I) 2018

**PROYEK INVESTASI
MENYERAP
201.239
TKI LANGSUNG**

www.bkpm.go.id | 0800 100 2576 (Contact Center)

BKPM
BUREAU OF COORDINATION OF INVESTMENT

BKPMINDONESIA bkpm bkpm_id BKPM BKPM - Invest Indonesia

sumber: keuangan.co

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA PEKERJAAN LAYAK & PERTUMBUHAN EKONOMI

Keberlangsungan terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang meningkat dan pekerjaan yang layak dapat terhambat jika perilaku koruptif masih terjadi. Kerugian negara akibat perilaku koruptif (tindak pidana korupsi) yang ditimbulkan sangat besar dan hampir terjadi di banyak sektor. Jika dilihat dari grafik di bawah sebagian besar terjadi di sektor infrastruktur dan keuangan negara.

4
TAHUN

**TREN KORUPSI
INDONESIA
2010-2013**

**INFOGRAFIS
LAWAN KORUPSI**



Jumlah Kasus yang Ditangani Aparat Penegak Hukum

Kejaksaan	Kepolisian	KPK
363 (2010)	62 (2010)	23 (2010)
332 (2011)	82 (2011)	22 (2011)
168 (2012)	99 (2012)	18 (2012)
379 (2013)	154 (2013)	27 (2013)

Apa Ruginya Buat Kita?



Bachtiar Chamsyah
Mantan Menteri Sosial RI
Korupsi pengadaan mesin jahit, sapi potong dan sarung

Total Kerugian:
Rp. 33,7 Miliar
Setara dengan memberi bantuan sosial kepada **84.250** orang miskin, setiap orangnya mendapat **Rp. 400.000**



Djoko Susilo
Perwira Tinggi Mabes POLRI
Korupsi pengadaan simulator SIM

Total Kerugian:
Rp. 121,38 Miliar
Setara dengan jumlah gaji **48.550** orang polisi dalam satu bulan (gaji Brigadir Polisi rata-rata **Rp. 2,5 juta** per bulan)

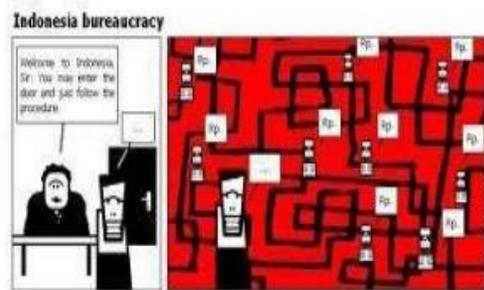
Design by: @bagusmaruf marufart

sumber: desain oleh marufart, <https://id.pinterest.com/pin/407646203746637730/?lp=true>

Pertumbuhan ekonomi yang baik sangat erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, akan tetapi dengan adanya korupsi maka perkembangan bisnis dan investasi menjadi terhambat sehingga menyebabkan tujuan dari SDG # 8 tidak tercapai. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa permasalahan mendasar dalam bisnis di Indonesia adalah birokrasi dan korupsi.

Faktor Penghambat Bisnis di Indonesia

Faktor-faktor Penghambat	Persen (%)
Birokrasi berbelit-belit	15,4
Korupsi	14,2
Infrastruktur	8,7
Etika kerja buruh rendah	7,2
Regulasi buruh	6,8
Inflasi	5,8
Akses ke lembaga keuangan	5,4
Kebijakan selalu berubah	5,4
Regulasi mata uang asing	5,2
Regulasi pajak	5,1
Instabilitas pemerintah	5,0
Kriminal dan pencurian	4,3
Pekerja terdidik	4,1
Pajak	3,3
Kapasitas inovasi lemah	2,3
Layanan kesehatan buruk	2,0



sumber: korupsi di sektor perijinan dan investasi, https://www.slideshare.net/indo_acf/korupsi-di-sektor-perijinan-dan-investasi-new

Perilaku koruptif terkait dengan pekerjaan yang layak antara lain menyuap pihak yang memiliki kewenangan untuk menaikkan jabatan /pangkat atau menjadi pegawai (ASN).



sumber: rapormerah.co

Oleh karena itu dengan melihat ilustrasi di atas diharapkan mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang ada untuk mencegah berbagai perilaku yang menghambat terwujudnya SDG #8. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemandirian, kepedulian dan tanggungjawab. Contoh perbuatan-perbuatan yang mencerminkan perilaku anti koruptif antara lain:

1. Kemandirian, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja/*entrepreneurship*;
2. Kejujuran, misalnya dengan tidak memberikan suap untuk mendapatkan pekerjaan;
3. Kerja keras, misalnya dengan menciptakan hasil karya yang kreatif dan berinovasi;
4. Tanggung jawab, misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan secara optimal;
5. Peduli, misalnya dengan menghargai dan mengormati pekerja domestik;
6. Sederhana, misalnya dengan tidak konsumtif dan rajin berinvestasi.

D. LATIHAN

1. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok dan berperan sebagai perwakilan dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pengusaha;
 - c. Sekolah (pendidik);
 - d. Mahasiswa; dan
 - e. Orangtua.

2. Masing-masing kelompok menyusun rencana aksi (*action plan*) guna mendorong peluang kerja yang produktif dan bebas dari praktik-praktik korupsi.
3. Dalam menyusun rencana aksi tersebut, kelompok-kelompok perwakilan mengkaitkannya dengan nilai-nilai anti korupsi, seperti kemandirian, kepedulian, atau tanggungjawab. Rencana aksi ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai anti korupsi tersebut.
4. Selanjutnya, masing-masing 2 anggota kelompok membentuk kelompok baru dengan anggota kelompok lainnya. Di dalam kelompok baru tersebut, masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan pandangannya serta rencana aksinya.
5. Masing-masing kelompok baru merumuskan rencana aksi baru yang komprehensif sebagai hasil dari diskusi dengan masing-masing perwakilan peran dan dipresentasikan di depan kelas.

E. SUMBER

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, <http://sdgs.bappenas.go.id/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi/>.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html>.

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, <http://sdgs.bappenas.go.id/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi/>, [8/11/2018].

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwJVrarGstfeAhUKL48KHbA_AYIQFjAGegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fidih.ristekdikti.go.id%2Fv0%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Fencana-kebijakan%2F127884053403.pdf&usq=AOvVaw2ISGrbZl6kml658Dqil9uz.

Prinsip Kerja Program Padat Karya, <http://www.berdesa.com/11-prinsip-kerja-program-padat-karya/>, [10/11/2018].

Ekonomi Indonesia Triwulan III 2018 Tumbuh 5,17 Persen,

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html>, [10/11/2018].

Tenaga Kerja Asing dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,

<https://news.detik.com/kolom/4010317/tenaga-kerja-asing-dan-pertumbuhan-ekonomi-nasional>, [11/11/2018].

ILO Kerja Layak dan Agenda Pembangunan 2030, http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/ILO_Kerja-Layak-dan-Agenda-Pembangunan-2030.pdf,

[11/11/2018].

Korupsi Di Sektor Perijinan Dan Investasi,

https://www.slideshare.net/indo_acf/korupsi-di-sektor-perijinan-dan-investasi-new.
Marufart. <https://id.pinterest.com/pin/407646203746637730/?lp=true>
kemenkeu.go.id.
keuangan.co.
rapormerah.co.

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR



“MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

A. GAMBARAN UMUM TUJUAN INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR⁶²

Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Saat ini lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan, karena itu transportasi massal dan energi terbarukan menjadi sangat penting, begitu juga dengan pertumbuhan industri baru serta teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan dari SDG #9, hal-hal yang diharapkan dapat terpenuhi antara lain; Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.; Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, terhadap jasa keuangan; Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan; Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri; Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh dan Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi serta Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (akses internet).

⁶² Lihat Inovasi dan Infrastruktur, <http://sdgs.bappenas.go.id/industri-inovasi-dan-infrastruktur/>, lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html>.

B. POTRET INDUSTRI, INOVASI & INFRASTRUKTUR DI INDONESIA SAAT INI

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari RJPMN Indonesia 2015-2019. Ketersediaan infrastruktur Indonesia saat ini sangat terbatas. Keterbatasan infrastruktur menghambat peningkatan investasi dan menyebabkan distribusi logistik menjadi mahal.⁶³ Dalam *Global Competitiveness Report 2015-2016*, yang disusun oleh lembaga World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur -- peringkat yang bertahan di standar rata-rata.⁶⁴ Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Target pemerintah adalah peningkatan infrastruktur dengan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik diharapkan akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah Indonesia. Anggaran infrastruktur Indonesia ini terus meningkat. Pada 2015, pemerintah menganggarkan Rp 290 triliun untuk membiayai pembangunan infrastuktur. Sementara pada 2016, anggaran tersebut melonjak mencapai Rp 313 triliun. Tahun 2017, anggaran bertambah menjadi Rp 387 triliun. Artinya dalam rentang waktu 2015-2017, anggaran infrastruktur yang dialokasikan di dalam APBN sudah mencapai Rp 990 triliun⁶⁵

Pembangunan inovasi juga menjadi target dari Pemerintah, rencana pemerintah antara lain dengan membangun SMK-SMK dan politeknik dengan sarana dan prasarana teknologi terkini. Pembangunan *Science* dan *Technology Park* diperlukan dalam mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah menumbuhkan investasi. Caranya, memperbaiki iklim investasi lewat penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana investasi. Melalui (a) penyederhanaan regulasi dan proses perizinan investasi pusat dan daerah, (b) pengembangan layanan perizinan terpadu, (c) percepatan penyelesaian masalah investasi, (d) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis, dan (e) peningkatan kemudahan berusaha melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, khususnya Paket Kebijakan Ekonomi XII.⁶⁶

⁶³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKewjVrarGstfeAhUKL48KHbAAYIQFjAGegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjdih.ristekdikti.go.id%2Fv0%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Frencana-kebijakan%2F127884053403.pdf&usg=AOvVaw2ISGrbZl6kml658Dqjl9uz>, (10/11/2018).

⁶⁴ Bisnis Risiko Infrastruktur, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/infrastruktur/item381?>, [11/11/2018].

⁶⁵ Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, [(11/11/2018)].

⁶⁶ *Ibid.*

Lebih berkualitas dengan melanjutkan efisiensi belanja, refocusing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial

Alokasi
1.443,3
Outlook 2017: 1.343
(triliun Rupiah)



Belanja K/L
814,1

Perbaiki perencanaan dengan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan
Efisiensi belanja operasional
Monitoring pelaksanaan
Proses pelelangan yang lebih awal



Belanja Non K/L
629,2

Pembayaran Bunga Utang
247,6

Perbaiki peringkat surat utang Pemerintah Indonesia diharapkan memberi dampak positif terhadap penurunan yield 50%

Subsidi Energi
103,4

Subsidi lebih tepat sasaran dan pengendalian inflasi

Subsidi Nonenergi
69,0

Sinergi dengan bansos dan transfer ke daerah agar efektif dan berintegritas untuk pengendalian inflasi dan bantuan masyarakat menengah ke bawah

Diarahkan untuk:

<p>Kemiskinan dan Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> Program perlindungan sosial (PKS) -> Naik dari 6 juta menjadi 10 juta KPM Bantuan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) -> dari rastra Polayanan Kesehatan -> Rp. 92,4 juta jiwa Pendidikan Program Indonesia Pintar -> 19,7 juta siswa & 461,4 ribu mahasiswa 	<p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan 856 km Pembangunan Irigasi 781 km Rasio Elektrifikasi 95,15% Perumahan 7.062 unit 	<p>Sektor Unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanian <ul style="list-style-type: none"> Peringatan Peringatan pangan dan pembangunan serpas Pembangunan Hortikultura Perikanan <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan 10 destinasi wisata Peningkatan wisatawan Promosi perikanan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya saing produk olahan perikanan Bantuan kapal nelayan 1048 unit Sistem an. Engkungan 	<p>Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kesejahteraan aparatur dan pelayanan (bermaksud pensiunan pensiun) Kenaikan uang pensiun (Rp5.000 dan Rp60.000) menjadi Rp60.000/ang/hari Perbaikan sistem dan manfaat pensiun 	<p>Pertahanan Keamanan dan Demokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertahanan Pencapaian MRP basis 2 dan pembangunan industri pertanian Kemampuan Pertahanan keamanan dan ketahanan dan pencerdasan/pengidikan pidana Demokrasi Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019
--	--	---	---	---

Salah satu upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan revolusi industri, yang saat ini telah berada di Industri 4.0.



Jika dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN, keberadaan infrastruktur Indonesia belum maksimal, masih berada di bawah Singapura, Malaysia bahkan Thailand, khususnya infrastruktur di bidang jalan raya dan kereta api.

Figure 16
A qualitative assessment of transport infrastructure in ASEAN

	Road network	Rail network	Port quality	Air transport
Indonesia	Bad	Bad	Fair	Fair
Malaysia	Good	Good	Good	Good
Philippines	Fair	Bad	Bad	Bad
Singapore	Good	Good	Good	Good
Thailand	Good	Good	Good	Good
Vietnam	Fair	Fair	Bad	Bad

Sources: Jones Lang LaSalle; A.T. Kearney analysis

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Masih tingginya tingkat korupsi sangat menghambat lajunya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di bawah ini adalah gambaran tentang 4 skandal korupsi terbesar di Indonesia. 2 diantaranya yaitu kasus Hambalang dan pengadaan radio komunikasi terpadu tergolong dalam pembangunan infrastruktur.





Proyek Hambalang

Jika melihat perbandingan antara korupsi infrastruktur dan non-infrastruktur dari jumlah kasus yang ada. Kasus korupsi di bidang infrastruktur terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan non-infrastruktur, akan tetapi nominal kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi di bidang infrastruktur memiliki jumlah lebih besar dibandingkan korupsi di bidang non-infrastruktur.





Jembatan Mandastana roboh, baru dibangun pada tahun 2015 dengan dana 15 M⁶⁷

Pembangunan di bidang industri, inovasi dan infrastruktur memiliki keterkaitan satu sama lain. Perilaku-perilaku koruptif dapat menghambat keberlangsungan pembangunan Indonesia khususnya di bidang infrastruktur, terhambatnya pembangunan infrastruktur juga mengakibatkan pembangunan di bidang industri dan inovasi juga terhambat dan menimbulkan penyebaran pembangunan yang tidak merata. Sebagai mahasiswa dengan menerapkan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi dapat mencegah perilaku koruptif dan mendorong pembangunan industri, inovasi dan infrastruktur yang lebih pesat. Nilai-nilai anti korupsi yang bisa digunakan antara lain kejujuran, keadilan dan tanggungjawab.

Contoh nilai-nilai anti korupsi yang mencerminkan perbuatan yang dapat menunjang pembangunan di bidang industri, inovasi dan infrastruktur, antara lain:

1. Kejujuran, misalnya dengan tidak melakukan penggelembungan harga (*mark up*) dalam proyek-proyek pembangunan;
2. Mandiri, misalnya dengan menciptakan usaha mandiri (*enterpreneurship*);
3. Tanggungjawab, misalnya dengan membangun sarana prasarana sesuai standar yang telah ditentukan;
4. Kepedulian, misalnya dengan membeli produk-produk lokal (UMKM).

⁶⁷ Jembatan Mandastana yang Runtuh Baru Dibangun 2015 lalu Dananya Rp 17 Miliar, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/08/17/jembatan-mandastana-yang-runtuh-baru-dibangun-2015-lalu-dananya-rp-17-miliar>, [21/11/2018].

D. LATIHAN

1. Di dalam kelompok, mahasiswa berdiskusi untuk membuat rancangan media informasi atau kampanye berupa poster. Poster dapat dibuat dalam bentuk gambar atau tempelan gambar dan tulisan dari koran atau majalah bekas.
2. Materi poster berisikan:
 - a. Permasalahan dalam mewujudkan industri, inovasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan.
 - b. Upaya atau kontribusi yang dapat diberikan untuk mewujudkan industri, inovasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan.
 - c. Perwujudan nilai-nilai anti korupsi seperti KEJUJURAN, KEADILAN dan TANGGUNGJAWAB dalam mewujudkan industri, inovasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan.
3. Poster tersebut akan disampaikan dalam berbagai bentuk, dalam bentuk orasi, presentasi, iklan, atau video.

E. SUMBER

Lihat Inovasi dan Infrastruktur, <http://sdgs.bappenas.go.id/industri-inovasi-dan-infrastruktur/>.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html>.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjVrarGstfeAhUKL48KHbA_AYIQFjAGegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjih.ristekdikti.go.id%2Fv0%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Frencana-kebijakan%2F127884053403.pdf&usg=AOvVaw2ISGrbZl6kml658Dqjl9uz, [10/11/2018].

Bisnis Risiko Infrastruktur, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/infrastruktur/item381?>, [11/11/2018].

Upaya Nyata Pemerintah Membuka Lapangan Kerja, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html>, [11/11/2018].

Jembatan Mandastana yang Runtuh Baru Dibangun 2015 lalu Dananya Rp 17 Miliar, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/08/17/jembatan-mandastana-yang-runtuh-baru-dibangun-2015-lalu-dananya-rp-17-miliar>, [21/11/2018].

www.kemenperin.go.id .

www.tirto.id

www.kemenkeu.go.id.

10 BERKURANGNYA KESENJANGAN



“MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN BERKURANGNYA KESENJANGAN

A. GAMBARAN UMUM TUJUAN BERKURANGNYA KESENJANGAN⁶⁸

Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan. Perbedaan yang semakin lebar adalah seruan untuk bertindak yang membutuhkan adopsi kebijakan-kebijakan tepat untuk memberdayakan peraih pendapatan pada persentase terbawah dan mendorong inklusi ekonomi untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras atau etnis.

Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan perbaikan aturan, pengawasan pasar dan institusi finansial, serta mendorong bantuan pembangunan dan investasi asing secara langsung pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Memfasilitasi perpindahan dan pergerakan penduduk yang aman juga menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan yang semakin lebar.

Untuk terwujudnya berkurangnya kesenjangan telah dibuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam SDG #10, yaitu antara lain secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk; Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua tanpa diskriminasi; Menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif.; Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan; Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global; Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab dan Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.

⁶⁸ Lihat <http://sdgs.bappenas.go.id/berkurangnya-kesenjangan/>, lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html>

B. KEADAAN KESENJANGAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI

Ketimpangan/kesenjangan masyarakat Indonesia saat ini masih tinggi. Ketimpangan ini dapat ditunjukkan dengan hanya sebagian warga yang menguasai kekayaan nasional dan simpanan perbankan. Saat ini berdasarkan hasil laporan Credit Suisse, Indonesia berada di urutan keempat disparitas kekayaan tertinggi.



Realisasi investasi dunia ke Indonesia masih rendah (1,97%) dengan rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar US\$ 1.417,58 miliar. Selanjutnya capaian target rasio investasi sebesar 32,7% (2012-2016), di bawah target RPJMN sebesar 38,9% pada tahun 2019, realisasi investasi masih rendah dibandingkan dengan pengajuan/komitmen investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) 27,5% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 31,8%

(2010-2016), dan belum seimbang wilayah investasi di mana investasi di Jawa di atas 50% dibandingkan dengan Luar Jawa.⁶⁹

Rencana pemerintah untuk mengatasi kesenjangan adalah dengan mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.⁷⁰

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan antara lain melalui "Program pengurangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di bawah ini adalah upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan

⁶⁹ Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid Ke-16, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3622929/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-jilid-ke-16>, [15/11/2018].

⁷⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjVrarGstfeAhUKL48KHbAAYIQFjAGegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjdih.ristekdikti.go.id%2Fv0%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Frencana-kebijakan%2F127884053403.pdf&usg=AOvVaw2ISGrbZl6kml658Dqjl9uz>, [9/11/2018].

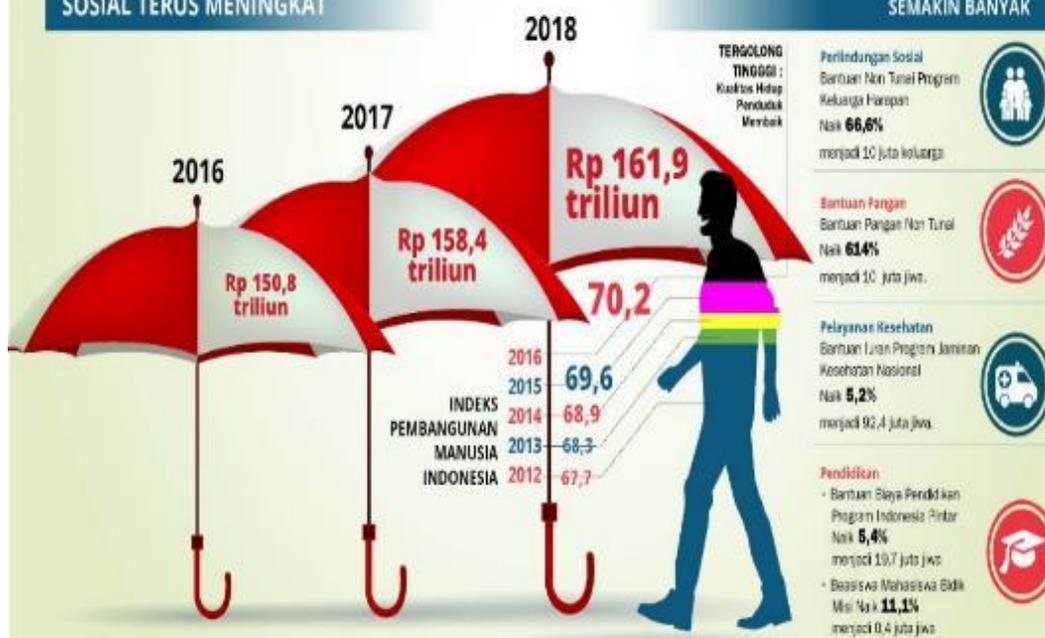
MENEKAN KESENJANGAN DENGAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Bantuan sosial menjadi andalan pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan penduduk di Indonesia. Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018, jumlah penerima dan nilai manfaat program-program perlindungan sosial meningkat pesat.

ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL TERUS MENINGKAT

PENERIMA MANFAAT SEMAKIN BANYAK



www.kominfo.go.id

sumber: kominfo.go.id

Penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah



Output Angka sementara



www.kemenkeu.go.id

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KEADILAN DI INDONESIA

Berbagai kasus menunjukkan bahwa perilaku koruptif dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan menghambat pemerataan pembangunan dan keadilan. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus Bupati Jombang,⁷¹ yang menerima suap/setoran dari Plt Kadinkes dengan menggunakan dana kapitasi BPJS yang berasal dari Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Jombang. Kasus lain yang dapat dijadikan referensi adalah kasus dugaan korupsi dana desa (DD) yang dilakukan Kades Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut.⁷²

Kasus-kasus korupsi tersebut mengakibatkan upaya pemerintah mengatasi kesenjangan dan pemerataan kepada masyarakat menjadi terhambat karena ada seseorang atau

⁷¹ Mahulika Sitepu, ICW: Sekitar Rp. 1 Triliun Dana BPJS Menguap Karena Dipotong Kepala Daerah, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43048536>, [16/11/2018].

⁷² Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kades Tulungagung Dinyatakan P21, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4208802/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-kades-tulungagung-dinyatakan-p21?_ga=2.36620898.354022116.1542324765-1902750409.1524450106, [16/11/2018].

sekelompok orang yang berperilaku koruptif demi kepentingannya sendiri. Mahasiswa diharapkan dapat mewujudkan semakin kecilnya kesenjangan antara masyarakat dengan menerapkan perilaku anti koruptif antara lain dengan mengedepankan kepedulian, kemandirian, kerja keras dan kesederhanaan.



sumber: faktualnews.co

Kesenjangan saat ini semakin lebar baik antara kaya maupun miskin maupun di kota dan di desa. Sebagai mahasiswa kita dapat menerapkan berbagai nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkecil kesenjangan. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi antara lain:

1. Kepedulian, misalnya dengan membeli bahan bakar non-subsidi;
2. Tanggungjawab, contohnya dengan membayar pajak tepat pada waktunya;
3. Kerja keras, contohnya turut serta dalam kegiatan pembangunan desa atau daerah tertinggal, antara lain dapat menjadi guru masuk desa atau dokter masuk desa.

D. LATIHAN

1. Mahasiswa melakukan riset perorangan untuk mencari contoh atau bentuk kesenjangan yang marak terjadi di Indonesia serta penyebabnya.
2. Mahasiswa berdiskusi dengan teman sebelahnya atau yang ada di belakangnya/di depannya mengenai nilai KEPEDULIAN, KEMANDIRIAN, KERJA KERAS DAN KESEDERHANAAN dikaitkan hasil riset pada no. 1.
3. Selanjutnya di dalam kelompok yang terdiri dari 6 orang meng-kritisi program perlindungan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga

Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dll. Kelompok juga mempertimbangkan dampak dari program-program tersebut dalam mencegah atau mengurangi kesenjangan di Indonesia.

4. Kelompok merumuskan hasil diskusi serta memberikan masukan atau saran terhadap program perlindungan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Hasil diskusi di presentasikan di depan kelas.

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/berkurangnya-kesenjangan/>,

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html>.

Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid Ke-16, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3622929/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-jilid-ke-16>, [15/11/2018].

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjVrarGstfeAhUKL48KHbA_AYIQFjAGegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjdih.ristekdikti.go.id%2Fv0%2F%3Fq%3Dsystem%2Ffiles%2Frencana-kebijakan%2F127884053403.pdf&usg=AOvVaw2ISGrbZI6kml658Dqjl9uz, [9/11/2018].

Mahulika Sitepu, ICW: Sekitar Rp. 1 Trilyun Dana BPJS Menguap Karena Dipotong Kepala Daerah, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43048536>, [16/11/2018].

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kades Tulungagung Dinyatakan P21,

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4208802/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-kades-tulungagung-dinyatakan-p21?_ga=2.36620898.354022116.1542324765-1902750409.1524450106, [16/11/2018].

www.faktualnews.co.

www.katakita.com.

www.kemenkeu.go.id.

www.kominfo.go.id.

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



“MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN⁷³

Pada saat ini hampir 3,5 miliar atau setengah dari total seluruh penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan, yang pada 2050 nanti angka itu akan meningkat menjadi 6,5 miliar orang yang tinggal di perkotaan. Hal tersebut dapat menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan dan juga pengelolaan ruang perkotaan tidak akan berkembang secara signifikan. Pertumbuhan pesat di kota-kota di negara berkembang, ditambah juga dengan adanya migrasi dari desa ke kota telah menyebabkan ledakan penduduk di kota besar. Pada tahun 1990 ada 10 megapolitan dengan 10 juta penduduk atau lebih. Pada tahun 2014 ada 28 megapolitan dengan total 453 juta penduduk atau lebih di dalamnya.⁷⁴

Tingkat kemiskinan yang ekstrem terkonsentrasi di wilayah perkotaan, pemerintah secara nasional maupun pemerintah kota berjuang keras mengatasi hal tersebut. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Sampai saat ini ada sekitar 828 juta penduduk yang tinggal di wilayah kumuh dan jumlahnya terus meningkat. Kota-kota yang ada saat ini hanya menempati 3 persen dari wilayah daratan bumi akan tetapi konsumsi energi yang digunakan mencapai 60-80 persen dan menghasilkan 75 persen emisi karbon.

Kehidupan kota yang berkelanjutan membutuhkan investasi yang besar baik itu transportasi umum, ruang terbuka hijau bagi publik, dan juga meningkatkan perencanaan

⁷³<http://sdgs.bappenas.go.id/kota-dan-pemukiman-yang-berkelanjutan/>, (17/11/2018)

⁷⁴<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html>, (17/11/2018)

dan pengaturan perkotaan yang inklusif yang melibatkan seluruh pihak, karena 1,2 miliar pekerjaan bergantung pada lingkungan sehat dan stabil.

Dalam hal mewujudkan SDG #11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan diperlukan beberapa tindakan yang mendukung antara lain : jaminan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan juga melingkupi pelayanan di dalam lingkungannya; adanya akses untuk sistem transportasi yang aman, terjangkau dan mudah diakses oleh semua orang; jaminan atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh orang; ikut serta dalam mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. menjamin ketersediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

B. KEADAAN KOTA DAN PEMUKIMAN INDONESIA SAAT INI

Persoalan pemukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Pemukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai pemukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Masyarakat miskin di perkotaan masih sangat banyak dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai pemukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan.



Sumber: www.liputan6.com



Gambar 1: Kondisi dan Tantangan Permukiman Kumuh

Sumber: www.kotaku.pu.go.id

Papan (rumah) merupakan salah satu kebutuhan hakiki manusia. Pemerintah Indonesia harus mampu menjamin rakyatnya dapat memenuhi hak untuk memiliki tempat tinggal karena sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, hanya sekitar 69,08% dari keluarga di Indonesia yang status

kepemilikan rumahnya dimiliki sendiri. Sedangkan 6,99% berstatus kontrak serta 8,87% berstatus sewa. Sementara itu 12,08% keluarga menempati rumah dinas. Sisanya berstatus lain seperti tinggal di rumah orang tua dan keluarga. Program sejuta rumah ini sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Sebanyak 600 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan 400 ribu rumah untuk non-MBR. Pemerintah memberikan subsidi kepada untuk kelompok rumah bagi MBR dan melepaskannya ke mekanisme pasar untuk kelompok non-MBR.

Asosiasi pengembang swasta seperti Real Estate Indonesia (REI)⁷⁵ pernah menyindir pengembang pelat merah lantaran ogah-ogahan membangun rumah sederhana tapak. Ini menunjukkan BUMN Karya enggan menysasar segmen pasar menengah dan bawah. Perusahaan-perusahaan pengembang milik pemerintah malah dinilai lebih sibuk menumpuk keuntungan di pasar kelas atas dengan gencar membangun apartemen dan pusat perbelanjaan mewah. Perum Perumnas mengaku sebenarnya tidak ada keengganan untuk membangun rumah sederhana tapak. Namun, dukungan pemerintah yang kurang telah membatasi ruang gerak perseroan. Kesulitan perseroan dalam membangun rumah sederhana tapak adalah permasalahan harga tanah yang terlalu tinggi. Berdasarkan perhitungan perseroan, harga tanah maksimal adalah Rp. 100.000 per meter persegi. Dengan nilai tanah tersebut, maka perseroan baru bisa mendapatkan untung jika menjual rumah sederhana tapak dengan harga 88 juta rupiah. Jika harga tanah lebih dari Rp 100.000, maka biaya produksi akan melebihi nilai jual. Kebutuhan akan perumahan hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta unit, sehingga kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 1,2 juta unit per tahun.⁷⁶ Berikut adalah data persentase rumah tangga menurut Provinsi dan status kepemilikan rumah milik sendiri sejak 1999-2017.

⁷⁵ Surya Perkasa, Menyorot Masalah Kekurangan Pasokan Rumah, <http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/9K5BX71N-menyorot-masalah-kekurangan-pasokan-rumah> (17/11/2018)

⁷⁶ Pramdia Arhando Julianto, Hingga 2025, Kebutuhan Rumah di Indonesia Tembus 30 Juta Unit, <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/17/195151226/hingga.2025.kebutuhan.rumah.di.indonesia.tebus.30.juta.unit> (17/11/2018)

Provinsi	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011*	2012	2012*	2013	2013*	2014	2015	2016	2017
Aceh	83,56	-	-	52,53	86,87	82,98	78,33	79,04	77,89	77,95	77,46	76,59	78,80	79,02	78,43	78,71	79,63	79,86	80,33	82,36	81,66	80,42
Sumatera Utara	74,32	72,05	69,91	71,03	73,64	70,42	70,62	69,07	66,28	66,14	67,34	66,58	65,43	66,07	68,02	68,79	67,62	68,23	68,50	71,09	69,95	67,53
Sumatera Barat	79,12	78,33	72,56	73,32	74,03	74,98	72,91	69,84	64,91	68,28	66,55	68,53	69,42	69,51	70,04	70,46	70,09	70,51	69,27	74,13	72,89	70,58
Riau	76,37	74,71	70,29	74,08	73,66	72,49	74,37	71,59	66,89	67,04	67,25	66,56	67,11	68,42	67,51	68,80	69,15	70,17	68,09	71,56	71,53	68,15
Jambi	79,29	81,07	75,63	77,82	78,34	76,99	77,42	77,54	75,06	75,37	76,47	76,98	76,98	78,02	77,81	78,84	79,05	79,93	80,38	83,94	84,13	81,39
Sumatera Selatan	80,64	80,85	77,18	78,76	80,71	79,18	79,62	77,57	76,30	76,60	75,51	75,89	76,63	77,37	80,33	80,94	79,45	79,95	80,43	83,02	83,09	80,60
Bengkulu	77,17	81,11	80,78	81,52	81,06	78,60	79,76	77,10	75,78	75,39	77,36	78,05	78,35	79,15	79,55	80,56	80,62	81,25	80,64	85,52	84,27	80,83
Lampung	91,59	91,61	89,88	90,47	90,11	89,88	88,80	88,07	86,05	87,01	85,97	86,70	86,23	86,64	85,92	86,50	87,30	87,62	88,30	90,35	90,71	86,36
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	79,20	84,97	86,27	82,29	82,72	84,23	80,88	81,54	80,91	80,75	80,89	81,71	84,25	85,10	83,63	84,26	84,31	87,85	87,59	83,75
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	67,21	67,33	63,83	70,95	71,86	67,09	62,72	64,33	64,54	66,78	62,31	64,73	67,91	67,67	68,99	65,70
DKI Jakarta	65,43	62,10	51,42	59,23	56,57	55,25	53,30	51,69	47,76	50,26	48,02	45,19	46,63	47,95	55,43	56,59	46,18	47,26	47,76	51,09	50,16	48,33
Jawa Barat	84,42	84,64	82,21	83,47	84,03	83,22	82,83	81,20	79,10	77,28	78,09	75,67	77,94	78,39	78,12	78,99	78,16	78,87	78,54	80,63	81,58	76,83
Jawa Tengah	92,33	91,74	88,47	89,43	90,19	89,06	89,12	89,18	88,35	88,31	88,45	87,88	87,64	87,98	88,56	88,95	87,76	88,14	88,06	90,93	90,77	88,01
DI Yogyakarta	77,90	80,84	73,19	77,25	75,13	72,61	73,31	72,41	74,09	75,36	78,63	74,50	76,51	75,70	76,62	76,83	76,45	76,88	74,97	76,99	77,40	75,26
Jawa Timur	89,87	89,92	86,25	87,69	89,54	88,08	88,20	88,27	86,66	87,63	88,09	87,05	86,62	86,85	88,13	88,56	87,28	87,66	87,14	90,46	90,76	87,55
Banten	-	-	74,45	81,29	81,26	82,57	80,82	82,16	76,56	75,41	74,20	72,33	75,96	76,20	76,98	78,05	76,70	77,48	77,96	80,94	81,52	81,38
Bali	84,27	83,63	78,74	79,24	83,65	79,46	79,03	77,01	73,86	77,11	76,84	71,28	70,25	70,30	75,00	76,17	71,47	72,36	69,80	77,31	74,05	70,54
Nusa Tenggara Barat	91,66	89,56	86,48	88,94	88,61	87,33	87,87	85,56	84,45	85,06	84,34	84,46	85,26	85,77	85,07	85,62	86,78	87,10	85,29	87,85	88,30	85,66
Nusa Tenggara Timur	90,62	91,78	88,30	87,92	88,87	88,39	88,00	87,14	85,11	85,13	85,36	83,74	86,78	86,56	86,01	86,30	87,31	87,43	86,33	88,52	88,53	86,50
Kalimantan Barat	89,48	87,33	85,28	85,91	88,87	87,17	86,51	87,60	84,65	85,08	85,82	84,00	84,85	85,30	87,60	87,87	88,58	88,81	87,53	90,07	89,06	87,99
Kalimantan Tengah	81,64	80,40	78,11	79,78	80,87	78,55	78,90	78,47	74,55	77,53	76,93	72,68	75,20	75,97	77,09	77,87	73,22	74,10	73,51	77,99	75,74	76,80
Kalimantan Selatan	81,63	79,81	76,14	77,81	79,85	77,93	78,52	77,80	75,18	75,78	74,79	73,78	73,74	74,67	75,23	76,08	75,69	76,41	74,39	79,22	79,84	77,30
Kalimantan Timur	70,68	68,41	66,71	66,30	67,91	68,81	69,64	69,10	65,65	64,92	66,05	63,88	64,93	66,18	69,93	71,35	66,96	68,10	68,91	72,69	71,12	68,87
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,77	70,02	69,72
Sulawesi Utara	79,95	78,96	71,15	73,89	78,18	74,51	76,58	75,95	74,65	72,11	72,75	73,75	73,21	73,47	74,97	75,40	75,76	76,12	74,60	80,44	79,77	76,79
Sulawesi Tengah	84,67	85,42	83,91	82,84	84,28	84,96	82,63	82,22	80,53	80,78	81,50	81,34	82,71	83,31	85,29	85,84	83,04	83,91	84,66	87,14	85,37	83,70
Sulawesi Selatan	88,08	88,14	84,24	85,20	86,21	85,98	84,50	83,52	80,49	82,26	81,11	82,40	82,59	82,73	83,10	83,53	83,49	83,84	83,82	86,85	85,72	82,75

Sulawesi Tenggara	87,71	87,22	83,20	82,65	85,89	85,25	83,44	82,02	82,83	82,30	83,94	82,32	84,56	84,72	84,50	85,10	85,03	85,42	86,32	86,47	86,37	84,78
Gorontalo	-	-	74,24	73,68	77,05	74,22	73,49	70,86	72,48	77,60	75,10	74,44	78,14	78,38	80,82	81,20	80,23	80,71	79,24	81,66	82,93	80,45
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	88,67	86,20	86,72	86,77	83,99	86,65	86,37	88,17	88,05	88,62	88,71	89,00	91,47	90,99	88,98
Maluku	85,73	-	75,69	62,74	81,69	79,64	81,04	79,79	78,59	79,02	78,96	74,57	79,18	79,39	81,35	81,81	79,36	79,53	79,84	81,51	80,48	80,15
Maluku Utara	-	-	83,53	64,80	82,67	84,41	83,70	84,32	81,41	82,13	81,74	82,27	83,84	84,77	85,24	85,50	85,41	85,88	86,13	87,84	87,65	86,83
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	69,98	65,19	66,06	67,71	63,67	67,23	66,63	66,79	68,37	72,46	73,01	70,88	74,57	72,50	72,06
Papua	79,18	82,52	76,51	50,07	77,23	77,34	73,74	76,80	75,37	76,95	77,35	81,71	80,57	80,57	81,99	82,59	81,28	81,90	81,70	81,69	85,16	81,00
Total	84,98	84,68	80,71	82,47	83,66	82,38	81,95	81,24	79,06	79,25	79,36	78,00	78,77	79,22	80,18	80,89						

Sumber: www.bps.go.id

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGHAMBAT TERWUJUDNYA KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Perlunya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang hingga akademisi dalam rangka menyediakan perumahan kepada masyarakat berbasis pembiayaan kolektif untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Karena kebutuhan akan rumah tinggal masih sangat tinggi, sektor perumahan merupakan sektor yang luar biasa pentingnya, strategisnya bagi perekonomian, sektor perumahan adalah lokomotif perekonomian karena berkaitan dengan 170 industri lain. Jika sektor perumahan bergerak, maka 170 sektor industri lain bergerak. Namun masih adanya kasus korupsi terkait sektor perumahan ini menghambat laju perkembangan masyarakat seperti dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2012 di Makassar dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 604.482.050. Tindakan kecil seperti memberikan barang atau uang untuk mempercepat urusan administrasi adalah salah satu bibit korupsi yang sering terjadi namun dianggap menjadi suatu kebiasaan yang lumrah.

Sebagai mahasiswa dalam mewujudkan kota dan pemukiman yang berkelanjutan diperlukan nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki dalam mewujudkan kota dan pemukiman yang berkelanjutan diantaranya dengan nilai-nilai:

1. Tanggungjawab, bentuk dari nilai tanggungjawab ini dengan peningkatan program kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas pemukiman
2. Kepedulian, bentuk dari nilai kepedulian ini dengan menjaga keamanan dan menjaga fasilitas publik untuk kepentingan bersama di masyarakat
3. Disiplin, bentuk dari nilai disiplin ini dengan mentaati segala aturan yang telah dibuat baik oleh pemerintah maupun lingkungan masyarakat demi terjaganya kota dan pemukiman yang berkelanjutan

D. LATIHAN

1. Mahasiswa dibagi kedalam kelompok kecil untuk membahas terkait kota dan pemukiman yang berkelanjutan
2. Masing-masing kelompok akan membahas tema terkait:
 - Tempat tinggal wilayah kumuh
 - Konsumsi energi
 - Emisi karbon
 - Urbanisasi
 - Suplai air bersih
 - Lingkungan
 - Kesehatan

3. Setelah selesai berdiskusi maka setiap anggota di dalam kelompok akan bergabung dengan anggota kelompok lainnya, sehingga di dalam kelompok yang baru akan terdiri dari perwakilan masing-masing tema.
4. Selanjutnya, setelah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan memperoleh masukan dari anggota kelompok lainnya, masing-masing kelompok ditunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya di dalam kelompok besar

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/kota-dan-pemukiman-yang-berkelanjutan/>, (17/11/2018)

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html>, (17/11/2018)

Surya Perkasa, Menyorot Masalah Kekurangan Pasokan Rumah, <http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/9K5BX71N-menyorot-masalah-kekurangan-pasokan-rumah> (17/11/2018)

Pramdia Arhando Julianto, Hingga 2025, Kebutuhan Rumah di Indonesia Tembus 30 Juta Unit, <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/17/195151226/hingga.2025.kebutuhan.rumah.di.indonesia.tembus.30.juta.unit> (17/11/2018)

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB



“MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB

A. GAMBARAN UMUM KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB⁷⁷

Pola produksi dan konsumsi yang digunakan saat ini menghambat untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan tepat guna. Selain itu pola pembuangan limbah dan polutan beracun hasil produksi pabrik harus menjadi perhatian demi menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu cara agar produksi yang bertanggungjawab ialah dengan mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah hasil produksi. Mengurangi sisa makanan perkapita global dari pedagang ke konsumen hingga setengahnya juga penting untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Hal ini membantu menjaga ketahanan pangan dan juga menuju ekonomi dengan sumber daya efisien. Selain itu, apabila setiap orang di dunia beralih ke bola lampu hemat energi maka dunia akan menghemat hampir 120 miliar USD setiap tahunnya.

Terkait pola produk yang bertanggungjawab khususnya pada sektor pangan sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun akibat dari pola konsumsi yang tidak bertanggungjawab. Meskipun demikian, dari pola produksi dan konsumsi tersebut masih terdapat hampir 2 miliar orang menderita kurang gizi dan kelaparan.⁷⁸ Lebih lanjut, produksi makanan instan menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di bumi yakni sebanyak 22 persen.

Salah satu upaya dalam mewujudkan SDG #12 tentang pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab ialah dengan mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien; pengurangan limbah pangan dengan

⁷⁷ <http://sdgs.bappenas.go.id/konsumsi-dan-produksi-yang-bertanggung-jawab/>, (20/11/2018)

⁷⁸ <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html>, (20/11/2018)

pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan yang telah disepakati secara internasional dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia mengurangi produksi limbah melalui tahapan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali; mendorong perusahaan agar selalu berpraktek dengan tetap menjaga lingkungannya dan juga selalu melakukan pelaporan secara berkala atas aktifitasnya selama produksi.

B. KONDISI KONSUMSI DAN PRODUKSI INDONESIA INDONESIA

Indonesia menjadi negara keenam terbesar penghasil emisi gas rumah kaca dari aktivitas deforestasi. Namun, Indonesia juga telah berkomitmen untuk menekan laju perubahan iklim melalui Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAN/RAD GRK) dengan mengurangi emisi hingga 26% dari kegiatan deforestasi dan penggunaan lahan pada 2020. Indonesia kini bukan saja negara produsen dalam perdagangan global tetapi juga konsumen kelas dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, Indonesia mengonsumsi sendiri lebih dari separuh produk perkayuan, kertas, dan kelapa sawit yang dihasilkannya, saatnya konsumsi itu juga mengarah kepada konsumsi yang bertanggung jawab.⁷⁹

Penyebab utama kerusakan lingkungan adalah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, *Sustainable Consumption and Production* (SCP) dipandang sebagai instrumen dasar untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan memperkuat efisiensi sumber daya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bersama Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB) dengan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan Hidup (UNDEP) intens melakukan sosialisasi seperti mengadakan kegiatan *workshop*, pelatihan, seminar dan lain-lain dalam rangka mengajak masyarakat / konsumen agar memilih produk yang ramah lingkungan.⁸⁰

⁷⁹Micom, WWF Luncurkan Program Baru untuk Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, <http://mediaindonesia.com/read/detail/114774-wwf-luncurkan-program-baru-untuk-pola-konsumsi-dan-produksi-berkelanjutan>, (20/11/2018)

⁸⁰Randi Ernawan, Menuju Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan, <http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/2017/01/18/menuju-pola-konsumsi-dan-produksi-yang-berkelanjutan/>, (20/11/2018)



Sumber: www.satuharapan.com



Sumber: <http://liputan6.com>

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGHAMBAT KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB

Pola konsumsi dan produksi yang tidak bertanggungjawab dan sering kali terlupakan pada kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Penggunaan air secara berlebihan

2. Perluasan lahan pabrik untuk kepentingan produksi tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan
3. Pengelolaan sumber daya alam secara liar
4. Konsumsi energi secara berlebihan

Peranan mahasiswa dalam mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dengan memperhatikan nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki dalam mewujudkan konsumsi dan produk yang bertanggungjawab adalah dengan:

1. Kepedulian, bentuk dari nilai kepedulian ini dengan merubah gaya hidup dalam pola konsumsi sehari-hari
2. Tanggungjawab, bentuk dari nilai tanggungjawab ini adalah konsumsi sesuai dengan kebutuhannya

D. LATIHAN

1. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok yang berdiskusi dan membuat gagasan terkait bentuk kepedulian dalam mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
2. Tema yang akan digunakan oleh kelompok mahasiswa terkait dengan bentuk tanggung jawab dan kepedulian dalam mewujudkan konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab di kaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi diantaranya kepedulian dan tanggungjawab
3. Gagasan dan hasil diskusi di bentuk dalam iklan layanan masyarakat atau radio *performance*
4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/konsumsi-dan-produksi-yang-bertanggung-jawab/>,
(20/11/2018)

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html>, (20/11/2018)

Micom, WWF Luncurkan Program Baru untuk Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, <http://mediaindonesia.com/read/detail/114774-wwf-luncurkan-program-baru-untuk-pola-konsumsi-dan-produksi-berkelanjutan>, (20/11/2018)

Randi Ernawan, Menuju Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan, <http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/2017/01/18/menuju-pola-konsumsi-dan-produksi-yang-berkelanjutan/>, (20/11/2018)

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



**“MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT
UNTUK MENGATASI PERUBAHAN
IKLIM DAN DAMPAKNYA”**

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

A. GAMBARAN UMUM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM⁸¹

Dampak dari perubahan iklim tidak dialami secara langsung oleh setiap negara di dunia ini. Salah satu sebab utama dari perubahan tersebut berasal dari buangan gas rumah kaca yang terus meningkat, dan sampai dengan saat ini levelnya berada pada 50 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Hal tersebut mengakibatkan pemanasan global dan terjadinya perubahan iklim secara drastis di berbagai negara di dunia.

Sejak tahun 1970 jumlah bencana alam di seluruh dunia telah meningkat lebih dari empat kali lipat atau sekitar 400 per tahun. Kerugian akibat dari bencana alam seperti, gempa bumi, tsunami, banjir, badai tropis terhitung sekitar ratusan miliar setiap tahunnya, hal tersebut mengakibatkan perlunya investasi sebesar 6 miliar USD per tahun untuk biaya pengelolaan resiko bencana dan mengumpulkan sekitar 100 miliar USD per tahun untuk memenuhi kebutuhan negara berkembang dan membantu mengurangi bencana akibat dari perubahan iklim.⁸²

Setiap peningkatan suhu sebanyak 1°C maka hasil pertanian akan menurun sekitar 5 persen. Sejak tahun 1880 hingga 2012 suhu global dunia rata-rata meningkat sebesar 0,85°C. Dari tahun 1901 hingga 2010 permukaan laut rata-rata meningkat hingga 19cm dikarenakan memanasnya bumi dan es yang mencair. Hilangnya 1,07 juta km per dekade lapisan es di laut Arktik sejak 1979.

Dalam hal penanganan SDG #3 tentang perubahan iklim ini diperlukan beberapa langkah perubahan yang harus mulai dilakukan dengan: memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara; meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap tindakan antisipasi perubahan iklim; meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan

⁸¹ <http://sdgs.bappenas.go.id/penanganan-perubahan-iklim/>, (20/11/2018)

⁸² <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html>, (20/11/2018)

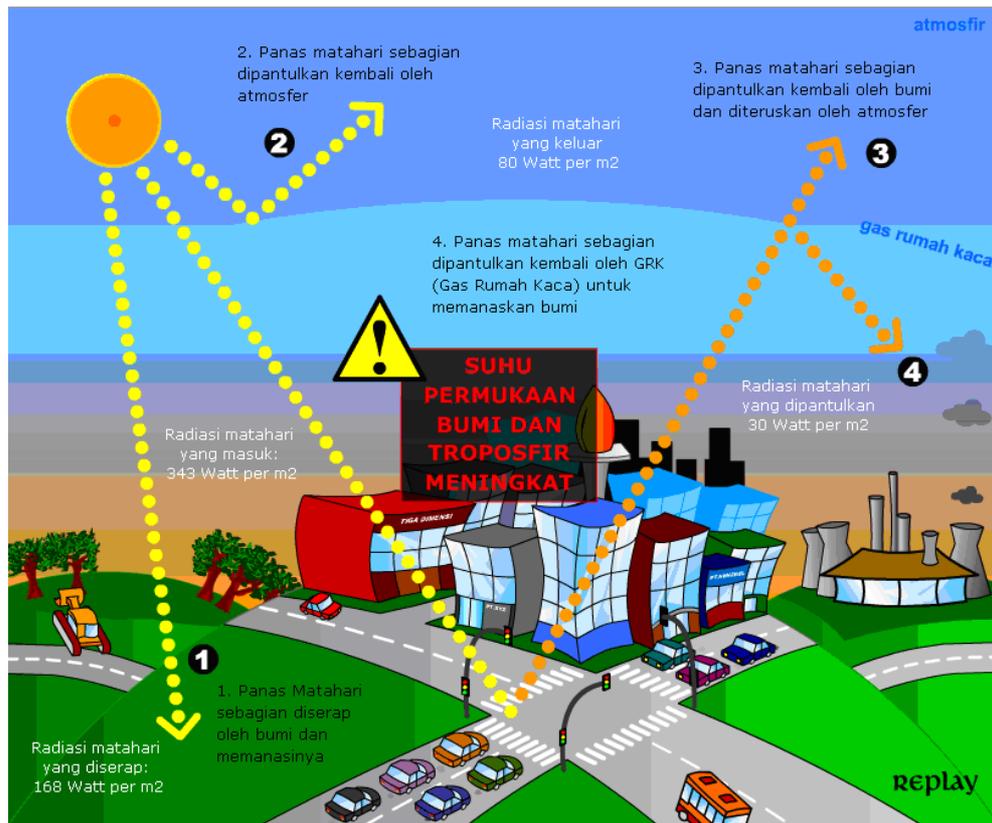
kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim; peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara iklim di seluruh negara.

B. KONDISI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Pada dasarnya, perubahan iklim bukan merupakan penyebab tunggal dari bencana alam yang saat ini semakin sering terjadi. Namun perubahan iklim berkontribusi dalam membuat fenomena atau bencana alam hidro-meteorologi ini menjadi ekstrem atau luar biasa. Sejak tahun 1960-2008, muka air laut di Indonesia memiliki laju peningkatan sebesar 0.8mm per tahun. Laju tersebut telah melonjak naik menjadi 7mm per tahun dari tahun 1993. Berdasarkan penelitian, pada tahun 2050, peningkatan muka air laut akan mencapai 90cm.⁸³ Sampai saat ini Indonesia telah kehilangan 29 ribu hektare daratan akibat kenaikan muka air laut. Indonesia bersamaan dengan negara kepulauan lainnya harus menghadapi permasalahan abrasi, kematian terumbu karang, dan relokasi penduduk pesisir.

Masyarakat pesisir dan pulau kecil menjadi salah satu kelompok orang-orang yang paling berdampak terhadap perubahan iklim telah terbukti memaksa masyarakat pesisir untuk mengubah cara berinteraksi dengan laut yang semakin hari tidak bersahabat. Para nelayan di Kepulauan Natuna yang umumnya masih melaut secara tradisional mengalami kesulitan yang hampir sama akibat perubahan iklim. Keluhan yang dirasakan di antaranya adalah perubahan musim tangkap dan kejadian cuaca ekstrem. Angin kencang, gelombang tinggi, badai laut datang di luar perkiraan dan menyulitkan nelayan untuk pergi melaut. Di samping itu perubahan iklim juga berdampak pada ekosistem laut. Meningkatnya suhu laut dapat menyebabkan berkurangnya plankton yang merupakan makanan utama bagi ikan-ikan dan kematian terumbu karang yang merupakan tempat ikan-ikan berkembang biak. Bahkan, di Natuna, sejumlah hewan penanda perubahan musim telah menghilang dari pengamatan.

⁸³ Farhan Anshary, Indonesia, Negara Maritim Terancam Perubahan Iklim, <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/kabar/18/02/02/p3j3zh393-indonesia-negara-maritim-terancam-perubahan-iklim>, (20/11/2018)



Sumber: www.mbojo.wordpress.com

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGHAMBAT TINDAKAN CEPAT DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Bank Dunia memperkirakan komunitas internasional membutuhkan dana 170 miliar-765 miliar dollar AS per tahun untuk menghadapi perubahan iklim. Walau jumlah dana yang dibutuhkan sudah dihitung, tetap saja belum ada kesepakatan bagaimana uang itu dikumpulkan, didistribusikan, dan dimonitoring. Di tengah ketidakpastian ini, korupsi sudah mengintai. UNFCCC di Kopenhagen 2009 berkomitmen mengalokasikan dana 30 miliar dollar AS pada 2010-2012, dan menjadi 100 miliar dollar AS pada 2020, untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim.⁸⁴

Bagi Indonesia yang dua pertiga warga miskinnya tinggal di pedesaan dan mengandalkan hidup sebagai petani, cuaca ekstrem menyebabkan penurunan produksi pertanian. Padahal, petani tidak mendapat asuransi atas kegagalan panen maupun akses modal untuk berusaha pada musim tanam berikutnya. Hilangnya produksi padi akibat kejadian iklim ekstrem pada periode 1981-1990 adalah sekitar 100.000 ton per tahun per kabupaten, meningkat menjadi 300.000 ton pada periode 1991-2000. Pada tahun 2050 terjadi defisit gabah kering sebesar 60 juta ton, dengan asumsi tidak ada

⁸⁴ Ahmad Arif, Paduan Maut: Korupsi dan Perubahan Iklim, <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/11/19/03225092/paduan.maut.korupsi.dan.perubahan.iklim>, (20/11/2018)

penambahan lahan atau pengurangan konsumsi per kapita. Sedangkan warga miskin dari kalangan nelayan menghadapi tingginya intensitas badai dan ketidakpastian cuaca. Selama Januari-September 2010, sebanyak 68 nelayan tradisional hilang di laut karena cuaca ekstrem. Selama periode awal hingga pertengahan Januari 2011, sudah 20 nelayan yang hilang di laut.⁸⁵ Besarnya potensi korupsi dalam pengelolaan dana untuk menghadapi perubahan iklim, karena belum ada kemajuan dan perubahan integritas di kalangan politisi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Tindakan sehari-hari yang sering kali luput dari pandangan terkait sikap koruptif diantaranya:

1. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi daripada transportasi umum
2. Penggunaan kantong plastik setiap kali melakukan perbelanjaan di mini market
3. Rendahnya tingkat kedisiplinan dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan

Mahasiswa memiliki peran dalam mendukung dan mengatasi dampak perubahan iklim melalui nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki dalam mewujudkan perubahan iklim tersebut diantaranya dengan nilai:

1. Kepedulian, bentuk dari nilai kepedulian ini dengan membudi dayakan tanaman hidroponik, karena tanaman hidroponik relatif lebih hemat bahan dan perawatan;
2. Disiplin, bentuk dari nilai disiplin ini dengan membuang sampah pada tempatnya;
3. Tanggungjawab, bentuk dari nilai tanggungjawab ini dengan beralih dalam penggunaan kantong plastik dengan kantong kertas atau tas belanja pribadi.

D. LATIHAN

1. Mahasiswa dibagi kedalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan terkait perwujudan perubahan iklim saat ini
2. Setiap kelompok akan membahas tema yang berbeda diantaranya:
 - Penggunaan listrik,
 - Penggunaan transportasi publik
 - Pola konsumsi
 - Penggunaan air secara efisien.
3. Hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan di depan kelas.

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/penanganan-perubahan-iklim/>, (20/11/2018)

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html>, (20/11/2018)

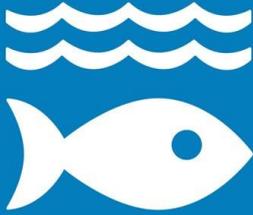
⁸⁵ Perubahan Iklim, Korupsi, dan Pemiskinan, <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/10/05201849/perubahan.iklim.korupsi.dan.pemiskinan>, (20/11/2018)

Farhan Anshary, Indonesia, Negara Maritim Terancam Perubahan Iklim,
<https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/kabar/18/02/02/p3j3zh393-indonesia-negara-maritim-terancam-perubahan-iklim>, (20/11/2018)

Ahmad Arif, Paduan Maut: Korupsi dan Perubahan Iklim,
<https://lifestyle.kompas.com/read/2010/11/19/03225092/paduan.maut.korupsi.dan.perubahan.iklim>, (20/11/2018)

Perubahan Iklim, Korupsi, dan Pemiskinan,
<https://nasional.kompas.com/read/2011/03/10/05201849/perubahan.iklim.korupsi.dan.pemiskinan>, (20/11/2018)

14 EKOSISTEM LAUTAN



“MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN EKOSISTEM LAUTAN YANG BERKELANJUTAN

A. GAMBARAN UMUM TUJUAN EKOSISTEM LAUTAN⁸⁶

Laut melingkupi 2/3 atau 75 persen dari permukaan bumi, sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya menggantungkannya pada ekosistem lautan. Dengan cakupan yang sangat besar, lautan merupakan tempat hidup bagi banyak spesies. Setidaknya terdapat 200.000 spesies yang teridentifikasi hidup di dalamnya. Jumlah ini tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah spesies yang hidup di lautan dan belum teridentifikasi, yang diperkirakan jumlahnya jutaan. Selain itu, lebih dari 3 miliar orang menggantungkannya mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai. Sumber daya kelautan menghasilkan US\$ 3 triliun tiap tahun atau sekitar 5 persen GDP global.

Faktanya 40 persen lautan terdampak akibat polusi, eksploitasi sektor perikanan secara berlebihan, kehilangan habitat dan aktivitas manusia lainnya. Faktanya pengasaman samudera mencapai hingga 26 persen sejak dimulainya revolusi industri serta rata-rata 13.000 bagian sampah plastik ditemukan di setiap kilometer persegi lautan. Padahal lautan memiliki fungsi yang besar untuk menangkal dampak dari pemanasan global dan menyerap 30 persen CO₂ yang diproduksi oleh manusia.

Melindungi lautan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh SDG #14. Target-target ditetapkan guna mencapai tujuan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan target yang ditetapkan antara lain dengan mencegah pencemaran, mengatasi dampak pengasaman laut, menghentikan penangkapan ikan berlebihan, meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, serta upaya lainnya yang dapat berdampak pada pencegahan kerusakan ekosistem kelautan.

⁸⁶ Lihat <http://sdgs.bappenas.go.id/ekosistem-lautan/>. Lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html>.

Melihat pada pentingnya ekosistem lautan serta fakta bahwa pencemaran ekosistem lautan terus berlangsung, maka harus diperhatikan cara manusia mengelola sumber daya lautan. Hal ini dimaksudkan guna memastikan ketersediannya bagi generasi yang akan datang serta menghindari kerusakan ekosistem lautan yang lebih buruk lagi. Kondisi potensi ekosistem lautan dan kerusakannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: The Nature Conservancy

B. KEADAAN EKOSISTEM LAUTAN INDONESIA

Guna mengetahui mengenai kondisi lautan Indonesia, maka dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang terkenal akan potensi sumber daya alamnya. Salah satunya adalah potensi laut Indonesia yang sangat beragam. Beberapa potensi tersebut antara lain:⁸⁷
 - a. Pariwisata bahari;
 - b. Pariwisata danau purba;
 - c. Ekosistem mangrove;
 - d. Potensi *blue carbon*;
 - e. Ekosistem terumbu karang.
2. Perusakan yang terus menerus dilakukan, khususnya oleh manusia dapat mengancam kelestarian ekosistem lautan, tidak terkecuali yang terjadi di lautan Indonesia. Beberapa fakta dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Kerusakan ekosistem laut

⁸⁷ Potensi Wisata Bahari dan Potensi Ekosistem, http://www.luwutimurkab.go.id/lutim3/index.php?option=com_content&view=article&id=1485:potensi-wisata-bahari-dan-potensi-ekosistem&catid=91:profil-kelautan-dan-perikanan&Itemid=387, [08/05/2018]. Lihat juga Jay Fajar, Potensi Peluang Blue Carbon dari Ekosistem Pesisir dan Laut, <http://www.mongabay.co.id/2014/05/18/potensi-peluang-blue-carbon-dari-ekosistem-pesisir-dan-laut/>, [08/05/2018].

- ✓ 30 tahun konservasi di laut, ancaman kerusakan ekosistem semakin tinggi sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan ekosistem lautan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain terkait dengan⁸⁸
 - Ancaman kerusakan tersebut diakibatkan oleh semakin tingginya kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak, pencemaran dari daerah aliran sungai (DAS), pembangunan pesisiran yang tidak terencana, dan perubahan iklim.
 - ✓ Berdasarkan data LIPI di tahun 2017, status kondisi tutupan terumbu karang Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁹
 - 1) 6,39 % kondisi sangat baik (76-100%),
 - 2) 23,40% kondisi baik (51-75%), 36,06 % cukup (26-50%),
 - 3) 35,15 % jelek (0-25%)
- b. Kerugian negara merupakan salah satu dampak yang timbul sebagai akibat pencemaran dan perusakan ekosistem lautan. Di bawah ini menunjukkan kerugian negara sebagai akibat pencemaran ekosistem lautan oleh sampah plastik, yakni:
- ✓ Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyumbang sampah plastik di laut terbesar di dunia. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai USD 1,2 miliar atau setara dengan Rp. 16 triliun.⁹⁰
 - ✓ Untuk membersihkan sampah plastik di laut, Indonesia harus menyiapkan dana Rp. 13,4 triliun untuk bersihkan sampah plastik di laut.⁹¹
 - ✓ Dampak plastik bahkan dirasakan oleh makhluk hidup yang hidup di lautan, sebagai contoh pada November 2018, seekor paus dengan panjang 9,5 meter ditemukan membusuk dan terdampar di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di dalam perut paus jenis *Sperm Whale* tersebut ditemukan sekitar 5,9 kilogram sampah yang mayoritas adalah sampah plasti.⁹²
 - ✓ Penangkapan ikan ilegal (*Illegal fishing*) merugikan negara hingga 30 triliun setahunnya.

Gambaran kondisi lautan Indonesia serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan keberlangsungan ekosistem lautan:

⁸⁸ M. Ambari, 30 Tahun Konservasi di Laut, Ancaman Kerusakan Ekosistem Semakin Tinggi, Kenapa? <http://www.mongabay.co.id/2017/05/15/30-tahun-konservasi-di-laut-ancaman-kerusakan-ekosistem-semakin-tinggi-kenapa/>, [10/05/2018].

⁸⁹ Wahyu Chandra, Membersihkan Sampah, Menyelamatkan Ekosistem Laut dan Pesisir, <http://www.mongabay.co.id/2017/06/16/membersihkan-sampah-menyelamatkan-ekosistem-laut-dan-pesisir/>, [10/05/2018].

⁹⁰ Indonesia Siapkan Dana Rp. 13.4 Triliun untuk Bersihkan Sampah Plastik di Laut, <http://reklamasi-pantura.com/indonesia-siapkan-dana-rp134-triliun-untuk-bersihkan-sampah-plastik-di-laut/>, [09/05/2018].

⁹¹ Indonesia Siapkan Dana Rp. 13.4 Triliun untuk Bersihkan Sampah Plastik di Laut, <http://reklamasi-pantura.com/indonesia-siapkan-dana-rp134-triliun-untuk-bersihkan-sampah-plastik-di-laut/>, [09/05/2018].

⁹² Kiki Andi Pati, Botol, Sandal hingga Karung Terpal Ditemukan dalam Perut Paus yang Mati di Wakatobi, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/20/16093791/botol-sandal-hingga-karung-terpal-ditemukan-dalam-perut-paus-yang-mati-dj>, [20/11/2018].



Sumber: <https://maritim.go.id/menko-luhut-sampah-tidak-ada-urusan-dengan-agama-suku-kaya-atau-miskin/>



Sumber: Humas KLHK



PEMBANGUNAN INSTALASI BUDIDAYA IKAN LEPAS PANTAI (OFFSHORE AQUACULTURE)



KOMPONEN KJA LEPAS PANTAI

- Cages**
- *Note* : Diameter KJA 25.5 m; kedalaman 15 m
- *Anchorage* : Sistem penjangkaran posisi KJA
- *Mooring* : Sistem jangkar



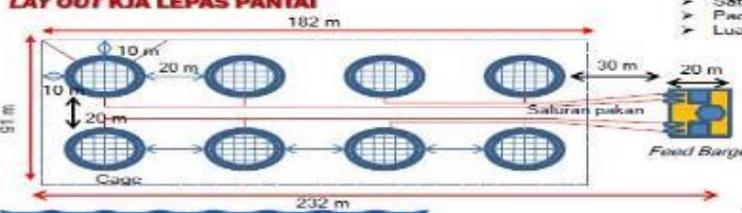


Feeding System and Maintenance (Feed Barge)
Dimensi : panjang 17.5 m; lebar 8 m
Bertfungsi sebagai ruang kontrol, *advanced feed system*, *feed silo*, *blower*, rumah jaga, ruang mesin, gudang pakan, air bersih

Boats (Working Vessel and Transport Boat)
Dimensi : panjang 10.5 m; lebar 5 m; crane 6.5 ton dan mesin 200 hk.
Bertfungsi untuk monitoring dan pemeliharaan jaring KJA, membantu transportasi benih dan pakan serta saat proses panen



LAY OUT KJA LEPAS PANTAI



- Satu lubang : 80 meter keliling lingkaran
- Padat tebar : 120.000 ekor per lubang
- Luas lahan yang digunakan : 2.1 Ha

OUTCOME

- 
 - Membuka peluang usaha baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, melalui usaha pendederan 1.450 orang tenaga kerja
 - Membuka peluang usaha baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, melalui usaha pendederan 21.000 ekor calon induk

Target Produksi Kakap Putih dari KJA Offshore (PER TAHUN PER LOKASI)

- 
Produksi 946 ton senilai 64.96 Milyar

Lokasi :

- *Aceh* Posisi : Pulau Weh, Kota Sabang : 05°46.146' S, 95°18.506' E
- *Jawa Tengah* Posisi : Kabupaten Jepara : 05°59.405' S, 110°23.622' E
- *Jawa Barat* Posisi : Kabupaten Pangandaran : 07°45.512' S, 108°40' 207' E



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
www.djpb.kkp.go.id

@BudidayaKKP
Budidaya KKP
Perikanan Budidaya KKP
@budidayakkp

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGHAMBAT KELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM LAUTAN

Kerusakan ekosistem lautan banyak disebabkan oleh perilaku manusia. Hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian dan tanggungjawab untuk menjaga keberlangsungan ekosistem lautan. Beberapa tindakan yang berpotensi merusak ekosistem lautan adalah:

1. Membuang sampah sembarangan;
2. Menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan;
3. Eksploitasi sumber daya kelautan secara berlebihan;
4. Penangkapan ikan ilegal;⁹³
5. Korupsi terkait pemberian izin pengelolaan sumber daya kelautan⁹⁴

Guna mencegah terjadinya tindakan-tindakan tersebut, maka nilai-nilai anti korupsi harus diinternalisasi dan diterapkan oleh individu, masyarakat, bahkan pemerintah. Nilai-nilai yang harus dimiliki untuk mencegah kerusakan ekosistem lautan atau menghambat kelestarian ekosistem lautan adalah:

1. Kepedulian, bentuk dari nilai ini misalnya dengan tidak membuang sampah ke aliran-aliran air seperti sungai yang dapat bermuara di lautan atau lautan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lautan, terlebih data menunjukkan menumpuhnya sampah di lautan terutama sampah plastik yang dapat
2. Tanggung jawab, bentuk dari nilai tanggung jawab misalnya dengan terlibat dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan kelautan.
3. Keberanian, misalnya melalui kebijakan yang melarang penggunaan cantrang karena akan merusak ekosistem lautan sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

D. LATIHAN

1. Mahasiswa melakukan riset dan membuat catatan terkait dengan:
 - a. Tindakan atau perbuatan yang dapat merusak atau mencemari ekosistem lautan;

⁹³ Berdasarkan data Direktorat Pajak Kementerian Keuangan dan data umum perpajakan pemilik kapal per-Januari 2015, jumlah pemilik kapal yang memiliki ijin kapal mencapai 1836, tetapi hanya 1204 yang memiliki NPWP. Hal ini tentu berdampak pada pemasukan negara dari sektor pajak, KPK dan KKP Telusuri Korupsi di Sektor Kelautan, Adakah?, <http://www.mongabay.co.id/2015/05/21/kpk-dan-kkp-telusuri-korupsi-di-sektor-kelautan-adakah/>, [09/05/2018].

⁹⁴ Misalnya korupsi royak rehabilitasi hutan dan lahan mangrove. Lihat. Dua Terpidana Korupsi Mangrove Dieksekusi, <http://aceh.tribunnews.com/2017/03/23/dua-terpidana-korupsi-mangrove-dieksekusi>, (09/05/2018). Lihat juga. Tersangka Korupsi Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditahan, <https://nasional.tempo.co/read/689224/tersangka-korupsi-rehabilitasi-hutan-mangrove-ditahan/full&view=ok>, [09/05/2018].

- b. Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah atau mengatasi kerusakan atau pencemaran ekosistem lautan.
2. Di dalam kelompok yang terdiri dari 12 orang, masing-masing anggota kelompok dibagi menjadi 12 peran. Apabila saudara memiliki peran dari salah satu pihak di bawah ini, maka hal-hal yang akan saudara lakukan adalah:
 - c. “Jika saya Menteri Kelautan dan Perikanan, maka untuk memastikan terjaganya sumber daya kelautan, saya akan”
 - d. “Jika saya Menteri UMKM, maka untuk memastikan pemberdayaan nelayan kecil, saya akan....?”
 - e. “Jika saya pengusaha, maka untuk memastikan tidak terbuangnya limbah ke lautan, saya akan ...”
 - f. “Jika saya *traveler*, maka untuk turut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan, saya akan”
 - f. “Jika saya nelayan, untuk menjaga kelestarian lautan, maka saya akan ...”
 - g. “Jika saya aparat penegak hukum (Polair dan TNI AL), maka untuk menjaga laut Indonesia dari penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), saya akan ...”
 - h. “Jika saya pemuka masyarakat setempat, maka untuk menjaga kelestarian laut, saya akan...?”
 - i. “Jika saya peneliti, maka untuk kontribusi terhadap kelestarian laut di Indonesia, saya akan...?”
 - j. “Jika saya pemuka agama, maka untuk mengajarkan nilai-nilai guna menjaga kelestarian lautan, saya akan ...?”
 - k. “Jika saya pembentuk kebijakan, maka untuk membuat kebijakan dalam rangka menjaga kelestarian lautan, saya akan ...?”
 - l. “Jika saya sebagai orangtua, maka untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, saya akan ...?”
3. Jawaban no. 2 merujuk pada riset yang telah dilakukan pada no. 1. Lalu diskusikan nilai-nilai anti korupsi apa yang harus dimiliki oleh masing-masing peran.

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/ekosistem-lautan/>.

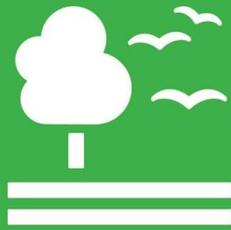
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html>.

Biro Informasi dan Hukum, Menko Luhut: Sampah Tidak Ada Urusan Dengan Agama, Suku, Kata atau Miskin, <https://maritim.go.id/menko-luhut-sampah-tidak-ada-urusan-dengan-agama-suku-kaya-atau-miskin/>, [20/11/2018].

Jay Fajar, Potensi Peluang Blue Carbon dari Ekosistem Pesisir dan Laut, <http://www.mongabay.co.id/2014/05/18/potensi-peluang-blue-carbon-dari-ekosistem-pesisir-dan-laut/>, [08/05/2018].

- M. Ambari, 30 Tahun Konservasi di Laut, Ancaman Kerusakan Ekosistem Semakin Tinggi, Kenapa? <http://www.mongabay.co.id/2017/05/15/30-tahun-konservasi-di-laut-ancaman-kerusakan-ekosistem-semakin-tinggi-kenapa/>, [10/05/2018].
- Wahyu Chandra, Membersihkan Sampah, Menyelamatkan Ekosistem Laut dan Pesisir, <http://www.mongabay.co.id/2017/06/16/membersihkan-sampah-menyelamatkan-ekosistem-laut-dan-pesisir/>, [10/05/2018].
- Indonesia Siapkan Dana Rp. 13.4 Triliun untuk Bersihkan Sampah Plastik di Laut, <http://reklamasi-pantura.com/indonesia-siapkan-dana-rp134-triliun-untuk-bersihkan-sampah-plastik-di-laut/>, [09/05/2018].
- Indonesia Siapkan Dana Rp. 13.4 Triliun untuk Bersihkan Sampah Plastik di Laut, <http://reklamasi-pantura.com/indonesia-siapkan-dana-rp134-triliun-untuk-bersihkan-sampah-plastik-di-laut/>, [09/05/2018].
- Kiki Andi Pati, Botol, Sandal hingga Karung Terpal Ditemukan dalam Perut Paus yang Mati di Wakatobi, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/20/16093791/botol-sandal-hingga-karung-terpal-ditemukan-dalam-perut-paus-yang-mati-di-wakatobi>, [20/11/2018].
- Mark Spalding, Terumbu Karang Mampu Bertahan, tapi Tidak Untuk Selamanya, <https://www.nature.or.id/blog/terumbu-karang-mampu-bertahan-tapi-tidak-untuk-selamanya.xml>, [20/11/2018].
- Dua Terpidana Korupsi Mangrove Dieksekusi, <http://aceh.tribunnews.com/2017/03/23/dua-terpidana-korupsi-mangrove-dieksekusi>, [09/05/2018].
- KPK dan KKP Telusuri Korupsi di Sektor Kelautan, Adakah?, <http://www.mongabay.co.id/2015/05/21/kpk-dan-kkp-telusuri-korupsi-di-sektor-kelautan-adakah/>, [09/05/2018].
- Potensi Wisata Bahari dan Potensi Ekosistem, http://www.luwutimurkab.go.id/lutim3/index.php?option=com_content&view=article&id=1485:potensi-wisata-bahari-dan-potensi-ekosistem&catid=91:profil-kelautan-dan-perikanan&Itemid=387, [08/05/2018].
- Tersangka Korupsi Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditahan, <https://nasional.tempo.co/read/689224/tersangka-korupsi-rehabilitasi-hutan-mangrove-ditahan/full&view=ok>, [09/05/2018].
- Pembangunan Instalasi Budidaya Ikan Lepas Pantai (*Offshore Aquaculture*), <https://kkp.go.id/infografis-detail/516-pembangunan-instalasi-budidaya-ikan-lepas-pantai-offshore-aquaculture>, [20/11/2018].
- Tim Program Kelautan dan Pesisir Indonesia, Pendekatan SIGAP Untuk Mengelola Sampah di Wakatobi, <https://www.nature.or.id/blog/pendekatan-sigap-untuk-mengelola-sampah-di-wakatobi.xml>, [20/11/2018].

15 EKOSISTEM DARATAN



“MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN EKOSISTEM DARATAN YANG BERKELANJUTAN

A. GAMBARAN UMUM EKOSISTEM DARATAN⁹⁵

Ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Faktanya 1.6 miliar orang menggantungkan kehidupannya pada hutan; selain itu, hutan juga merupakan rumah dari lebih 80% jenis binatang, tanaman, dan serangga. Selain pada hutan, 2,6 milyar manusia di dunia juga menggantungkan mata pencahariannya di sektor-sektor pertanian; bahkan 8 dari 20 orang yang tinggal di perdesaan mengandalkan tanaman obat untuk kesehatannya. Selain habitat bagi makhluk hidup, daratan juga menjadi sumber air dan udara bersih yang berperan penting untuk melawan perubahan iklim.

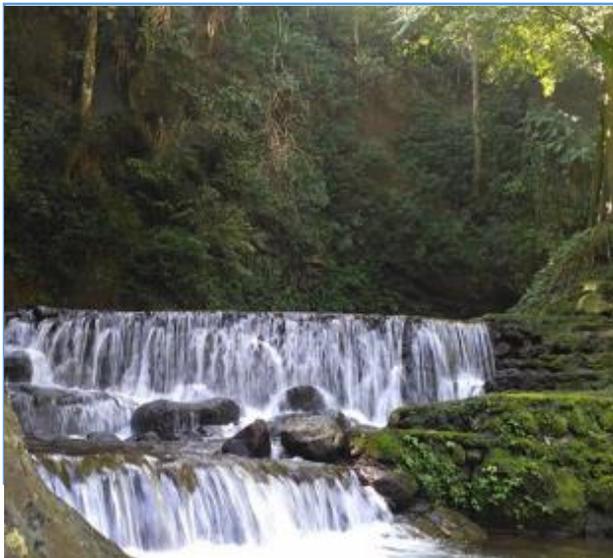
Namun kenyataanya, ekosistem daratan saat ini terancam karena kerusakan yang terus-menerus dilakukan, terutama oleh manusia. Dampaknya, dari 8.300 hewan yang diketahui, 8 persen telah punah dan 22 persen di ambang kepunahan. Hal ini terjadi karena perburuan yang dilakukan serta menurunnya kualitas habitat dan sumber makanan mereka. Saat ini, kualitas tanah terus mengalami penurunan serta hilangnya tanah yang ditanami hingga mencapai 30 sampai 35 kali jumlah rata-rata dalam sejarah. Selain itu, kemarau panjang dan perubahan lahan menjadi gurun mencapai 12 juta hektar. Perubahan tersebut berpengaruh pada komunitas miskin di dunia, selain pada hewan-hewan yang punah atau terancam punah.

Melindungi hutan dan ekosistem lainnya adalah tujuan dari SDG #15. Tujuan ini dilakukan dengan menjamin keberlanjutan dari ekosistem daratan. Target-target ditetapkan untuk mencapai tujuan ini, antara lain dengan menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan khususnya ekosistem hutan, lahan basah,

⁹⁵ Lihat <http://sdgs.bappenas.go.id/ekosistem-daratan/>. Lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html>.

pegunungan dan lahan kering. Selain itu upaya-upaya untuk memulihkan kondisi daratan juga dilakukan, seperti memulihkan tanah yang mengalami penggurunan, mengurangi degradasi habitat alami, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam kebijakan-kebijakan pemerintah, dsb.

Melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat merupakan cara untuk mencegah kerusakannya serta dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan dampak perubahan iklim serta mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati. Gambar ekosistem daratan yang dikelola dengan baik dan yang dalam kondisi rusak atau mengalami penurunan fungsi adalah sebagai berikut:



Sumber: KLHK



Sumber: WALHI

B. KEADAAN EKOSISTEM DARATAN INDONESIA

Menggambarkan kondisi ekosistem daratan, maka beberapa pertanyaan dapat dikemukakan antara lain:

1. Kenapa negara kepulauan berkurang daratannya?
2. Kenapa tanah subur berubah jadi gurun?
3. Kenapa hewan-hewan punah atau berada di ambang kepunahan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas terkait dengan kerusakan ekosistem daratan yang hingga saat ini terus terjadi. Hal ini tidak terkecuali terjadi di Indonesia. Beberapa catatan terkait kondisi ekosistem daratan Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Keanekaragaman hayati Indonesia

- ✓ Keanekaragaman hayati Indonesia terdiri dari keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.⁹⁶
 - ✓ Indonesia disebut sebagai *megabiodiversity country*. Daratan Indonesia hanya mencakup 1,3% daratan bumi, tetapi Indonesia memiliki 10 % tumbuhan dunia, 12 % mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17 % burung.⁹⁷
 - ✓ Keanekaragaman hayati Indonesia antara lain ditunjukkan dengan memiliki lebih dari 38.000 spesies tumbuhan, bahkan Indonesia memiliki 477 spesies palem.⁹⁸
 - ✓ Karakteristik flora dan fauna Indonesia meliputi karakteristik di wilayah Asia, Australia, dan peralihan dari keduanya.⁹⁹
2. Kondisi hutan Indonesia
- ✓ Berdasarkan *World Resources Institute* Indonesia (WRI Indonesia), fakta kondisi hutan di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰⁰
 - a. Indonesia peringkat ketiga di dunia untuk negara yang memiliki total area hutan tropis terbesar;
 - b. Hutan Indonesia terancam rusak karena 40 % dari keseluruhan hutan telah ditebang (*land clearance*) selama 50 tahun terakhir. Kementerian kehutanan mencatat kerusakan hutan hingga 2009 mencapai lebih dari 1,08 juta hektar per tahun;
 - c. Deforestasi meningkat semenjak tahun 1996 dan diperkirakan lahan yang terdampak adalah 2 juta hektar per tahun. Sejak 2010 sampai 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang mencapai 684.000 hektar tiap tahunnya;¹⁰¹
 - d. Pada tahun 2000, pembalakan liar mencapai 70 persen dari keseluruhan produksi kayu.

Gambar-gambar yang dapat ditunjukkan terkait dengan keanekaragaman hayati dan kondisi kerusakan ekosistem daratan Indonesia adalah sebagai berikut:

⁹⁶ BAPPENAS, Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Instrumen Penilaian dan Pemindaian Indikatif/Cepat bagi Pengambil Kebijakan, <https://www.bappenas.go.id/files/8013/5230/1588/buku-kh.pdf>, [20/11/2018].

⁹⁷ Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Indonesia, <http://www.mongabay.co.id/keanekaragaman-hayati-hutan-hujan-indonesia/>, [20/11/2018].

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Highlights of New Global Forest Watch Reports, https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_lembar_fakta.pdf. [20/11/2018].

¹⁰¹ Lihat juga. Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar, <https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>, [21/11/2018].



Sumber: Mongabay (Gajah mati akibat terserum listrik di Aceh Timur)





Sumber: Greenpeace



Sumber: Mongabay. Teknologi drone berhasil memetakan wilayah konsesi PT MKU. Perusahaan pertambangan bauksit ini terdeteksi beroperasi di luar izin konsesi yang dikuasainya. Termasuk dengan mengonversi Danau Semenduk menjadi kawasan pencucian bauksit. Peta: Swandiri Institute.

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA PERLINDUNGAN, RESTORASI DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM DARATAN

Upaya untuk menjaga keberlangsungan ekosistem daratan terancam dengan perilaku-perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan ekosistem daratan secara masif. Beberapa tindakan atau perilaku tersebut misalnya:

1. Penebangan kayu di kawasan hutan secara liar dan tidak bertanggungjawab;
2. Perburuan terhadap hewan liar;
3. Terancamnya kehidupan hewan liar di habitatnya akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit;
4. Pembuangan limbah berbahaya atau penggunaan pestisida/pupuk anorganik untuk pertanian dapat menyebabkan pencemaran tanah;
5. Kegiatan-kegiatan pertambangan yang tidak memulihkan kembali lingkungan/ tidak melakukan reklamasi pasca pertambangan;
6. Praktik-praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Guna mencegah tindakan-tindakan tersebut di atas, maka diperlukan adanya tindakan nyata dari semua pihak. Tindakan-tindakan tersebut merupakan cerminan dari internalisasi nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut:

1. Kejujuran, misalnya dalam jujur dalam proses permohonan dan pemberian ijin pembukaan lahan;
2. Kepedulian, misalnya dengan tidak memelihara satwa langka;
3. Kemandirian, misalnya dengan membuat biopori dan kompos atau mengelola sampah sendiri;
4. Kedisiplinan, misalnya dengan disiplin membuang sampah;
5. Tanggungjawab, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan;
6. Kerja keras, misalnya dengan menciptakan *green campus*;
7. Kesederhanaan, misalnya dengan tidak menggunakan air secara berlebihan;
8. Keberanian, misalnya dengan menegur orang yang buang sampah sembarangan;
9. Keadilan, misalnya dengan merawat kelestarian flora dan fauna.

D. LATIHAN

5. 9 nilai anti korupsi seharusnya dapat mencegah kerusakan ekosistem daratan yang dilakukan oleh manusia; akan tetapi faktanya masih terdapat perilaku-perilaku koruptif yang mengakibatkan terhambatnya perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan ekosistem daratan. Diskusikan dalam kelompok, bagaimana perilaku-perilaku di bawah ini dapat berdampak pada kerusakan ekosistem daratan:
 - a. Kasus korupsi yang melibatkan Bupati Buol, Amran Batalipu dalam kasus suap izin usaha perkebunan sawit di Buol.

- b. Kasus suap di Bangkalan yang melibatkan bupati Bangkalan, Fuad Amin dalam kasus jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, dimana terjadi pada saat Fuad Amin menjabat sebagai ketua DPRD Bangkalan.
 - c. Kasus suap rekomendasi jumlah luasan area kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan yang dilakukan oleh Bupati Bogor, Rachmat Yasin.
 - d. Kasus suap yang menjerat Gubernur Annas Maamun dalam alih fungsi hutan di Riau, dimana dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan barang bukti berupa uang sebesar Sin\$ 156 ribu dan Rp. 500 juta.
6. Setelah diskusi, kelompok menyusun pernyataan/deklarasi untuk berkomitmen mencegah perilaku-perilaku koruptif untuk menjaga keberlangsungan ekosistem daratan. Pernyataan/deklarasi disampaikan di depan kelas.

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/ekosistem-daratan/>.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html>.

Andi Fachrizal, Danau Semenduk ini Hilang Akibat Tambang,

<http://www.mongabay.co.id/2015/06/21/danau-pertambangan/> [30/10/2018].

BAPPENAS, Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Instrumen Penilaian dan Pemindaian Indikatif/Cepat bagi Pengambil Kebijakan,

<https://www.bappenas.go.id/files/8013/5230/1588/buku-kh.pdf>, (20/11/2018).

Waya Pesik Maweru, Saya Tidak Bisa Untuk Tidak Menangis Ketika Berpikir Tentang Kehancuran yang Telah Saya Saksikan di Negara Saya, Indonesia,

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/saya-tidak-bisa-untuk-tidak-menangis-ketika-b/blog/62018/>, [20/11/2018].

Highlights of New Global Forest Watch Reports, [https://wri-](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_lembar_fakta.pdf)

[indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_lembar_fakta.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_lembar_fakta.pdf). (20/11/2018).

Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Indonesia,

<http://www.mongabay.co.id/keanekaragaman-hayati-hutan-hujan-indonesia/>, [20/11/2018].

Mongabay Special Reporting Project: Conservation Technology,

<https://mongabay.org/programs/news/opportunities/mongabay-reporting-project-conservation-technology/>

Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar,

<https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>, [21/11/2018].

<https://walhi.or.id/hutan-dan-pesisir/>

<http://iikalahari.or.id/media/hotspot-agustus-2018/>

<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mongabay.co.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2F7.-Gajah-mati-akibat-tersetrum-listrik-di-Aceh-Timur.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mongabay.co.id%2F2018%2F04%2F22%2Ffoto-hari-bumi-begini-kondisi-lingkungan-hidup-di-aceh%2F&docid=H1CoiXMtQRaE4M&tbnid=B-ggxiqdOg6mvM%3A&vet=12ahUKEwj6zvOG3OTeAhUJr48KHR6PDjY4ZBAzKBwwHHoECAEQHQ..i&w=900&h=600&bih=582&biw=565&q=kerusakan%20lahan%20di%20indonesia%20mongabay&ved=2ahUKEwj6zvOG3OTeAhUJr48KHR6PDjY4ZBAzKBwwHHoECAEQHQ&iact=mrc&uact=8>.

16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh



“PERDAMAIAN, Keadilan, dan
Kelembagaan yang Tangguh”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

A. GAMBARAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh¹⁰²

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, maka terdapat kondisi-kondisi yang harus diperhatikan, yakni perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan efektif berdasarkan hukum. Upaya-upaya mencapai kondisi-kondisi tersebut telah dilakukan misalnya melalui kebijakan-kebijakan yang inklusif. Faktanya saat ini perempuan di 46 negara di dunia telah menempati 30% di parlemen; bahkan *United Nations Development Programme* (UNDP) mendukung 1 dari 3 parlemen di dunia dan memberikan bantuan untuk pemilihan setiap dua minggu.

Akan tetapi, kondisi-kondisi ideal tersebut belum dapat terpenuhi. Terdapat 10 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia; ditambah lagi 603 juta wanita hidup di negara-negara yang tidak mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan. Kondisi tersebut diperburuk dengan fakta bahwa korupsi, penyuapan, dan penghindaran pajak merugikan negara-negara berkembang sampai dengan US\$ 1.26 triliun tiap tahunnya. Selain itu, tingginya kekerasan bersenjata dan rasa tidak aman memiliki dampak merusak pada pembangunan negara serta mempengaruhi ekonomi dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Disini peran negara menjadi penting untuk meredam semua konflik yang ada dengan membuat kebijakan hukum dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang berada dalam resiko.

Mendorong perdamaian dan keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh SDG #16. Untuk mencapai tujuan tersebut, target-target yang telah ditetapkan berkaitan dengan beberapa hal seperti mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian

¹⁰² Lihat <http://sdgs.bappenas.go.id/perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-tangguh/>. Lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html>.

dimanapun. Lebih lanjut Negara menjamin akses terhadap keadilan yang sama bagi semua orang, mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat serta memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, dan menggalakkan dan menegakkan undang-undang kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan adalah beberapa target yang juga ditetapkan dalam SDG #17.



Sumber: SETARA Institute
Peringatan Hari Toleransi Internasional 2018

B. KEADAAN PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan di Indonesia

Indonesia masih menghadapi situasi yang dapat mengancam perdamaian di masyarakat. Konflik, kekerasan, dan diskriminasi merupakan kondisi-kondisi yang masih terjadi yang berpotensi merusak tidak hanya pada perdamaian, melainkan juga pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ditambah lagi sendi-sendi bernegara dirusak dengan praktik-praktik korupsi yang masih marak terjadi terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara korup. Beberapa kondisi di Indonesia dapat dilihat pada data di bawah ini:

1. Angka kekerasan terhadap anak
 - a. Dalam sebuah riset yang dirilis awal Maret 2015 oleh *LSM Plan International* dan *International Center for Research on Women (ICRW)* yang dirilis awal Maret 2015 ini menunjukkan fakta bahwa terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%.¹⁰³

¹⁰³ Nafiysul Qodar, Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah, <https://www.liputan6.com/news/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>, [22/11/2018].

b. Hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2011 sampai 2014 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang cukup signifikan, yakni:¹⁰⁴

- ✓ Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan;
- ✓ Tahun 2012 terjadi 3512 kasus kekerasan;
- ✓ Tahun 2013 terjadi 4311 kasus kekerasan;
- ✓ Tahun 2014 terjadi 5066 kasus kekerasan.

Temuan dan Catatan Tahun 2018 yang dirilis oleh Komnas Perempuan menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2017, yakni 348.446 kasus yang terdiri dari:¹⁰⁵

- 1) 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama;
- 2) 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi.

2. Diskriminasi di Indonesia juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Berdasarkan data SETARA Institute, dari tahun 1998 hingga 2013, terdapat setidaknya 2.398 kasus intoleransi bernuansa SARA yang berujung kekerasan.¹⁰⁶

3. Korupsi di Indonesia menunjukkan data sebagai berikut:

- a. Tahun 2017, skor IPK Indonesia adalah 37 dari skor 0 sangat korup dan 100 sangat bersih (data Transparansi Internasional);¹⁰⁷
- b. *Control of corruption* Indonesia dikategorikan lemah (dengan kisaran -2,5 kategori lemah dan 2,5 kategori kuat), dimana rata-rata antara periode 1996-2015 adalah -0,76 poin dengan poin minimum -1,13 pada tahun 2002 dan poin maksimum -0,45 pada tahun 2015. (data *World Bank*);¹⁰⁸
- c. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sepanjang tahun 2017 ada sebanyak 241 kasus korupsi dan suap terkait pengadaan sektor infrastruktur.¹⁰⁹
- d. Di Indonesia, korupsi antara lain terjadi pada sektor peradilan, praktik bisnis, serta sektor sumber daya alam.

Gambar-gambar berikut menunjukkan fakta terkait dengan perdamaian, keadilan dan kelembagaan di Indonesia

¹⁰⁴ KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, [22/11/2018].

¹⁰⁵ Lembar Fakta dan Poin Kunci, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Jakarta, 7 Maret 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Cat%20ahu%207%20Maret%202018.pdf.

¹⁰⁶ SETARA Institute, Toleransi Keberagaman Semu, <http://setara-institute.org/toleransi-keberagaman-semu/>, [22/11/2018].

¹⁰⁷ https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017. (22/11/2018)

¹⁰⁸ The Global Economy, "Control of Corruption", http://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_corruption/, [22/11/2018].

¹⁰⁹ ICW Ingatkan Potensi Dugaan Korupsi di Proyek-proyek Infrastruktur, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/18/icw-ingatkan-potensi-dugaan-korupsi-di-proyek-proyek-infrastruktur?page=all>, [22/11/2018].



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Rangkaian Kegiatan KEMEN PP dan PA yang Dilakukan Bulan Februari Tahun 2016



Sumber: Suara.com
Peristiwa Ledakan Bom di Surabaya

C. PERILAKU KORUPTIF YANG MENGHAMBAT PERDAMAIAN, Keadilan DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Perdamaian dan keadilan adalah kondisi yang harus dapat dijamin oleh negara melalui kelembagaan yang tangguh. Banyak nya kasus-kasus kekerasan, diskriminasi, dan praktik-praktik pelanggaran hukum seperti korupsi masih menjadi hal yang mencegah terwujudnya perdamaian dan keadilan. Hal-hal tersebut dipicu oleh beberapa sebab, yakni:

1. Perilaku koruptif yang dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti mencontek;
2. Bersikap tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti tidak mau terlibat aktif untuk melaporkan adanya kekerasan;
3. Tidak bersikap tenggangrasa dengan orang lain yang berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan;
4. Melakukan perundungan terhadap orang lain yang dalam posisi rentan;
5. Tidak peduli terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Perilaku-perilaku tersebut apabila dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi, maka terdapat beberapa nilai yang tidak diinternalisasi dengan baik. Sehingga untuk mencegahnya, maka nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki untuk mencegah kerusakan ekosistem laut atau menghambat kelestarian ekosistem laut adalah:

1. Kejujuran, misalnya tidak mencontek atau melakukan perbuatan-perbuatan curang/koruptif;
2. Kepedulian, misalnya peduli kepada masyarakat sekitarnya;
3. Tanggungjawab, misalnya ditunjukkan dengan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya;
4. Kerja keras, misalnya belajar untuk memperoleh hasil ujian yang baik;
5. Kesederhanaan, misalnya dengan tidak boros;
6. Keberanian, misalnya dengan berani melaporkan terjadinya kekerasan;
7. Keadilan, misalnya dengan memahami akan hak dan kewajibannya.

D. LATIHAN

1. Kemukakan pendapat atau pengalaman saudara terkait dengan hal-hal berikut ini:
 - a. Pengalaman berada dalam situasi perselisihan dalam masyarakat:
 - 1) Apa yang terjadi?
 - 2) Strategi atau langkah apa yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan?
 - 3) Apakah perselisihan berhasil diselesaikan?
 - 4) Apa yang terjadi pasca penyelesaian perselisihan?
 - b. Dari pengalaman tersebut di atas:
 - 1) Apa yang dipelajari dari situasi perselisihan yang dihadapi?
 - 2) Nilai-nilai apa yang penting untuk menyelesaikan perselisihan?

2. Selanjutnya diskusikan dalam kelompok bagaimana cara menjaga keberagaman di Indonesia serta nilai-nilai anti korupsi apa yang harus ditumbuhkan terkait dengan hal tersebut.
3. Tunjuk salah satu anggota kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok lainnya memberikan pendapat/pandangannya terhadap hasil diskusi kelompok penyaji.

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-tangguh/>.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html>.

Nafiysul Qodar, Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah,

<https://www.liputan6.com/news/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>, [22/11/2018].

KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat,

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, [22/11/2018].

Lembar Fakta dan Poin Kunci, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Jakarta, 7 Maret 2018,

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf.

SETARA Institute, Toleransi Keberagaman Semu, <http://setara-institute.org/toleransi-keberagaman-semu/>, [22/11/2018].

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017. [22/11/2018].

The Global Economy, "Control of Corruption",

http://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_corruption/, [22/11/2018].

ICW Ingatkan Potensi Dugaan Korupsi di Proyek-proyek Infrastruktur,

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/18/icw-ingatkan-potensi-dugaan-korupsi-di-proyek-proyek-infrastruktur?page=all>, [22/11/2018].

<https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/read/35/1042/februari-rangkaian-kegiatan-kemen-pp-dan-pa>

https://www.google.co.id/search?q=densus+88&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj72pa7_-feAhUQVH0KHUvUDzAQiR56BAgEEBM&biw=1242&bih=597#imgsrc=mXikQGlEXqSYgM:

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



“MENGUATKAN SARANA
PELAKSANAAN DAN
MEREVITALISASI KEMITRAAN
GLOBAL UNTUK
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN”

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

A. PENGERTIAN KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN¹¹⁰

Terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) membutuhkan komitmen kuat pada kemitraan dan kerja sama global. Dengan semakin terbukanya akses antar negara, maka cara penting untuk berbagi ide dan mendorong inovasi adalah dengan memperbaiki akses pada teknologi dan pengetahuan. Sasaran utama yakni untuk meningkatkan penguatan kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan guna mendukung rencana nasional mencapai target.

Bagi negara berkembang perlu diberlakukan kebijakan yang terkoordinasi dalam mengelola utang; sedangkan bagi negara yang tertinggal, maka perlu mendorong investasi guna meraih pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara ini pada faktanya memerlukan bantuan dan sumber-sumber finansial guna meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan. Selain itu, bantuan pembangunan resmi dari negara maju sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2014 yang meningkat hingga 66% juga dipergunakan untuk membantu krisis kemanusiaan akibat konflik dan bencana alam.

Memperkuat solidaritas global merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh SDG #17. Target-target yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan SDG #17 antara lain adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (*Official Development Assistance/ODA*), secara signifikan meningkatkan ekspor dari Negara berkembang, meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, dsb.

Beberapa bentuk kemitraan di dunia adalah:

¹¹⁰ Lihat <http://sdgs.bappenas.go.id/kemitraan-untuk-mencapai-tujuan/>. Lihat juga <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html>.



B. KONDISI KEMITRAAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN

Isu-isu yang diangkat dari pembangunan berkelanjutan tujuan 17 antara lain adalah:

1. Teknologi, yakni terkait dengan penggunaan internet yang faktanya belum dinikmati oleh masyarakat di beberapa negara;
2. Pembangunan kapasitas (*capacity building*) yakni terkait dengan bantuan-bantuan dana yang digunakan untuk negara atau wilayah terjadinya krisis kemanusiaan, konflik, dan bencana alam;
3. Perdagangan, yakni terkait dengan impor dari negara-negara berkembang ke negara maju serta bebas pajak.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, memandang bahwa kemitraan memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya terkait dengan hubungan Indonesia dengan Negara lainnya, melainkan juga untuk pembangunan di dalam negeri. Beberapa bentuk kemitraan global yang dilakukan oleh Indonesia antara lain:

1. Kemitraan pembangunan Australia dengan Indonesia yang fokus pada mendukung upaya-upaya jangka panjang Indonesia di bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan lingkungan hidup;¹¹¹
2. Kemitraan *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan Indonesia untuk SDGs;¹¹²
3. Indonesia membangun kerangka kerja dengan Kelompok Bank Dunia untuk tahun 2016-2020 dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, meningkatkan

¹¹¹ <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>

¹¹² <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/indonesia-country-partnership-framework-for-2016-2020>

kesejahteraan serta membagi kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia secara luas.¹¹³

C. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI YANG MENDORONG PENGUATAN KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kemitraan didasarkan pada adanya kepercayaan dan tanggungjawab untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Semua permasalahan terkait dengan SDG #1 sampai dengan SDG #16 dapat diselesaikan dengan mengandalkan pada kerjasama atau kemitraan antar negara-negara di dunia.

Masih terdapat kesenjangan ekonomi antar negara-negara telah mendorong kesepakatan untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Negara-negara maju dengan tingkat perekonomian yang baik memiliki kepedulian untuk membantu negara berkembang untuk menguatkan sendi-sendi kehidupan bernegaranya. Sedangkan bagi negara berkembang, kemandirian terus menerus ditingkatkan untuk mampu membiayai diri sendiri dengan meningkatkan kemampuannya secara ekonomi.

Masing banyaknya permasalahan di dunia, menuntut kerja keras negara-negara agar dapat menyelesaikannya. Melalui kemitraan, keadilan dapat terwujud di semua negara di dunia dengan akses terbaik terhadap aspek-aspek kehidupan manusia serta lingkungan hidup.

D. LATIHAN

Diskusikan oleh saudara:

1. Apa tujuan dari kemitraan?
2. Mengapa kemitraan penting?
3. Siapa yang terlibat?
4. Apa yang dapat dilakukan?
5. Bagaimana melakukannya?
6. Apa dampak dari kemitraan dalam tercapainya SDGs?
7. Apakah pentingnya kemitraan global bagi Indonesia



¹¹³ UNDP, Contoh Hasil Kerjasama Pembangunan Indonesia, www.id.undp.org.

E. SUMBER

<http://sdgs.bappenas.go.id/kemitraan-untuk-mencapai-tujuan/>.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html>.

<https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>

<http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/indonesia-country-partnership-framework-for-2016-2020>.

UNDP, Contoh Hasil Kerjasama Pembangunan Indonesia, www.id.undp.org.

https://europa.eu/european-union/index_en

<https://www.wto.org/>

<https://asean.org>